Buku Ajar

EKONOMI PERTANIAN

Reza Nurul Ichsan, SE, MM
Lukman Nasution, SE.I, MM

Buku Ajar
EKONOMI PERTANIAN

BUKU AJAR EKONOMI PERTANIAN

Penulis:
Reza Nurul Ichsan, SE, MM
Lukman Nasution, SE.I, MM

Diterbitkan oleh
CV. Sentosa Deli Mandiri
Jl. Simpang Limun SM. Raja No. 65 Medan
Telp. (061) 42910752
Email : sentosadelimandiri@gmail.com
INDONESIA

Cetakan Pertama, November 2021
Sampul dan Tata Letak, Ahmad Iqram Nasution
Dicetak oleh CV. Sentosa Deli Mandiri

ISBN : 978-623-00000-0-0

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak tulisan di sebagian atau keseluruhannya, dalam bentuk dan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis termasuk fotocopy, rekaman, penyimpanan data, penerjemahan dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Reza Nurul Ichsan, SE, MM
Lukman Nasution, SE.I, MM
Buku Ajar Ekonomi Pertanian/
Reza Nurul Ichsan, SE, MM, dkk; editor, Dr. Sarman Sinaga, SE, MM
- Ed. 1, cet. 1. - Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2021.
vi, 230 hlm.; 23 cm

ISBN : 978-623-00000-0-0

1. Buku Ajar Ekonomi Pertanian
I. Judul II. Dr. Sarman Sinaga, SE, MM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku Ajar Ekonomi Pertanian ini tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa proses untuk menulis buku ini tidaklah mudah. Bimbingan dan karunia-Nya yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan buku ini.

Buku Ajar Ekonomi Pertanian diperuntukan terutama untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Politik khususnya dan mahasiswa fakultas lain umumnya, selain itu buku ini juga diperuntukkan kepada masyarakat pebisnis dan dunia usaha.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga dapat menyelesaikan Buku Ajar Ekonomi Pertanian ini.

Penulis menyadari, Buku Ajar Ekonomi Pertanian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan buku ini.

Buku Ajar Ekonomi Pertanian ini memberi pesan khusus kepada pengguna buku yakni di setiap bab penulis cantumkan ilustrasi, gambar atau skema yang membuat pengguna buku memahami isi dari buku

tersebut. Pesan selanjutnya yang disampaikan adalah pemahaman yang diberikan kepada pengguna buku dalam mempelajari buku ajar ini.

Medan, November 2021

Penyusun/Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB-I KONSEP DASAR EKONOMI PERTANIAN

A. Area Disiplin Ekonomi Pertanian 3
B. Hubungan Ilmu Ekonomi Pertanian dengan ilmu Lain 9
C. Klasifikasi Pertanian dan Petani 11
D. Lahan dan Penduduk Sumatera Utara 23
E. Pertanyaan 28
F. Daftar Pustaka 29

BAB-II PERAN PERTANIAN DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

A. Sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi ... 31
B. Peranan Sektor Pertanian. 35
C. Ekonomi Perdesaan 48
D. Strategi Pertanian ke Depan 52
E. Pertanyaan 55
F. Daftar Pustaka 56

BAB-III KARAKTERISTIK EKONOMI PERTANIAN DI INDONESIA

A. Ciri-ciri pertanian di Indonesia 59
B. Permasalahan utama pertanian di Indonesia 66
C. Isu-isu aktual ekonomi pertanian di Indonesia..... 72
D. Pertanyaan 76

BAB-IV APLIKASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI PADA USAHA TANI

A. Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam Usahatani 77
B. Prinsip-prinsip Teknik dalam Usahatani 80
C. Pertanyaan 84

BAB-V TEORI PRODUKSI PERTANIAN

A. LDR dalam Produksi Pertanian..... 85
B. Fungsi produksi 87
C. Pengaruh luas lahan terhadap pendapatan petani 98
D. Pengaruh kualitas tanah terhadap pendapatan petani..... 99
E. Pertanyaan 100

BAB-VI SUMBERDAYA PERTANIAN

A. Sumberdaya alam dan lingkungan Pertanian..... 101
B. Sumberdaya Manusia (Petani) 105
C. Lahan Pertanian..... 110
D. Modal Pertanian 115
E. Pertanyaan 119

BAB-VII KELEMBAGAAN PERTANIAN

A. Elemen Pemberdayaan Kelembagaan Pertanian.... 121
B. Peluang dan Strategi Pemberdayaan Kelembagaan.... 130
C. Pertanyaan..... 138
D. Daftar Pustaka..... 139

BAB-VIII BIAYA PRODUKSI PERTANIAN

A. Biaya produksi 141
B. Konsep Biaya Produksi Pertanian..... 146
C. Pertanyaan..... 152

BAB-IX TATANIAGA DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN

A. Pengertian Dasar Tataniaga 153
B. Definisi Dan Ruang Lingkup Tataniaga Pertanian..... 155
C. Tataniaga (Marketing) dan Penjualan (Selling)..... 156
D. Tataniaga dan Distribusi..... 156
E. Peranan Tataniaga Dalam Pembangunan Pertanian... 160
F. Sektor Konsumsi 162
G. Pertanyaan 166

BAB-X KARAKTERISTIK PRODUKSI DAN PRODUK PERTANIAN

A. Karakteristik Produksi 167
B. Produksi Bersifat Musiman..... 168
C. Produksi Bersifat Specifik Lokal dan Kondisonal.... 169
D. Adanya Variasi Biaya..... 170
E. Pertanyaan 176

BAB-XI PEMBANGUNAN PERTANIAN

A. Teori Pembangunan 177
B. Kebijakan-Kebijakan Pembangunan Pertanian..... 191
C. Kebijakan Pertanian Terkait Insentif Produksi 195
D. Pertanyaan 200
E. Daftar Pustaka..... 201

BAB-XII PEMBANGUNAN PERTANIAN

A. Teori Pembangunan 203
C. Kebijakan Pertanian Terkait Insentif Produksi 221
D. Pertanyaan 226
E. Daftar Pustaka..... 227

BAB-XIII KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN

A. Esensi Kemiskinan 229
B. Indikator Kemiskinan 233
C. Ketimpangan Pendapatan 238
D. Ekonomi Rakyat 239
E. Pertanyaan 241

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kontribusi Pertanian Kedua Tertinggi dalam PDB Indonesia, Kwartal III 2019..... 32

DAFTAR TABLE

Tabel 2.1. Persentase Petani Usaha Tanaman Hortikultura Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Tanaman di Indonesia..... 34

Tabel 2.2. Produksi Perikanan Subsektor 2008-2018 39

Tabel.2.4. Produksi Daging Sapi Menurut Provinsi..... 46

Tabel.2.5. Produksi kayu Bulat Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) 48



BAB - I

KONSEP DASAR EKONOMI PERTANIAN

Tujuan Intruksional

1. Mampu menjelaskan area disiplin ekonomi pertanian;
2. Mampu menjelaskan hubungan ilmu ekonomi pertanian dengan ilmu lainnya;
3. Mampu menjelaskan pendekatan teori ekonomi di bidang pertanian;
4. Mampu menjelaskan organisasi dan peranan pertanian.

Berbagai permasalahan dihadapi manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya, di antaranya berkaitan dengan bidang pertanian. Kehidupan individu, kelompok masyarakat, bahkan bangsa sangat tergantung pada ketersediaan hasil produksi sektor pertanian. Kebutuhan manusia akan produk-produk pertanian yang bersifat tidak terbatas, sedangkan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk-produk pertanian tersebut, bersifat terbatas memerlukan bidang studi ekonomi pertanian untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul.

Makna ekonomi pertanian bermula dari kemampuan disiplin ilmu ini untuk memecahkan permasalahan di bidang pertanian dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi. Teori permintaan

dan penawaran di bidang pertanian akan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan apa jenis bahan makanan yang harus diproduksi, dan berapa banyak yang harus diproduksi, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat suatu daerah atau negara akan bahan makanan. Selain itu, teori ekonomi juga dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan mengapa harga produk-produk pertanian naik atau turun selama periode waktu tertentu, mengapa harga yang dibayar oleh konsumen lebih tinggi daripada harga yang diterima oleh petani, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat dijelaskan jawabannya berlandaskan pada teori ekonomi.

Selain petani yang dapat bertindak sebagai produsen dari produk-produk pertanian sekaligus sebagai konsumen atas produk-produk pertanian, pemerintah juga berkepentingan terhadap hasil analisis ekonomi pertanian. Produksi, konsumsi dan pertukaran produk-produk pertanian memerlukan campur tangan pemerintah agar kebutuhan dalam negeri akan produk-produk pertanian dapat terpenuhi.

Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekspor, yang dimaksudkan untuk memperoleh devisa yang dapat digunakan untuk membiayai impor atas barang dan jasa, yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri, dapat dilakukan melalui seperangkat kebijakan ekspor dan impor. Semuanya ini akan dapat berjalan dengan baik bila didasarkan pada informasi yang akurat dengan menggunakan analisis ekonomi pertanian.

Aplikasi ilmu ekonomi pada bidang pertanian memerlukan cabang ilmu lainnya agar dapat memberikan penjelasan yang lengkap dan penyelesaian terhadap permasalahan yang ada di bidang pertanian. Tujuan utama dari berbagai pendekatan teori ekonomi untuk bidang pertanian adalah meningkatkan peranan pertanian dalam pembangunan perekonomian suatu negara.

A. Area Disiplin Ekonomi Pertanian

Setiap saat kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan ekonomi. Setiap individu harus memilih barang-barang, jasa-jasa dan kegiatan-kegiatan yang terbaik. Di sisi lain kita dihadapkan pada keterbatasan sumber daya yang akan digunakan untuk memperoleh barang, jasa dan kegiatan yang kita inginkan. Permasalahannya adalah bagaimana kita menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang biasa disebut juga sebagai proses ekonomi. Sejak kecil kita sebenarnya sudah biasa melakukan pilihan di antara dua atau lebih kegiatan: apakah pergi dengan ayah ke rumah saudara atau pergi dengan ibu ke pertokoan.

Membuat pilihan seperti itu merupakan keputusan ekonomi karena memilih kegiatan yang satu berarti harus mengorbankan kegiatan yang lainnya. Saat tumbuh menjadi dewasa, keputusan-keputusan ekonomi menjadi lebih kompleks misalnya menempuh pendidikan di perguruan tinggi atau bekerja, membeli traktor atau membeli ternak, memperbaiki rumah atau memperluas lahan yang akan disewa. Dalam hal ini secara terus menerus tanpa disadari kita telah menerapkan ekonomi sebagai seni, meskipun kita tidak mempelajari atau memahami ilmu ekonomi. Ahli di bidang pertanian, pelaku agribisnis, kepala pemerintahan setiap saat juga dihadapkan pada permasalahan ekonomi.

Mempelajari penerapan prinsip-prinsip ekonomi di bidang pertanian tidak menjamin keberhasilan pengambilan keputusan ekonomi, tetapi akan memberikan pemahaman entang proses ekonomi dan mengarahkan pengambilan keputusan ekonomi yang lebih baik (Sjo, 1976).

Karena setiap individu harus melakukan tindakan ekonomi setiap waktu, maka pemahaman mengenai praktek ekonomi akan lebih banyak daripada pemahaman tentang teori ekonomi. Setiap waktu kita

menggunakan gagasan atau konsep-konsep dan istilah-istilah ekonomi, seperti permintaan (demand), penawaran (supply), kesejahteraan (wealth), harga (price), persaingan (competition).

Oleh karena itu, untuk mengetahui area disiplin ekonomi pertanian perlu dipahami terlebih dahulu arti atau definisi dari ilmu ekonomi dan ekonomi pertanian itu sendiri. Berikut ini akan dijelaskan mengenai definisi kedua bidang ilmu tersebut. Menurut Sjo (1976), untuk mendefinisikan ilmu ekonomi kita harus mempertimbangkan empat hal, yaitu:

1. tidak terbatasnya keinginan manusia;
2. terbatasnya sumber daya;
3. alokasi sumber daya;
4. jangka waktu.

Dengan mengombinasikan keempat hal tersebut maka ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai studi tentang bagaimana masyarakat, baik individu maupun kelompok, mengalokasikan sumber daya-sumber daya yang terbatas di antara berbagai keinginan untuk memaksimumkan kepuasan pada waktu tertentu. Menurut Abbot dan Makeham (1979), ilmu ekonomi merupakan ilmu yang digunakan untuk menganalisis penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Seperti halnya dengan disiplin ilmu pada umumnya, diperlukan keahlian dalam menggunakan prinsip-prinsip ekonomi untuk memecahkan berbagai permasalahan. Aplikasi-aplikasi tersebut meliputi:

1. menentukan alternatif cara penggunaan sumber daya;

2. memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan pada berbagai tingkat preferensi;
3. berkaitan dengan butir 1 dan 2, berarti ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia antara lain pengambilan keputusan yang terbaik tentang penggunaan sumber daya.

Dengan demikian, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan jasmani yang tidak berhubungan langsung dengan uang. Selanjutnya dikemukakan bahwa secara umum, ilmu ekonomi berguna untuk membantu masyarakat suatu negara untuk memilih barang dan jasa yang lebih baik, barang dan jasa yang lebih banyak dan kualitas (taraf) hidup yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian di atas dan pengertian mengenai ilmu ekonomi, maka ekonomi pertanian dapat didefinisikan sebagai ilmu sosial terapan, yang prinsip-prinsip dan metode analitis ilmu ekonomi digunakan untuk mencari solusi bagi permasalahan ekonomi dalam bidang pertanian. Pada umumnya terdapat dua jenis permasalahan yang dihadapi oleh para ahli di bidang pertanian. Pertama, ahli ekonomi pertanian harus mampu menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kedua, ahli ekonomi pertanian harus menghadapi persoalan produksi dan distribusi produk-produk pertanian. Secara tradisional, ahli ekonomi pertanian lebih berorientasi pada dua jenis permasalahan tersebut. Saat ini, ekonomi lebih berorientasi pada konsumen sehinggaahli ekonomi pertanian dituntut untuk mencoba lebih memahami keinginan-keinginan konsumen.

Berikut ini akan disajikan gambaran mengenai pentingnya ekonomi pertanian bagi pemecahan permasalahan suatu negara. Uraian ini dimulai dengan menunjukkan pentingnya pertanian bagi

perekonomian negara yang bersangkutan, sistem perekonomian yang dianut, penggunaan prinsip ekonomi dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Pada akhirnya semuanya itu akan menunjukkan area disiplin ekonomi pertanian.

Amerika Serikat merupakan salah satu negara maju yang senantiasa meningkatkan perhatiannya pada kebijakan-kebijakan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup bagi rakyatnya, negara dan hubungannya dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Yang menjadi persoalan adalah sumber daya manusia dan sumber daya fisik potensial tidak cukup tersedia baik dalam kuantitas maupun kualitas untuk menyuplai pangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dunia yang terus meningkat.

Secara spesifik, produksi pangan dan serat serta distribusinya merupakan bagian yang penting dalam perekonomian Amerika Serikat. Sebagai produsen terbesar dari berbagai komoditi pertanian, Amerika Serikat memegang peranan penting dalam situasi pangan dunia. Karena pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, semua negara akan selalu memperhatikan pertumbuhan, perkembangan dan stabilitas produksi dan distribusi pangan. Oleh karena itu pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi untuk diaplikasikan pada produksi, distribusi dan konsumsi di bidang pertanian dan komoditi pangan adalah penting. Selain itu, gambaran tentang pertanian dan kebijakan pangan Amerika Serikat yang berkesinambungan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat Amerika Serikat

.Pada dasarnya, Amerika Serikat menganut sistem ekonomi pasar bebas (free enterprise economic system). Sistem ekonomi ini memberikan tingkat kebebasan yang besar bagi setiap individu untuk memilih atau membeli barang dan jasa, memasuki atau keluar dari kegiatan bisnis dan memanfaatkan sumber daya (tanah,

tenaga kerja, modal dan manajemen). Istilah ekonomi campuran (mixed economy) kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan ekonomi Amerika Serikat berkaitan dengan kepemilikan sumber daya produktif oleh pihak swasta dan pihak pemerintah. AmerikaSerikat juga digambarkan sebagai negara dengan sistem ekonomi yang berorientasi pasar (market-oriented economy) yang berbeda dengan sistem ekonomi yang kegiatan ekonominya direncanakan oleh pemerintah. Pemahaman mengenai sistem ekonomi suatu negara memerlukan studi tentang sistem harga pasar, peran penawaran dan permintaan dalam pengalokasian barang dan jasa, serta sumber daya di antara berbagai kegiatan ekonomi.

Agar memahami kekuatan-kekuatan pokok yang menentukan penawaran suatu komoditi yang tersedia di pasar, produsen harus mengetahui hubungan fisik dan ekonomi dalam proses produksi. Adapun aspek penting dalam proses produksi meliputi:

1. jenis produk
2. kombinasi sumber daya terbaik yang akan digunakan dalam proses produksi;
3. pengetahuan tentang macam-macam biaya produksi;
4. berproduksi pada tingkat output yang memaksimumkan keuntungan (Donald dan Malone, 1981).

Di balik permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen, terdapat kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi pilihan-pilihan konsumen dalam rangka memenuhi keinginannya. Konsumen akan berusaha memaksimumkan kepuasannya dengan memilih kombinasi barang dan jasa yang lebih baik atau lebih disukai dibandingkan kombinasi lainnya, dengan

tunduk pada kendala pendapatan atau anggaran yang terbatas

.Pasar yang merupakan tempat pertukaran secara ekonomis dalam sistem ekonomi pasar bebas, dapat dipelajari untuk menentukan bagaimana sumber daya-sumber daya dan produk-produk (barang dan jasa) dialokasikan dalam sistem ekonomi sebagai respons terhadap perubahan harga. Kegagalan pasar dapat terjadi dalam pasar bebas.

Diyakini bahwa industri-industri tertentu mengalami keuntungan secara ekonomis atau kerugian secara ekonomis dalam hubungannya dengan industri lainnya. Pada kasus-kasus tertentu, ada kemungkinan tidaklah cukup untuk mengandalkan mekanisme harga di pasar sebagai alat pendistribusian sumber daya ekonomi. Dalam situasi semacam ini perlu dilakukan intervensi atau campur tangan pemerintah dalam sistem harga melalui penetapan harga, pengaturan produksi, dan/ atau konsumsi serta perkiraan implikasinya secara ekonomis terhadap berbagai sektor ekonomi.

Kebijakan di bidang pertanian dan pangan berhubungan erat dengan kebijakan ekonomi internasional dan sangat penting terutama bagi konsumen dan produsen dalam negeri (domestik) maupun konsumen dan produsen luar negeri di seluruh dunia. Analisis terhadap kebijakan di bidang pertanian dan pangan serta evaluasi terhadap aspek-aspek yang mempengaruhi perekonomian domestikdan dunia dapat dilakukan setiap saat.

Pada akhirnya, hubungan antara penggunaan sumber daya alam, kebijakan dan produksi pertanian dapat diuji melalui suatu studi atau penelitian. Persoalan-persoalan berhubungan dengan konservasi sumber daya yang digunakan dalam kegiatan ekonomi, adanya persaingan (competition) atau saling melengkapi (complementary) di antara sumber daya seperti tanah dan air untuk produksi pangan atau untuk penggunaan lainnya dapat dianalisis dan dicari penyelesaiannya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, dapat dikatakan bahwa disiplin ekonomi pertanian memiliki ruang lingkup (area) yang luas. Namun demikian, menurut Soekartawi (1987), pada prinsipnya ruang lingkup ini dapat diklasifikasikan mulai dari kegiatan berproduksi, konsumsi dan pemasaran serta aspek-aspek lain yang mempengaruhi kegiatan produktif tersebut

B. Hubungan Ilmu Ekonomi Pertanian Dengan ilmu Lain.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa ekonomi pertanian pada dasarnya merupakan penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam pemecahan permasalahan di bidang pertanian. Sebagai ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia, maka ilmu ekonomi tidak dapat dipelajari tanpa memahami ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, ilmu politik, psikologi, dan antropologi.

Ilmu ekonomi melakukan penyelidikan tentang berbagai perilaku manusia, antara lain:

1. bagaimana masyarakat memperoleh penghasilan;
2. bagaimana masyarakat memproduksi barang dan jasa;
3. bagaimana masyarakat melakukan pertukaran barang dan jasa;
4. bagaimana masyarakat mencapai kesejahteraan.

Setiap jenis perilaku manusia akan dipengaruhi oleh jenis perilaku lainnya. Perilaku ekonomi dipengaruhi oleh perilaku politik. Pendistribusian energi, keputusan politik akan memiliki konsekuensi-konsekuensi ekonomi yang besar. Kebiasaan masyarakat misalnya preferensi makanan sangat mempengaruhi keputusan-keputusan ekonomi dalam usaha tani.

Mahasiswa pertanian mempelajari ekonomi pertanian agar mengetahui bahwa ilmu ekonomi tidak dapat diterapkan di bidang

pertanian secara terpisah dengan ilmu pengetahuan lainnya. Keefektifan penggunaan ilmu-ilmu pengetahuan tertentu tergantung pada kemampuan pengguna untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan tersebut dengan ilmu pengetahuan lainnya yang telah diperoleh. Sebagai contoh, keuntungan dari pemasaran yang efektif akan hilang karena ketidakefektifan cara pemberian makanan dalam usaha peternakan.

Menurut Mubyarto (1979), ilmu ekonomi pertanian dapat didefinisikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi umum yang mempelajari fenomena-fenomena yang berhubungan dengan pertanian baik mikro maupun makro. Analisis ilmu ekonomi mikro dalam pertanian meliputi analisis ekonomi terhadap proses (teknis) produksi dan hubungan-hubungan sosial dalam proses produksi pertanian, hubungan antara faktor-faktor produksi, hubungan antara produksi dan hasil produksi, dan hubungan antara beberapa hasil produksi dalam suatu proses produksi.

Analisis ilmu ekonomi makro dalam pertanian mencakup kemampuan mahasiswa yang mempelajari ilmu ekonomi pertanian untuk menganalisis, menginterpretasikan, dan menghubungkan persoalan-persoalan ekonomi makro seperti masalah pendapatan nasional, konsumsi, investasi, kesempatan kerja dan pembangunan ekonomi berkenaan dengan bidang pertanian.Sesuai dengan perkembangannya di Indonesia, ilmu ekonomi pertanian bisa ditinjau dari dua sudut pandang.

Pertama, ilmu ekonomi sebagai cabang dari ilmu pertanian, dipelajari oleh mahasiswa Fakultas Pertanian. Aspek sosial ekonomi dari petani menjadi pusat perhatian para mahasiswa pertanian. Bidang ilmu lainnya yang terkait antara lain ilmu ekonomi, fisika, matematika, biologi, dan ilmu-ilmu lainnya.

Kedua, ilmu ekonomi pertanian sebagai cabang dari ilmu ekonomi,

dipelajari oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi. Dalam hal ini, ilmu ekonomi pertanian merupakan ilmu ekonomi yang diterapkan pada bidang pertanian. Dengan dasar teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro serta ilmu lainnya seperti akuntansi, statistika, matematika dan ekonometrika, para mahasiswa mempelajari aplikasi teori ekonomi pada permasalahan di bidang pertanian dan implikasinya bagi perekonomian nasiona

C. Klasifikasi Pertanian dan Petani

1. Klasifikasi Pertanian:

Belum ada klasifikasi pertanian yang baku sampai saat ini. Pertanian sering digolong-golongkan menurut keperluan tertentu, sering tumpah tindih, sering berbeda di lain daerah. Tanaman kentang di Indonesia masuk dalam Horti-kultura, di Eropah masuk dalam bukan Hortikultura tetapi tanaman makanan. Namun demikian dapat dihimpun klasifikasi pertanian sebanyak 11 macam penggolongan pertanian. Penggolongan itu adalah sebagai berikut:

a. **Pertanian dalam arti sempit dan luas.** Pertanian dalam arti sempit adalah bercocok tanam, jadi hanya kegiatan usaha tanaman. Dalam arti luas pertanian meliputi bercocok tanam, kehutanan, perikanan dan peternakan.

b. **Pertanian Rakyat dan Perkebunan,** perbedaan pertanianrakyat dengan perkebunan terutama terletak dalam luas areal dan manajemennya. Pertanian rakyat termasuk perkebunan rakyat dalam areal lebih sempit dan manajemen sederhana. Menurut pemilikannya perkebunan dibagi menjadi perkebunan BUMN, perkebunan Swasta Asing, perkebunan Swasta Nasional, Joint venture, dan PIR.

Akhir-akhir ini dikenal juga PIR unggas.

c. **Pertanian Tanaman Makanan dan Perdagangan**, Penggolongan ini cukup lemah, sebagai contoh tanaman padi adalah bahan untuk makanan, tetapi juga dapat diperdagangkan. Dalam kehidupan praktis yang dimaksud dengan tanaman perdagangan secara umum komoditinya bukan untuk sebagai bahan makanan. Tanaman Makanan terdiri atas: Tanaman Serealia, Kacangan dan Umbian.

d. **Pertanian Hortikultur dan non-Hortikultur.** Hortikultur terdiri dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bunga-bungaan. Hasil hortikultur pada umumnya mempunyai sifat mudah busuk/rusak (perishable) dan bermuatan besar (bulky = volumeneous). Sering disebut bahwa sifat seluruh hasil pertanian adalah perishable dan bulky, pada hal hasil pertanian non-hortikultur tidak mudah rusak dan tidak bulky seperti cengkeh, jagung, padi, lada dan lainnya. Karena itu hati-hati dalam menggeneralisasi sifat-sifat pertanian. Di Indonesia tanaman kentang termasuk tanaman hortikultura, tetapi di Eropah, misalnya di Belanda termasuk tanaman makanan.

e. **Pertanian Tanaman Semusim dan Tanaman Keras,** Tanaman semu-sim sering disebut tanaman muda atau tanaman tahunan atau annual crop. Contoh annual crop adalah padi, jagung, pisang, cabe, kentang,kacangan, dan sebagainya. Tanaman semusim ini dapat dibagi dua yaitu:

   1. Sekali tanam sekali panen seperti padi, jagung.
   2. Sekali tanam beberapa kali panen seperti cabe, tomat arcis, buncis dan sebagainya. Tanaman Keras atau perenial cropadalah tanaman yang berumur panjang dan dapat berbuah atau panen berkali-kali. Contohnya:

karet, kelapa sawit, coklat, duren, mangga, asam gelugur, duku dan sebagainya.

f. **Pertanian Subsisten dan Perusahaan**, Pertanian subsisten adalah perta-nian yang seluruh hasilnya digunakanatau dikonsumsi sendiri oleh pro-dusennya. Contoh: padi, jagung, ternak ayam yang dipelihara bertujuan untuk konsumsi sendiri, tidak ada maksud untuk dijual ke pasar. Pertanian subsisten secara murni pada saat ini dapat dikatakan sudah langka, hanya terdapat di daerah-daerah yang terisolasi seperti di Nias. Kalau hasil perta-nian itu hanya cukup untuk dimakan maka disebut subsistence level of living, dan kondisi ini sama dengan petani miskin. Pertanian perusahaan atau commercialadalah pertanian yang hasilnya bertujuan dijual ke pasar. Bukan harus semua hasil padi seorang petani dijual ke pasar, boleh saja sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual. Hasil tanaman karet pada umumumnya seluruhnya dijual ke pasar.

g. **Pertanian Generatif dan Ekstraktif,** Pertanian generatif adalah pertani-an yang telah dilakukan di dalamnya pemeliharaan/perlakuan pada proses produksinya. Petani terlibat dalam pemupukan, dalam pembrantasan hama/ penyakit, dalam pemilihan benih/bibit.Pertanian ekstraktif (sammel-wirtshaft) adalah usaha pertanian yang hanya mengumpulkan hasil, misal-nya pengambilan rotan di hutan, penebangan kayu hutan, pengambilan gubal gaharu di hutan, penangkapan ikan di laut. Bila rotan atau gaharu sudah dibudidayakan maka dia berubah menjadi pertanian generafif.

h. **Pertanian Lahan Sawah dan Lahan Kering**, lahan sawah adalah lahan yang pada saat-saat tertentu digenangi air

untuk ditanami, kalau terus-menerus tergenang air disebut kolam atau tambak. Berdasarkan sumber airnya sawah dibagi menjadi:

1. Sawah irigasi (teknis dan setengah teknis), tadah hujan, rawa, paluh dan sebagainya. Pengaliran/pemberian air ke lahan sawah disebut irigasi, boleh juga dengan sprinkle, pembuangan air keluar dari sawah disebut drainasi.
2. Lahan kering adalah lahan yang senantiasa diusahakan kering, lahan kering sering disebut lahan darat, tegalan, huma atau ladang. Usaha-usaha perkebunan pada umumnya terdapat di lahan kering.

i. **Pertanian Modern dan Tradisionil,** pertanian intensif dan ekstensif berkonotasi terhadap jumlah nilai input per hektar, pertanian modern dan tradiosionil berkonotasi ter-hadap tingkat penggunaan teknologi. Pertanian modern menggunakan teknologi lebih tinggi daripada pertanian tradisionil. Pertanian modern banyak menggunakan mesin-mesin, sedikit memakai tenaga manual. Pertanian modern belum tentu lebih menguntungkan dari-pada pertanian tradisionil. Pertanian modern di Sumatera Utara belum tentu modern bagi petani di USA. Pertanian modern dapat menimbulkan pengangguran di perdesaan di Indonesia.

j. **Pertanian Spesialisasi dan Diversifikasi,** pertanian spesialisasi disebut juga pertanaman sejenis atau monokulture pada usaha tanaman. Spesialisai berarti mengusahakan khusus satu jenis tanaman, atau satu jenis ternak atau satu jenis ikan.Pertanian diversifikasi disebut juga pertanian campur-an. Diversifikasi dalam arti sempit mengusahakan berbagai jenis tanaman atau berbagai jenis ternak atau ikan. Misalnya seorang petani menanam padi+jagung+pisang,

atau memelihara kambing + bebek+ayam, atau memelihara ikan lele+ikan gurami.Diversifikasi dalam arti luas adalah meng-usahakan tanaman+ternak, misalnya usaha ternak lembu+tanaman jagung, atau kombinasi dengan usaha ikan mas. Dalam arti luas ini harus paling tidak kombinasi dari usaha dari tanaman+ternak, atau ternak+ikan, atauikan+hutan, atau tanaman+hutan. Dilihat dari output usaha, diversifikasi dapat dibagi dua yakni diversifikasi horizonraldan diversifikasi vertikal. Usaha horizontal artinya memberikan output natural pertanian, yaitu semua usaha divesifikasi yang telah disebutkan di atas. Usaha vertikal bila dalam satu usaha itu mempunyai output natural + output pengolahan, misalnya seorang pekebun sawit menjual buah TBS dan menjual minyak sawit, atau seorang petani menghasilkan padi dan beras atau tepung beras.Untuk usaha tanaman saja, sejalan dengan pengertian diversifikasi terdapat beberapa istilah khusus yakni:

a. Tumpang gilir (multiple cropping),
b. Tumpang sari (inter cropping),
c. Bersisipan (relay cropping),
d. Bergiliran (squential planting).

k. **Pertanian Intensif dan Ekstensif**. orang awam menganggap pertanian intensif adalah pertanian yang memakai areal sempit dan banyak digunakan input, pertanian ekstensif adalah pertanian yang arealnya luas, pemakaian input tidak disebutkan. Intensif atau ekstensifnya suatu usaha pertanian dapat ditunjukkan dalam waktu yang sama atau berbeda, antar daerah, antar jenis tanaman/ usaha. Indikator menunjukkan intesif atau ekstensif adalah ratio atau perbandingan dari jumlah penggunaan nilai input per

satuan luas, bukan hanya bergantung luas areal saja.

Klasifikasi Menurut Sub Sektor :

Selain klasifikasi yang telah dijelaskan di atas, masih ada lagi klasisifikasi khusus pada Sub-sektor Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan. Adapun klasifikasi atau istilah-istilah itu dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Peternakan

   Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

   - Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara atau yang masih liar.
   - Hewan piara adalah hewan yang cara hidupnya sebagian diten-tukan oleh manusia untuk maksud tertentu.
   - Ternak adalah hewan piara yang tempatnya, reproduksinya, pemeliharaannya dan hasilnya telah dikelola oleh manusia.

   Istilah usaha ternak ikan mas, ternak lele adalah sangat salah dan keliru, karena ikan mas dan lelle bukan ternak. Tetapi kalau dikatakan usahatani ikan mas atau ushatani lele adalah lebih tepat.

   a) Berdasarkan golongan hewan, ternak dibagi menjadi:
      - Ternak besar yaitu lembu/sapi, kerbau dan kuda.
      - Ternak kecil yaitu kambing, biri-biri dan babi.
      - Ternak unggas yaitu ayam, bebek, angsa dan kalkun.

   b) Berdasarkan output ternak dibagi menjadi:

- Ternak perah/susu yaitu sapi, kerbau, kambing, biri-biri.
- Ternak daging yaitu semua ternak besar+ternak kecil dan ayam broiler.

c) Ada pula istilah ternak dwi guna misalnya ternak sapi potong yang berguna sebagai sumber daging + sumber tenaga kerja (dalam pengolahan lahan dan transportasi). Ayam dwiguna artinyadia sebagai ayam peterlor dan sebagai sumber daging. Berdasarkan sumber gizi makanan manusia maka ternak dibagi menjadi ternak penghasil daging, penghasil susu dan telor. Akhir-akhir ini dalam pertanian rakyat, hasil ikutan ternak yakni pupuk kandang sangat berperan dalam menaikkan produksi.

2. Perikanan

Berdasarkan tempat ekosistemnya perikanan dapat dibagi menjadi:

- Perikanan laut, bersifat ektraktif.
- Perikanan darat di air tawar, bersifat budi daya.

Berdasarkan output perikanan dapat dibagi menjadi:

- Golongan ikan, baik di laut dan di air tawar
- Golongan berkulit keras, termasuk udang
- Golongan binatang lunak, kerang dan cumi-cumi.
- Golongan binatang lainnya, sotong, penyu, ubur-ubur.

Udang bukan ikan tetapi itu termasuk usaha perikanan

Perikanan darat terdiri dari :

- Tambak,

- Kolam,
- Sawah,
- Sungai dan
- Danau.

Pada perikanan darat ini ada juga yang bersifat ekstraktif yaitu penangkapan di perairan umum. Orang yang bermatapencaharian di perikanan laut disebut nelayan, orang yang membudidayakan ikan disebut petani ikan (bukan peternak ikan). Nelayan terdiri dari:

- nelayan buruh,
- juragan
- pemilik kapal.

Ada orang yang mempunyai profesi sebagai nelayan dan sekali gus sebagai petani ikan. Berdasarkan perahu/kapal penangkap ikan nelayan pemilik dibagi menjadi :

- nelayan tradisionil
- nelayan bermotor.

Nelayan tradisional memakai perahu tanpa mesin/motor. Bila perahu mempunyai mesin yang ditempel di luar disebut perahu motor tempel, bila perahu/kapal telah mempunyai mesin di dalam kapal maka disebut kapal motor.

Berdasarkan besarnya mesin yang digunakan yang diukur dengan GT (Gross Ton), kapal dibagi menjadi

- kapal kecil yaitu 5GT-10GT,
- kapal sedang mempunyai mesin 15-30GT,
- kapal besar mempunyai mesin di atas 30GT.

Jika disebutkan nelayanpemilik berkapal besar berarti pemilik kapal motor untuk menangkap ikan itu mempunyai

kekuatan di atas 30GT.

3. Kehutanan

Menurut fungsinya hutan dapat dibagi menjadi:

- Hutan Lindung,
- Hutan Produksi,

Menurut pemilikan hutan dibagi menjadi:

- Hutan Negara,
- Hutan Rakyat.

Menurut ekologinya hutan dapat dibagi menjadi :

- Hutan Tropis,
- Hutan Bakau,
- dan lain-lain.

Bila suatu areal hutan yang belum pernah dijamah manusia maka disebut hutan original. Pohon/tumbuhan di semua jenis hutan diatas tidak ada yang ditanam oleh manusia. Bila ditanam kembali oleh manusia karena ditebang maka disebut hutan reboisasi.

2. Klasifikasi Petani

Seperti halnya dengan klasifikasi pertanian, klasifikasi petani juga belum ada yang lengkap atau baku. Siapa itu petani? Belum ada teks book atau bahan bacaan yang memperinci petani, oleh karena itu kebijakan dalam pembangunan pertanian sering melenceng. Pada umumnya kebijakan dari pemerintah hanya melihat pertanian bukan melihat petaninya. Sektor pertanian dapat dibangun secara tangguh tetapi petaninya banyak yang terceceran.Petani itu adalah orang atau manusia, bukan robot atau ternak. Seorang warga desa kerjanya buruh, kehidupannya

sangat rentan dan sangat miskin, dia tidak memiliki lahan dan modal, dia adalah seorang petani juga. Seorang warga desa memiliki kebun duku 4 hektar, mempunyai net income dari buah dukunya Rp.120 juta setahun, dia juga adalah seorang petani.

- Apakah Dirut PTP juga seorang petani karena incomenya dari sektor pertanian?
- Siapa sebenarnya petani yang dimaksud dalam sehari-hari itu, dan dalam pembangunan pertanian itu bagi petani yang mana dimaksud/ditujukan??

Petani dapat diklasifikasikan menurut klasisikasi pertanian Menurut klasifikasi pertanian dapat disebutkan:

a. Petani tradisionil ataupetani modern.
b. Petani sawah atau petani darat.
c. Petani spesialisasi atau petani diversifikasi.

Menurut jenis usahanya adalah:

a) Petani padi bila dia mengusahakan tanaman padi.
b) Petani padi dan jagung, dia menanam padi dan jagung.
c) Petani/pekebun karet, dia mengusahakan tanaman karet.
d) Petani ikan mas, dia mengusahakan/memelihara ikan mas.
e) Peternak sapi perah, dia memelihara sapi perah, dan lain-lain.

Namun yang paling penting adalah klasifikasi petani menurut adalah menurut status sosial ekono-minya di perdesaan, yang dapat disebutkan sebagai berikut.

- Petani tanpa lahan dan modal. Petani ini paling miskin, paling rentan, dia hanya memiliki tenaga kerja. Contohnya buruh-buruh, petani yang baru kena PHK dari perkotaan, petani yang dirundung malang sepanjang tahun, petani

yang kena penggusuran dan sebagainya.

- Petani punya lahan sempit tanpa modal. Petani ini hanya memiliki lahan tempat berdiri rumah/gubuknya. Dia tidak dapat mengusahakan tanaman secara memadai, mungkin dapat memelihara ayam/bebek sebanyak 2-5 ekor saja. Profil petani ini sama saja dengan profil petani pada nomor 1. Petani nomor 1 dan 2 ini dapat dikembangkan dengan penanganan khusus, serius dan konsisten.
- Petani punya lahan sedang tanpa modal. Petani ini masih rendah pro-duksinya karena tanpa modaldia susah berusaha-tani karena tak ada modal. Petani semacam ini dapat dikembangkan dengan memberikan bantuan modal dan penyuluhan.
- Petani punya lahan cukup/luas dan modal cukup/besar. Hanya jenis petani ini yang membutuhkan penyuluhan atau diberikan inovasi baru untuk mengembangkan usahataninya.

Paradigma lama (mungkin masih banyak juga saat ini) mengembangkan pertanian dengan melihat/memfokuskan tanaman/ternak/ikannya, bukan diperhatikan petaninya di kelas mana. Yang penting "wongnya" bukan tanamannya. Penulis pernah berdiskusi dengan seorang birokrat di perikanan laut, dia selalu memperhatikan kesenangan hidup ikan di laut bukan kesejahteraan nelayan penangkap ikan itu. Hal ini mengakibatkan kehidupan nelayan makin susah.

Bukan berarti paradigma baru tidak melihat agro-ekosistem lahan darat/sawah dan lautan, ini juga harus diperhatikan jangan sampai dirusaki. Petaninya atau nelayannya nomor satu menjadi perhatian, dan tujuan pembangunan sektor pertanian adalah meningkatkan kesejahteraan petani/nelayan.Akan tetapi di sektor

kehutanan terjadi fenomena yang aneh.

Pengusaha atau orang pemegang HPH mempunyai izin menebang kayu hutan sama sekali tidak memperhatikan lingkungan hidup, secara pasaran disebutkan "sikat saja", banjir atau tidak adalah urusan belakang. Dalam hal ini orangnya/pelakunya terlalu dimanjakan, dampaknya terlalu diremehkan. Apakah neneknya yang menanami hutan yang dirusakinya itu?? Apakah ada petani hutan?? Ada orang/perusahaan yang memiliki HPH (Hak Pengusahaan Hutan), apakah dia itu seorang petani? Orang yang memilik HPH bukan memiliki lahan hutan tersebut, tetapi memiliki izin untuk menebang kayu hutan pada areal tertentu.

Mereka ini walaupun tanpa lahan tetapi dia tidak miskin (bukan seperti petani tanpa lahan yang disebutkan di atas).Siapa sebenarnya pengusaha yang memiliki HPH itu? Apakah nenek moyangnya atau dia sendiri dulu menanam kayu di hutan itu? Sudah jelas tidak ada ditanam mereka, tetapi mereka hanya memetik hasilnya saja. Usaha mereka ini dapat digolongkan menjadi petani ekstraktif, namun mereka ini tidak sama dengan petani ekstraktif rotan.

Kalau terjadi banjir karena penebangan kayu di hutan selalu dituduh yang melakukannya masyarakat di sekitar hutan itu. Kalau penebangan secara manual yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan, mustahil begini parahnya kondisi hutan di Republik Indonesia ini. Selanjutnya bagaimana petani sekitar hutan itu membawa kayu-kayu besar keluar dari hutan? Apakah ada kemampuan mereka menyeret/membawa kayu itu keluar dari hutan?

Akantetapi kalau pemilik HPH atau pengusaha melakukan penebangan kayu, tentunya memakai peralatan sinsaw yang bermacam teknologinya. Menebang kayu secara cepat dan meluas.

Bila kayu sudah ditebangi, dibuat jalan ke lokasi penebangan, kemudian alat-alat /truk besar membawa kayu itu keluar dari hutan. Dengan kata yang agak guron, pengusaha HPH panen tanpa menanam, tetapi petani di perdesaan sering menanam ta

D. Lahan dan Penduduk Sumatera Utara

1. Lahan Pertanian

Pengertian Lahan

Lahan oleh memiliki beberapa pengertian yang diberikan baik itu oleh FAO maupun pendapat para ahli. Menurut Purwowidodo (1983:1)lahan mempunyai pengertian: "Suatu lingkungan fisik yang mencakup iklim, relief tanah, hidrologi, dan tumbuhan yang sampai pada batas tertentu akan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan".Lahan juga diartikan sebagai "Permukaan daratan dengan benda-benda padat, cair bahkan gas" (Rafi□I, 1985:1).

Definisi lain juga dikemukakan oleh Arsyad yaitu :"Lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang diatasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk didalamnya hasil kegiatan manusia dimasa lalu dan sekarang seperti hasil reklamasi laut, pembersihan vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti yang tersalinasi. (FAO dalam Arsyad, 1989:1)"Selain itu lahan memiliki pengertian yang hampir serupa dengansebelumnya bahwa pengertian lahan adalah:"Suatu daerah dipermukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yang meliputi biosfer, atmosfer, tanah, lapisan geologi, hidrologi, populasi tanaman dan hewan serta hasil kegiatan

manusia masa lalu dan sekarang, sampaipada tingkat tertentu dengan sifat-sifat tersebut mempunyai pengaruh yang berarti terhadap fungsi lahan oleh manusia pada masa sekarang dan masa yang akan datang. (FAO dalam Sitorus, 2005:37).

Sifat Lahan

Sebagai mana yang diungkapkan oleh Arsyad (1989:10), pengertian sifat lahan yaitu :

"Atribut atau keadaan unsur-unsur lahan yang dapatdiukur atau diperkirakan, seperti tekstur tanah, struktur tanah, jumlah curah hujan, distribusi hujan, temperatur, darinase tanah, jenis vegetasi dan sebagainya". Sifat lahan merupakan suatu penciri dari segala sesuatu yang terdapat di lahan tersebut yang merupakan pembeda dari suatu lahan yang lainnya."Sifat lahan menunjukkan bagaimana kemungkinan penampilan lahan jika digunakan untuk suatu penggunaan lahan.

Sifat lahan menentukan atau mempengaruhi keadaan yaitu bagaimana ketersediaan air, peredaran udara, perkembangan akan kepekaan erosi, ketersediaan unsur hara, dan sebagainya. Prilaku lahan yang menentukan pertumbuhan tersebut disebut kualitas lahan.Sifat-sifat lahan terdiri dari beberapa bagian yaitu karakteristik lahan, kualitas lahan, pembatas lahan, persyaratan penggunaan lahan, perbaikan lahan (Jamulya, 1991:2).

a. Karakteristik Lahan

Karakteristik lahan adalah suatu parameter lahan yang dapat diukur atau diestimasi, misalnya kemiringan lereng, curah hujan, tekstur tanah dan struktur tanah. Satuan parameter lahan dalam survey sumbardaya lahan pada umumnya disertai

deskripsi karakteristik lahan.

b. Kualitas Lahan

Kualitas lahan mempengaruhi tingkat kesesuaian lahan untuk penggunaan tertentu. Kualitas lahan dinilai atas dasar karakteristlahan yang berpengaruh. Suatu karakteristik lahan yang dapat berpengaruh pada suatu kualitas lahan tertentu, tetapi tidak dapat berpengaruh pada kualitas lahan lainnya.

c. Pembatas Lahan

Pembatas lahan merupakan faktor pembatas jika tidak atau hampir tidak dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh produksi yang optimal dan pengelolaan dari suatu penggunaan lahan tertentu. Pembatas lahan dapat dibedakan menjadi dua yaitu : (1) Pembatas lahan permanen, pembatas lahan yang tidak dapat diperbaiki dengan usaha-usaha perbaikanlahan (land improvement). (2) pembatas lahan semetara, pembatas lahan yang dapat diperbaiaki dengan cara pengelolaaan lahan.

d. Persyaratan Penggunaan Lahan

Persyaratan penggunaan lahan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu:

- Persyaratan ekologikal, contohnya ketersediaan air, ketersediaan unsur hara, ketersediaan oksigen, resiko banjir, lingkup temperatur, kelembapan udara, dan periode kering.
- Persyaratan pengelolaan, contonya persiapan pembibitan dan mekanisasi selama panen.

- Persyaratan konservasi, contohnya control erosi, resiko komplen tanah, resiko pembentukan kulit tanah.
- Persyaratan perbaikan, contohnya pengeringan lahan, tanggap terhadap pemupukan.

e. Perbaikan Lahan

Perbaikan lahan adalah aktivitas yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas lahan pada sebidang lahan untuk mendapatkan keuntungan dalam meningkatkan produksi pertanian. Perbaikan lahan mutlak dilakukan agar kulaitas lahan dapat terus terjaga dan bermanfaatbagi generasi yang akan datan

2. Penduduk

Penduduk adalah warga negaraIndonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi, apakah kependudukan itu? Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.Para ahli biasanya membedakan antara ilmu kependudukan (demografi) dengan studi-studi tentang kependudukan (population studies).

Demografi berasal dari kata Yunani demos –penduduk dan Grafien –tulisan atau dapat diartikan tulisan tentang kependudukan adalah studi ilmiah tentang jumlah, persebaran dan komposisi kependudukan serta bagaimana ketiga faktor tersebut berubah dari waktu ke waktu. Ilmu demografi juga ada yang bersifat kuantitatif dan yang bersifat kualitatif.

Demografi yang bersifat kuantitatif (kadang-kadang disebut Formal Demography –Demography Formal) lebih banyak menggunakan hitungan-hitungan statistik dan matematik. Tetapi Demografi yang bersifat kualitatif lebih banyak menerangkan aspek-aspek kependudukan secara deskriptif analitik. Sedangkan studi-studi kependudukan mempelajari secara sistematis perkembangan, fenomena dan masalah-masalah penduduk dalam kaitannya dengan situasi sosial di sekitarnya.

Ilmu kependudukan yang perlu mendapat perhatian kita sekarang adalah lebih menyerupai studi antar disiplin ilmu yang dipadu dengan analisis demografi yang lazim diberi istilah Demografi Sosial. Disiplin lain banyak berhubungan dengan demografi antara lain matematika, geografi, sosilogi, ekonomi, kedokteran

E. Pertanyaan

1. Mengapa ilmu ekonomi penting untuk dipelajari?
2. Uraikan secara singkat mengenai ruang lingkup ekonomi pertanian menurut klasifikasinya!
3. Bagaimanakah hubungan antara ilmu ekonomi pertanian dengan ilmu-ilmu lainnya?

F. Daftar Pustaka

Abbot, J.C. and J.P. Makeham. (1979). Agricultural Economics and Marketing in the Tropics. Intermediate Tropical Agricultural Series.

Cramer, G.L. and C.W. Jensen. (1991). Agricultural Economics and Agribusiness. Singapura: John Wiley and Sons.

Donald J. Epp and J.W. Malone. (1981). Introduction to Agricultural Economics. New York: Macmillan Publishing Co, Inc.

Hardaker, J.B; Lewis, J.N. and McFarlane, G.C. (1970). Farm Management and Agricultural Economist: An Introduction. Singapore: Angus & Robertson Ltd.

Mubyarto. (1979). Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: LP3ES.

Peters, G. (1995). Agricultural Economics. An ElgarReference Collection. Brookfield. US.

Robertson, A. (1971). An Introduction to Agricultural Production Economics and Farm Management. Second Edition. New Delhi: McGraw Hill.

Sjo, Jauh. (1976). Economics for Agriculturalis: A Beginning Text in Agricultural Economics.Grid Series in Agricultural Economics.

Soekartawi. (1987). Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian: Teori dan Aplikasinya. Jakarta: C.V. Rajawali.

Upton, M. (1976). Agricultural Production Economics and Resources Use. Oxford University Press.



BAB - II

PERAN PERTANIAN DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Tujuan Intruksional

1. Menjelaskan pengertian sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi
2. Menjelaskan peranan sektor pertanian
3. Menjelaskan ekonomi perdesaan
4. Menjelaskan strategi pertanian ke depan
5. Menjelaskan agenda pertanian ke Depan

A. Sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi

Sektor pertanian berperan sangat penting dalam pembangunan ekonomi khususnya pada negara-negara yang sedang berkembang. Kuznets (dalam Ghatak,1984) mengatakan bahwa sektor pertanian dalam negara yang sedang berkembang mempunyai empat kemampuan potensial dalam memberikan konstribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan nasional.Keempat kontribusi itu adalah:

1) Kontribusi Produk

Ekspansi dalam sektor non pertanian sangat berkaitan dengan sektor pertanian. Sektor pertanian tidak saja secara kontinyu

dalam meningkatkan persediaan bahan pangan, juga untuk menyediakan bahan mentah untuk produk industri, seperti tekstil. Kontribusi produk sektor pertanian ditunjukkan oleh sumbangan sektor pertanian terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) dan juga keterkaitan (linkages) sektor pertanian terhadap sector lainnya.

Gambar 2.1. Kontribusi Pertanian Kedua Tertinggi dalam PDB Indonesia, Kwartal III 2019.



Sumber : https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/29/kontribusi-pertanian-kedua-tertinggi-dalam-pdb-indonesia#

2) Kontribusi Pasar

Oleh karena adanya bias ekonomi pada tahap awal pembangunan, sektor pertanian secara substansial memberikan kontribusi

terhadap pasar. Kontribusi ini ditunjukkan oleh pengeluaran petani untuk barang-barang industri, baik untuk konsumsi maupun sebagai input antara. Dipihak lain, sektor pertanian juga menjual outputnya untuk keperluan sektor lainnya.

3) Kontribusi Pasar

Oleh karena adanya bias ekonomi pada tahap awal pembangunan , sektor pertanian secara substansial memberikan kontribusi terhadap pasar. Kontribusi ini ditunjukkan oleh pengeluaran petani untuk barang-barang industri, baik untuk konsumsi maupun sebagai input antara. Dipihak lain, sektor pertanian juga menjual outputnya untuk keperluan sektor lainnya.

4) Kontribusi Faktor

Sebagai sektor yang paling tua, sektor pertanian menyumbangkan outputnya untuk faktor produksi kepada sektor lainnya. Kontribusi tersebut dapat berupakapital dan juga tenaga kerja termasuk sumberdaya manusia. Transfer capital terjadi karena surplus pada sektor pertanian disumbangkan kepada sektor non pertanian, hal ini disebabkan karena sekto rnon pertanian umumnya mempunyai permintaan capital yang lebihelastis

Dibandingkan pada sektor pertanian.Transfer tenaga kerjadari sektor pertanian disumbangkan ke sektor nonpertanian, hal ini disebabkan karena sektor non pertanian umumnya mempunyai persediaan tenaga kerja yang berlimpah.

Tabel 2.1. Persentase Petani Usaha Tanaman Hortikultura Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Tanaman di Indonesia

Jenis Tanaman	Persentase Petani Usaha Tanaman Hortikultura Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Tanaman di Indonesia (Persen)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	2018	2018	2018
Alpukat	81,99	18,01	100,00
Apel	94,74	5,26	100,00
Bawang Daun	91,96	8,04	100,00
Bawang Merah	91,98	8,02	100,00
Bayam	86,01	13,99	100,00
Buah Naga	88,23	11,77	100,00
Buncis	93,94	6,06	100,00
Cabai Besar	92,00	8,00	100,00
Cabai Rawit	88,14	11,86	100,00
Duku/Langsat/Duku	89,16	10,84	100,00
Durian	86,91	13,09	100,00
Jahe	89,67	10,33	100,00
Jamur	97,19	2,81	100,00
Jeruk Siam/Keprok	90,85	9,15	100,00
Kacang Panjang	90,87	9,13	100,00
Kangkung	77,45	22,55	100,00
Kentang	92,10	7,90	100,00
Ketimun	91,21	8,79	100,00
Kubis	94,09	5,91	100,00
Labu Siam	80,56	19,44	100,00
Mangga	85,00	15,00	100,00
Manggis	86,37	13,63	100,00
Melinjo	88,79	11,21	100,00
Nanas	88,22	11,78	100,00
Nangka	94,52	5,48	100,00
Pepaya	85,25	14,75	100,00
Petai	87,12	12,88	100,00
Petsai/Sawi	84,13	15,87	100,00
Pisang	85,39	14,61	100,00
Rambutan	83,97	16,03	100,00
Salak	80,66	19,34	100,00
Semangka	95,00	5,00	100,00
Terung	88,98	11,02	100,00
Tomat	95,55	4,45	100,00
Wortel	87,13	12,87	100,00

Sumber BPS, 2020.

5) Kontribusi Devisa

Pada negara-negara yang sedang berkembang, sektor pertanian sangat berperan dalam menyumbangkan devisa, karena ekspor utama negara-negara yang sedang berkembang adalah komoditas pertanian. Devisa hasil ekspor komoditas pertanian ini umumnya digunakan untuk membiayai pembangunans ektor-sektor nonpertanian. Hal ini pertama, disebabkan karena ekspansi produksi pada komoditas ekspor pertanianseperti kopi, kakao atau kapas dapat dilakukan dengan sistem perluasan tanaman secara subsistem (largely subsistence cropping system) untuk menghindari investasi baru. Kedua, karena sektor pertanian umumnya sering menggunakan tambahan modal yang relatif sedikit.

B. Peranan Sektor Pertanian.

Sumbangan atau jasa sektor pertanian pada pembangunan ekonomi terletak dalam hal.

a. Menyediakan surplus pangan yang semakin besar kepada penduduk yang kian meningkat.
b. Meningkatkan permintaan akan produk industri dan dengan demikian mendorong keharusan diperluasnya sektor sekunder dan tersier.
c. Menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk impor barang-barang modal bagi pembangunan melalui eksport hasil pertanian terus-menerus.
d. Meningkatkan pendapatan desa untuk dimobilisasi pemerintah.
e. Memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Di negara terbelakang produksi pangan mendominasi sektor pertanian. Jika output membesar lantaran meningkatnya produktifitas, maka pendapatan para petani akan meningkat. Kenaikan pendapatan perkapita akan sangat meningkatkan permintaan pangan. Dalam perekonomian seperti itu elastisitas pendapatan permintaan adalah sangat tinggi yang bisanya bergerak antara 0,6 persen sampai 0,8 persen.

Peran nyata sektor pertanian sebagai tumpuan pembangunan ekonomi nasional pada masa krisis dan selama pemulihan ekonomi, maka sektor pertanian perlu diposisikan sebagai sektor andalan dan didukung secara konsisten dengan mengembangkan ekonomi yang bersifat resource based. Atas dasar tersebut, potensi perekonomian pedesaan diharapakan akan menjadi determinan dari perekonomian nasional secara keseluruhan dan dengan demikian perubahan yang terjadi pada struktur perekonomian pedesaan perlu dicermati terutama dampaknya terhadap struktur kesempatan kerja dan pendapatan di wilayah pedesaan (Resthiningrum, 2011).

Para pemikir ekonomi pembangunan telah lama menyadari bahwa sektor pertanian memiliki peranan yang besar dalam perekono-mian, terutama di tahap-tahap awal pemba-ngunan (Lewis, 1954; Johnston dan Mellor, 1961; Kuznets, 1964). Sektor pertanian yang tumbuh dan menghasilkan surplus yang besar merupakan prasyarat untuk memulai proses transformasi ekonomi. Pada masa awal transformasi ekonomi, pertanian berperan penting melalui beberapa cara.

Sektor pertanian yang tumbuh cepat akan mampu meningkatkan pen-dapatan dan kesejahteraan penduduk di perde-saan yang pada gilirannya dapat meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor nonpertanian. Permin-taan yang tumbuh tidak saja terjadi bagi produk-produk untuk konsumsi akhir, tetapi juga produk-produk sektor nonpertanian yang digunakan petani sebagai input usahatani ataupun untuk investasi (Tomich et

al., 1995).

Lebih jauh lagi pertumbuhan sektor pertanian akan mendorong pembangunan agroindustri. Agroindustri yang ikut berkembang adalah in-dustri yang mengolah bahan baku primer yang dihasilkan pertanian, seperti industri pangan, tekstil, minuman, obat-obatan, dan industri bahan bakar nabati. Di bagian hulu, agro-industri yang ikut tumbuh adalah industri yang menyediakan input penting bagi pertanian, seperti industri pupuk, obat dan pestisida, mau-pun industri mesin pertanian.

Pada berkembangnya agroindustri, juga mengakibatkan semakin tum-buhnya infrastruktur, perdesaan dan perkotaan, serta semakin meningkatnya kemampuan manajerial sumberdaya manusia. Pengalaman Korea dan Taiwan menunjukkan bahwa sektor pertanian dan agroindustri yang tumbuh kuat dapat menjadi sarana penting bagi berkem-bangnya aktivitas-aktivitas di sektor nonpertani-an, seperti industri kimia, mesin, ataupun lo-gam (Otsuka dan Reardon, 1998).

Kemajuan teknologi di sektor pertanian yang diwujudkan dalam peningkatan produkti-vitas tenaga kerja menjadikan sektor ini dapat menjadi sumber tanaga kerja yang relatif mu-rah bagi sektor nonpertanian (Timmer, 1988). Selain itu, pertumbuhan sektor pertanian yang diikuti oleh naiknya pendapatan penduduk per-desaan akan meningkatkan tabungan.Tabu-ngan tersebut merupakan sumber modal untuk membiayai pembangunan sektor nonpertanian (Mellor, 1973).

Sektor pertanian yang tumbuh cepat dapat menjadi sumber penerimaan devisa. Kontribusi devisa pertanian ini diperoleh melalui peningkatan ekspor dan peningkatan produk pertanian substitusi impor. Devisa dari pertanian ini menjadi sarana strategis bagi industrialisasi di suatu negara. Pertumbuhan sektor pertanian yang

cepat terutama disebabkan oleh intensifikasi di subsektor tanaman pangan, yaitu dengan di-adopsinya padi ataupun gandum varietas ung-gul beserta pemanfaatan pupuk, pestisida, dan irigasi.

Berbagai faktor percepatan pertumbuhan sektor pertanian yang mampu mendorong pertumbuhan sektor nonpertanian (Tomich et al., 1995), adalah:

a. kebijakan yang lebih terbuka, dimana proteksi yang berlebihan bagi sektor industri, terutama lewat nilai tukar, akan menghambat tumbuhnya pertanian dan meng-hambat terbangunnya industri yang kompetitif;
b. terbentuknya pasar kredit dan perbankan yang efisien;
c. terbangunnya infrastruktur perdesaan yang mencukupi dan berkualitas untuk menghubungkan daerah perdesaan de-ngan pasar output maupun input;
d. manfaat dari pertumbuhan sektor pertanian terdistribusi dengan baik. Salah satu syarat untuk pertum-buhan sektor pertanian yang equitable adalah distribusi tanah beserta hak kepemilikan atau penguasaan yang lebih merata.

1. Pembangunan Sektor Perikanan

Pembangunan perikanan merupakan suatu proses atau upaya manusia dalam memanfaatkan segala bentuk sumber daya hayati perikanan dan sumber daya perairan melakukan kegiatan berupa penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan seiring dengan penerapan dan pengembangan IPTEK, pengembangan produk, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, penambahan jumlah peluang kerja dan usaha, serta meningkatnya devisa Negara yang disertai dengan upaya dalam memelihara dan melestarikan sumberdaya hayati dan lingkungan secara lestari.(Anonymous, 2014).

Pengembangan disektor kelautan dan perikanan secara teoritis memiliki keterkaitan dengan penumbuhan ekonomi nasional, namun hal ini tidak boleh dipandang sebagai cara untuk menuntaskan kemiskinan dan pengangguran. Sektor kelautan dan perikanan merupakan suatu basis perekonomian nasional, sewajarnya jika sektor ini berkembang menjadi sektor unggulan dalam kancah perdagangan internasional. Hal demikian membuat dukungan dari sektor industri terhadap pembangunan pada sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu hal yang bersifat keharusan (Kurniawan, 2010).

Pengembangan sektor perikanan tidak hanya terkait pada usaha perikanan tangkap maupun budidaya saja. Hendri (2010) menyatakan jika peluang bisnis kelautan dan perikanan dapat dilihat setidaknya dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal, potensi sumberdaya manusia, teknologi, sarana dan prasarana. Faktor eksternal berupaya aspek yang berhubungan dengan aspek permintaan produk perikanan dan syarat-syarat yang menyertai permintaan dalam persaingan.

Tabel 2.2. Produksi Perikanan Subsektor 2008-2018

Produksi Perikanan Menurut Subsektor (ribu ton), 2008-2018*											
Subsektor	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Perikanan Budidaya											
Budidaya Laut	1.966	2.820	3.515	4.606	5.770	8.379	9.035	10.174	9.773	9.808	9.246
Tambak	960	907	1.416	1.603	1.757	2.345	2.428	2.499	3.012	2.699	2.966
Kolam	479	554	820	1.127	1.434	1.774	1.964	2.043	2.289	2.826	2.629
Karamba	76	102	121	131	178	200	221	194	204	244	250
Jaring Apung	263	239	309	375	455	505	501	536	502	430	421
Jaring Tancap	-	-	-	-	-	-	66	41	43	25	55
Sawah	112	87	97	86	82	97	144	148	178	83	205
Jumlah Perikanan Budidaya	3.855	4.709	6.278	7.929	9.676	13.301	14.359	15.634	16.002	16.115	15.772
Perikanan Tangkap											
Perikanan Laut	4.702	4.812	5.039	5.346	5.436	5.707	6.038	6.205	6.115	6.604	6.702
Perairan Umum	494	296	345	369	394	398	447	473	465	468	659
Jumlah Perikanan Tangkap	5.196	5.108	5.384	5.714	5.829	6.105	6.484	6.678	6.580	7.071	7.361
Total	9051[r]	9.817	11.662	13.643	15.505	19.406	20.843	22.312	22.583	23.186	23.133

Catatan : r Angka diperbaiki

Sumber : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

2. Pembangunan Sektor Perkebunan

Sub sektor pertanian yakni perkebunan memberikan kontribusi penting kepada perekonomian negara. Berdasarkan harga konstans 2000, kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 10,97% dimana, sub sektor perkebunan menyumbang 2,31%, menyusul Sub sektor tanaman bahan makanan sebesar 6,96%. Sub sektor perkebunan telah menjadi sumber devisa non migas, sumber kesempatan kerja serta lapangan investasi bagi investor nasional maupun internasional (Soesastro, 2007).

Besarnya kontribusi sub sektor perkebunan kepada perekonomian nasional berkorelasi lansung dengan aspek agraria yakni ketersediaan lahan sebagai basis utama pembangunan perkebunan. Menurut Bahari (2004), "ada empat aspekyang menjadi parasyarat melaksanakan pembangunan pertanian, satu diantaranya adalah akses terhadap kepemilikan lahan". Sebab itu agraria yang terdiri dari lahan, air dan udara merupakan unsur yang amat penting untuk kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan sosial bangsa Indonesia.

Kebijakan terhadap lahan telah dimulai sejak pemerintah baru Indonesia dibawah pemerintah presiden Soekarno tahun1945-1966, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5/1960.Semangat dan isi UUPA No.5/1960 tersebut telah berpengaruh dominan pada penatagunaan lahan dan pembangunan perkebunan di Indonesia (Soetrisno, 1989).

Seiring dengan perubahan rezim pemerintahan dari Orde Lama ke pemerintahan Orde Baru, hak-hak agraria rakyat dalam UUPA 1960 berubah menjadi komersialisasi agraria seperti membukanya untuk investasi asing sebagai sumber pendapatan ekonomi nasional. Investasi asing yang padat modal dipayungi dengan UUPM (Undang-Undang Penanaman Modal) dan GBHN. Lahan perkebunan yang semula digarap petani dengan payung hukum

UUPA No. 5/1960, baik di pulau Jawa dan diluar pulau Jawa ditata dengan memberikan fasilitas HGU (Hak Guna Usaha) kepada Investor Asing.

Beberapa kebijakan agraria aspek penatagunaan lahan, diarahkan untuk mendukung pembangunan pertanian khususnya perkebunan di Indonesia, berikut ini beberapa kebijakan lahan dan perkebunan pada masa pemerintah orde baru antara lain;

a. Undang-undang No. 5/1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, UU No. 11/1967 tentang Pertambangan, kemudian Undang-undang UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) yang kemudian diganti dengan UU No. 11/1970.

b. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menhut, Mentan, Kepala BPN No. 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK. 050/7/90, tentang Pelepasan Kawasan Hutan dan No. 23/Kpts-VIII-1990 prosedur HGU, PP No. 40/1996 tentang HGU,SK No.76/Kpts-II/1997 tentang pelimpahan wewenang pencabutan SKB Menhut, Mentan dan Kepala BPN No. 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, SK Menhutbun No. 728/Kpts-II/1998 tentang kebijakan yang mengatur luas maksimum pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan, Keppres. No. 34/2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan, UU No. 26/2007 tentang Tata Ruang, PP No. 18/2010 tentang Usaha Budi Daya Tanaman Skala Luas, yang semuanya itu menjadilandasan kebijakan penatagunaan lahan untuk menopang pembangunan perkebunan.

c. Peraturan pemerintah No. 14/1968 tentang Perusahaan Negara Perkebunan (PNP). Berdasarkan UU No. 9/1969 PNP mengalami perubahan bentuk hukum dari perusahaan negara menjadi Perseroan Terbatas, yang saat ini dikenal dengan PTPN. Semangat dan implementasinya didominasi powerpemerintah dan pasar.

Kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan lahan dan perkebunan sebagaimana di atas sebenarnya berawal dari perspektif pembangunan yang dilakukan di negara-negara berkembang, sebagaimana menurut Islam dan Henault, ada empat model pendekatan yang mempengaruhi proses pembangunan di negara berkembang yaitu: (i) model pertumbuhan GNP, (ii) model pemerataan dan pemenuhan kebutuhan dasar, (iii) model pembangunan sumberdaya manusia (People Centered Development), (iv) model pembangunan berkelanjutan (dalam Mustopadidjaya, 2003).

Tabel.2.3. Luas Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman

Jenis Tanaman Perkebunan Besar	Luas Tanaman Perkebunan Besar Menurut Jenis Tanaman (Ribu Hektar)		
	2018	2019	2020
Karet	435,9	406,8	375,9
Kelapa Sawit	8 507,4	8 559,8	8 854,5
Coklat	26,8	18,0	19,1
Kopi	42,5	24,1	21,9
Teh	52,0	59,8	61,5
Kina	-	-	61,5
Tebu	179,8	173,9	192,1
Tembakau	0,1	0,3	0,1

Luas areal untuk tanaman tahunan (Karet, Kelapa Sawit, Coklat, Kopi, Teh, Kina) adalah areal yang ditanami di akhir tahunLuas areal untuk tanaman musiman (Tebu, Tembakau)adalah luas panen kumulatif bulanan areaTahun 2020 adalah Angka Sementara

Source Url: https://www.bps.go.id/indicator/54/1847/1/luas-tanaman-perkebunan-besar-menurut-jenis-tanaman.html

Access Time: May 22, 2021, 6:00 am

3. Pembangunan Sektor Peternakan

Sub sektor peternakan memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Dilihat dari

kandungannya protein yang dihasilkan dari produk peternakan lebih tinggi,dibandingkan dengan produk dari pertanian tanaman pangan. Sebagai contoh, kandungan protein yang terdapat pada daging dapat mencapai 18,5%, kandungan tersebut jauh lebih tinggi dari tempe (11%) dan tahu (7,5%). Selain itu, Daryanto (2009) mengungkapkan bahwa kondisi geografis negara Indonesiacocok untuk sektor peternakan. Dan itu menjadikannegara Indonesiamempunyai kelebihan dibandingkan negara tetangga utamanya pada sub sektor peternakan.

Guna menunjang hal tersebutadabeberapaaspekyang mesti dilaksanakandengan baik, diantaranyaadalah aspek teknisuntuk peternakan sapi potong, aspek ekonomiyang ditimbulkan, aspek kelembagaansebagai wadah pengorganisasian pelaksanaan program, aspek kebijakanyang menjadi landasan pelaksanaan program, dan aspek lokasiyang dapat mendukung terlaksananya program dengan baik. Khususpada aspek kebijakan, pemerintah menetapkan beberapa langkahuntuk membantu pencapaian swasembada daging sapi, seperti 5kebijakan permodalan, kebijakan input produksi, kebijakan dalam hal budidaya dan kebijakan dalam hal harga dan perdagangan (RI, 2010). Jika kita telaah lagi kebijakan-kebijakan di atas,makamasih ada beberapa kebijakan yang terlupakan oleh pemerintah untukmembantu pencapaian swasembada daging sapi, seperti kebijakan pendidikan pembangunanpertanianyang lebih dikenal dengan penyuluhan pertaniansub sektor peternakan.

Penyuluhan pertanian dibutuhkanmempelancar pencapaian tujuan pembangunan pertanian(Mosher, 1966)karena melalui penyuluhan pertaniandapat dijembatani antara kebijakan dan program pemerintah dengan pelaku utama (petani/peternak), jembatan antara teori-teoridengan prakteknya di lapangan.Melalui program penyuluhan akanterjadiproses adopsi inovasi teknologidan kegiatan ituakan dapatmembantu pencapaian tujuan programpembangunan pertanian.

Melalui penyuluhan dapatpula dilakukan pemberdayaan petani/ peternak (Timmer, 1983; Mardikato, 2009). Penyuluhan pertanian juga dapat membantu peternak sapi potong dalam proses mengadopsi dan mendifusikan inovasi yang dibutuhkann. Penyuluhan pertanian dapat memperlancar proses komunikasi antara sesama peternak dan dengan pihak pemerintah. Melalui penyuluhan jugalah pesan inovasi dibidang peternakan dapat disampaikan, diterima dan diaplikasikan oleh target sasaran yaitu peternak(Sumardjo, 2012).

Pada saat ini pemerintah mensinergikankebijakan swasembada daging sapi dengan programpenyuluhanpeternakan. Diharapkan swasembada daging sapi di Indonesia dapat tercapai bahkan hasilnya dapat berkelanjutan.Makna dari swasembada daging sapi yang berkelanjutan disini adalahbagaimanausahayang dilakukan pemerintah dapatmencukupi kebutuhan daging sapi dalam negeri dapat dilakukan secara terus menurus atau berkesinambung. Pencapaian hasil tersebut tidakbisa dilepaskandari kualitas pelaku utama yang berkecimpung dalam usaha peternakan sapitersebut, maka dari sinilah penyuluhan sub sektor peternakan mengambil perannya untuk meningkatkan kualitas SDM peternaksupaya swasembada daging sapi dapatdiwujudkan secaraberkelanjutan.

Bukti keberhasilan penyuluhan membantu tercapainya tujuan pembangunan peternakandapat dilihat dari hasil penelitian Isbandi (2007) yang membuktikan bahwa penyuluhan sub sektor peternakan memiliki peran dalam pengembangan peternakan sapi potong rakyat. Melalui penyuluhan zooteknik sub telah mengubah perilaku tradisional dalam beternak sapi potong menjadi perilaku inovatifdan produktif, sehingga terjadipeningkatan jumlah populasi sapi potong. Hal ini dikarenakan penyuluhan adalah segala usaha yang dilakukan untuk merubah perilaku orang (petani/peternak dan

keluarganya) yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilannya melalui kegiatan pendidikan non-formal sampai orang tersebut mau dan mampu melakukan perubahan.Akibatnyaterjadipeningkatan produktivitas dalam usaha, pendapatan bertambah, dan menjadi lebih sejahtera (Isbandi, 2005).

Keberhasilan penyuluhan pertanian dalam membantu pencapaian tujuan pembangunan pertanian, tidak hanya ditemukan di Indonesia, di Negara Asia seperti Cina dan Jepang, mengakui bahwapenyuluhan pertanian dapat membantu pencapaian pembangunan pertanian. Hong, Pi-Feing (1994) dalam papernya yang berjudul "effective agricultural information flow through extension service in the republic of china (taiwan)", mengungkapkan bahwa melalui penyuluhan pertanian dapat mencapai arus komunikasi pertanian yang lebih efektif. Selanjutnya adalah paper dari Imai, Shinji (1994) dengan judul "Cooperative Agricultural Extension Service in Japan", menyimpulkan bahwa penyuluhan pertanian juga mampu membantu permasalahan keuangan pertaniandi negara mereka.

Penyuluhan pertanian sub sektor peternakan diciptaka nuntuk membantu pencapaian swasembada daging sapiNasional. Hal itu tidak akan terjadi jika pemerintah tidak membuat kebijakan kearah itu. Sebab kebijakan merupakan representasi dari keputusan yang diambil oleh individu, kelompok tertentu dan juga oleh pemerintah (Carl Friedrich dalam Agustino, 2008).Selian itu, kebijakan juga dipahami sebagai keputusan dasar untuk bertindak dan pedoman yang dapat mempengaruhi tindakan khalayak ramai sebagai sasaran penerima manfaatnya(Ervin, 2000).

Tabel.2.4. Produksi Daging Sapi Menurut Provinsi

Provinsi	Produksi Daging Sapi menurut Provinsi (Ton)		
	2018	2019	2020
ACEH	11 524,28	10 416,20	10 740,15
SUMATERA UTARA	15 240,33	14 153,16	14 569,88
SUMATERA BARAT	20 298,94	21 589,63	22 021,89
RIAU	9 792,53	8 379,10	8 611,02
JAMBI	4 540,06	5 026,46	5 094,19
SUMATERA SELATAN	11 261,05	11 455,31	11 615,04
BENGKULU	2 471,91	2 587,44	3 149,10
LAMPUNG	13 332,35	14 326,19	13 522,13
KEP. BANGKA BELITUNG	3 065,93	3 212,58	3 015,31
KEP. RIAU	1 164,33	1 384,08	1 400,91
DKI JAKARTA	15 867,13	19 194,53	19 194,53
JAWA BARAT	81 625,91	79 481,14	82 947,88
JAWA TENGAH	64 755,61	66 681,14	64 154,43
DI YOGYAKARTA	9 272,92	7 835,21	7 338,04
JAWA TIMUR	96 727,91	103 291,79	105 874,08
BANTEN	34 946,23	37 328,57	41 394,26
BALI	7 431,38	8 255,84	9 081,40
NUSA TENGGARA BARAT	9 551,84	10 202,83	10 961,61
NUSA TENGGARA TIMUR	11 761,40	10 851,00	13 116,45
KALIMANTAN BARAT	5 447,37	5 350,23	5 403,99
KALIMANTAN TENGAH	3 822,07	3 786,73	3 851,25
KALIMANTAN SELATAN	7 237,91	6 219,69	6 457,56
KALIMANTAN TIMUR	7 944,06	7 653,63	7 489,02
KALIMANTAN UTARA	639,02	583,07	590,81
SULAWESI UTARA	3 518,33	3 693,68	3 484,20
SULAWESI TENGAH	4 693,39	4 790,41	5 010,52
SULAWESI SELATAN	19 696,50	17 926,13	18 184,22
SULAWESI TENGGARA	6 474,83	4 437,75	4 405,09
GORONTALO	4 250,17	3 830,06	1 924,48
SULAWESI BARAT	2 266,15	2 115,86	2 174,75
MALUKU	2 122,73	2 201,00	2 193,05
MALUKU UTARA	939,89	959,56	860,04
PAPUA BARAT	1 914,77	1 941,93	1 969,68
PAPUA	2 372,50	3 660,38	3 826,80
INDONESIA	497 971,70	504 802,29	515 627,74

Source Url: https://www.bps.go.id/indicator/24/480/1/produksi-daging-sapi-menu

4. Pembangunan Sektor Kehutanan

Permasalahan yang sering dihadapi dalam perencanaan pembangunan adalah adanya ketimpangan dan ketidakmerataan dalam pembangunan. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan besaran sumbangan sektor unggulan. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengurangi ketimpangan dan ketidakmerataan di dalam pembangunan adalah dengan mengetahui berbagai peran sektoral di dalam pembangunan. Peran dari berbagai sektor inilah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi pendapatan bagi pembangunan suatu wilayah (Rustiadi dkk, 2009). Adanya integrasi ekonomi yang menyeluruh dan berkesinambungan diantara semua sektor produksi merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan ekonomi (Daryanto&Hafizrianda, 2010).

Kehutanan merupakan salah satu sektor penting dan mempunyai nilai strategis dalam pembangunan nasional mengingat hampir ± 67% luas daratan Indonesia berupa hutan. Sebagai elemen kekayaan alam yang dapat diperbaharui (renewable), maka hutan dapat dijadikan modal bagi pertumbuhan ekonomi dan penopang sistem kehidupan. Oleh karenanya, pemerintah menjadikan pembangunan kehutanan sebagai bagian integral dari pelaksanaan pembangunan nasional.

Kebijakan pemerintah untuk penyuluhan sub sektor peternakan dapat juga menjadi instrumen untuk mengatasi dampak kebijakan pembangunan pertanian yang dikeluarkan oleh pemerintah Thailand, India dan Jepang terhadap pembangunan pertanian (termasuk juga pada sub sektor peternakan) yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dabukke & Iqbal (2014) untuk mengatasi kebijakan yang dikeluarkan oleh ketiga negara tersebut, pemerintah Indonesia mesti melakukan peningkatan kualitas sumber daya pertanian nasional agar nantinya dapat bersaing dengan ketiga negara tersebut. Peningkatan kualitas SDM pertanian dapat dilaksanakan

melaluiberbagai program penyuluhan pertanian termasuk juga program penyuluhan untuk sub sektor peternakan.

Tabel.2.5. Produksi kayu Bulat Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)

Jenis Kayu Bulat	Produksi Kayu Bulat Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Menurut Jenis Kayu (M3)		
	2017	2018	2019
Agathis	3 264	11 078	12 915
Bakau	19 969	1 178	3 976
Bangkirai	113 711	294 456	320 859
Benuang	11 218	33 073	48 660
Damar	-	24	148
Duabanga	705	3 236	2 523
Indah	97 822	4 390	2 763
Jelutung	650	1 875	1 912
Kapur	56 745	166 650	155 637
Kruing	328 421	587 838	591 721
Meranti	3 402 315	2 591 162	2 678 459
Mersawa	9 036	78 339	93 656
Nyatoh	23 885	70 513	55 859
Palapi	8 083	21 012	19 058
Ramin	-	-	-
Resak	10 242	18 082	30 776
Rimba Campuran	733 999	2 214 444	381 402
Lainnya	653 749	346 160	1 774 487
Indonesia	5 473 814	6 443 510	6 174 811

-Sumber : Publikasi Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan 2004-2019, BPS-Data tah

C. Ekonomi Perdesaan

Rumah tangga di perdesaan relatif heterogen dalam aspek aktivitas yang dilaku-kan serta dalam kepentingan relatif dari aktivitas tersebut dalam memberikan pendapatan rumah tangga. World Bank (2007)

menunjuk-kan bahwa lebih dari 60 persen rumah tangga perdesaan di Indonesia berpartisipasi di perta-nian, namun pangsa pendapatan rumah tangga perdesaan yang berasal dari pertanian kurang dari 30 persen.

Sumber pendapatan rumah tangga perdesaan berasal dari pertanian, tena-ga kerja upahan di desa, ataupun dari migrasi. Sumber pendapatan migrasi adalah dari ang-gota rumah tangga yang bekerja di luar perdesaan atau bahkan bekerja di luar negeri. Jum-lah rumah tangga perdesaan di Indonesia yang pangsa terbesar pendapatannya bersumber dari pertanian hanyalah 16 persen. Pertanian memiliki peran penting da-lam transformasi ekonomi perdesaan. Pertanian mempengaruhi aktivitas nonpertanian di perdesaan melalui tiga cara, yaitu produksi, konsumsi, dan keterkaitan pasar tenaga kerja.

Pada sisi produksi, pertumbuhan sektor perta-nian memerlukan input berupa pupuk, pesti-sida, benih, ataupun alsintan yang diproduksi dan didistribusikan oleh perusahaan nonperta-nian. Sektor pertanian yang tumbuh mendo-rong semakin berkembangnya aktivitas-aktivi-tas di bagian hilirnya, yaitu dengan menyedia-kan bahan baku untuk diproses ataupun didis-tribusikan. Pada sisi konsumsi, meningkatnya pendapatan menyebabkan konsumsi rumah tangga tani meningkat, yang juga berarti per-mintaan barang ataupun jasa yang dihasilkan sektor nonpertanian meningkat.

Sektor pertanian mempengaruhi sisi penawaran dari ekonomi sektor nonpertanian di perdesaan. Upah di sektor pertanian menjadi patokan biaya oportunitas dari tenaga kerja yang disalurkan ke aktivitas-aktivitas nonpertanian. Permintaan tenaga kerja di sektor perta-nian yang bersifat musiman berpengaruh terhadap penawaran tenaga kerja untuk aktivitas nonpertanian. Sebaliknya, peningkatan kesem-patan kerja di sektor nonpertanian belum tentu akan menyebabkan meningkatnya tingkat upah.

Peningkatan kesempatan kerja di sektor nonpertanian akan menyebabkan kenaikan upah apabila ekonomi sektor nonpertanian tumbuh akibat meningkatnya permintaan dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja. Jenis dan jumlah produk yang dihasil-kan sektor pertanian di suatu daerah juga mempengaruhi aktivitas-aktivitas nonpertanian yang akan berkembang (pemasaran, pengo-lahan, ataupun transportasi).

Studi lintas negara yang dilakukan Hazell dan Haggblade pada tahun 1993 menunjukkan hubungan yang positif antara pendapatan pertanian, yang diukur dengan pendapatan pertanian per kapita penduduk perdesaan, dan pangsa tenaga kerja nonpertanian di perdesaan. Untuk kasus Indonesia, ditemukan peningkatan yang tajam dari pangsa tenaga kerja nonpertanian saat pendapatan pertanian per kapita meningkat. Pertumbuhan sektor pertanian menja-dikan ekonomi perdesaan lebih terdiversifikasi.

Sektor nonpertanian di perdesaan menjadi sumber pertumbuhan dan kesempatan kerja yang penting. Sektor nonpertanian yang semu-la bersifat usaha sampingan dan berorientasi subsisten, semakin menjadi penggerak per-tumbuhan ekonomi dan menjadi sumber pen-dapatan yang penting bagi rumah tangga di perdesaan.Indikator lain yang dapat dilihat dari semakin pentingnya aktivitas nonpertanian di perdesaan adalah perkembangan pangsa tenaga kerjanya. Sektor nonpertanian memiliki pangsa tenaga kerja yang semakin meningkat.

Di daerah perkotaan, sektor nonpertanian menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja. Sedangkan di perdesaan kontribusi tenaga kerja sektor nonpertanian mencapai di atas 36 persen. Komposisi atau sebaran tenaga kerja sektor nonpertanian di daerah perdesaan terutama didominasi aktivitas di bidang perda-gangan, manufaktur, dan jasa. Pangsa tenaga kerja sektor nonpertanian di daerah perdesaan akan meningkat jika di dalamnya dimasukkan daerah-daerah kota

yang masih bersifat desa (rural towns) seperti yang dikemukakan oleh Hazell dan Haggblade (1991). Rural towns adalah daerah-daerah yang struktur ketenagaker-jaannya masih mencerminkan keterkaitan yang kuat dengan pertanian. Sebaliknya urban towns adalah daerah yang memiliki basis eko-nomi yang independen terhadap pertanian.

Di daerah perdesaan, jasa dan industri rumah tangga menjadi sumber penampung tenaga kerja yang penting. Sedangkan di dae-rah rural towns lebih didominasi oleh perda-gangan dan jasa. Tenaga kerja nonpertanian di daerah perdesaan dan rural towns juga cenderung bersifat informal, jika dibandingkan dengan di urban towns.Kesempatan kerja di sektor nonpertanian di perdesaan terutama penting bagi penduduk perdesaan yang miskin. Buruh tani ataupun petani gurem umumnya mengandalkan pendapatannya dari aktivitas nonpertanian.

Pangsa pendapatan dari nonpertanian memiliki korelasi negatif dengan skala usahatani yang diusahakan. Aktivitas yang bersumber dari investasi usaha yang membutuhkan modal rendah dan tidak memerlukan ketrampilan tinggi dari tenaga kerjanya merupakan sumber pendapatan utama dari rumah tangga miskin perdesaan jika dibandingkan rumah tangga yang kaya. Sebaliknya aktivitas yang bersum-ber dari investasi yang memerlukan modal be-sar, umumnya relatif sulit diakses oleh pendu-duk miskin perdesaan. Perempuan memiliki pangsa yang cu-kup besar dalam partisipasi tenaga kerja di sektor pertanian dan juga di sektor nonpertanian di perdesaan. Lebih dari 35 persen tenaga kerja di sektor pertanian adalah perempuan.

Sedangkan pangsa perempuan yang bekerja di sektor pertanian lebih dari 65 persen dari total tenaga kerja perempuan. Di sektor nonpertani-an di perdesaan, perempuan lebih terkonsen-trasi bekerja di bidang perdagangan, industri pengolahan, dan jasa. Pangsa perempuan yang bekerja di bidang lain, seperti transpor-

tasi, konstruksi, dan keuangan relatif kecil. Sebaliknya, laki-laki relatif tersebar bidang aktivitasnya di sektor nonpertanian.

D. Strategi Pertanian Ke Depan

Secara umum proses pembangunan akan menuju pada transformasi perekonomian yang dominan pertanian menuju pada dominasi sektor nonpertanian. Pertumbuhan sektor per-tanian pada akhirnya dibatasi oleh daya du-kung lahan dan pasar produk pertanian. Turunnya peranan pertanian secara relatif merupakan sesuatu yang tak terhindarkan karena

a) meningkatnya spesialisasi produksi yang mengakibatkan transfer pekerjaan nonpertanian dari rumah tangga pertanian ke daerah urban,
b) elastisitas pendapatan yang relatif rendah dari permintaan akan produk-produk pertanian dibandingkan produk nonpertanian pada kondisi pendapatan yang mening-kat, dan
c) biaya transport yang tinggi untuk berbagai produk pertanian menghalangi adanya spesialisasi yang sangat lanjut pada produksi pertanian.

Kondisi demikian menggam-barkan sulitnya pencapaian standard hidup yang tinggi tanpa pergeseran yang berarti menuju aktivitas-aktivitas nonpertanian. Salah satu strategi menuju industrialisasi adalah mengutamakan pembangunan pertanian dan perdesaan yang didukung oleh industri penyokong secara selektif. Industrialisasi yang dilakukan dengan cepat dan dalam spektrum yang luas akan mengalami hambatan secara internal dalam bentuk kebutuhan akan wage goods dan kapasitas pembentukan mo-dal yang hanya dapat dilakukan oleh sektor pertanian dan perdesaan

yang telah berkembang.

Ringkasnya, jika Indonesia mengingin-kan industrialisasi maka harus bersedia terlebih dahulu membangun pertaniannya. Dalam mencapai tujuan di atas, terda-pat tiga alternatif strategi pembangunan per-tanian yang dapat dipilih. Strategi pembangun-an pertanian yang pertama adalah membiarkan kekuatan-kekuatan ekonomi pasar menentukan arah pembangunan.

Peranan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah menciptakan pasar yang dapat berfungsi dengan efisien. Strategi ini dilandaskan pada asumsi bahwa dalam jangka panjang harga produk pertanian primer cenderung menurun akibat kemajuan teknologi.

Peranan sektor pertanian akan menurun secara proporsional pada sisi output dan menurun secara absolut dalam penyerapan tenaga kerja. Strategi ini selaras dengan pandangan bahwa ekonomi yang terbuka akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika diban-dingkan dengan perekonomian yang tertutup. Strategi kedua adalah pembangunan pertanian dengan menekankan perlunya keterlibatan pemerintah yang lebih besar dalam pembangunan nasional. Keterlibatan pemerin-tah diperlukan sejak dari perancangan strategis sampai pada implementasinya.

Strategi pembangunan pertanian yang kedua ini mencer-minkan bahwa tujuan pembangunan pertanian dapat dicapai melalui interaksi berbagai kekuatan atau strategi berupa percepatan pertum-buhan di sektor pertanian, produksi wage goods, strategi strukturisasi permintaan yang mengarah pada barang atau jasa yang bersifat intensif tenaga kerja, meningkatkan kesem-patan kerja, dan meningkatkan permintaan efektif penduduk berpendapatan rendah. Stra-tegi yang saling berkaitan tersebut harus di-arahkan oleh perencanaan pemerintah.

Guna memperlancar penerapan strategi di atas dan lebih menjamin keberhasilannya diperlukan elemen-elemen berikut:

a) investasi yang besar di pembangunan sumberdaya manusia, terutama di perdesaan,
b) penciptaan struktur organisasi perdesaan yang mampu memberikan layanan pada petani sekaligus sebagai sarana penyampaian aspirasi petani, dan
c) investasi yang besar pada perubahan teknologi yang sesuai bagi petani skala kecil, sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan masyarakat desa secara simultan.

Strategi pembangunan pertanian yang ketiga berada di antara strategi pertama dan strategi kedua. Intervensi kebijakan pemerintah mungkin diperlukan untuk mempengaruhi hasil akhir, namun intervensi tersebut meman-faatkan pasar dan sektor private sebagai kendaraannya. Strategi pembangunan pertani-an ketiga ini disusun dengan kesadaran bahwa memang ada "kegagalan pasar" di samping juga ada "kegagalan pemerintah" dalam implementasi aktivitas-aktivitas ekonomi.

Strategi pembangunan pertanian yang ketiga ini me-merlukan pengetahuan yang jelas tentang interaksi antara sektor publik dan sektor private. Faktor-faktor yang dibutuhkan "*to get agriculture moving*" antara lain adalah kombinasi antara teknologi yang tepat, kelembagaan perdesaan yang fleksibel, dan orientasi pasar yang memungkinkan petani memperoleh imbalan yang memadai dari upaya yang telah dikeluarkannya

E. Pertanyaan

1. Jelaskan tentang sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi
2. Jelaskan apa saja yang termasuk dalam peranan sektor pertanian
3. Jelaskan ekonomi perdesaan.
4. Bagaimana strategi pertanian ke depan.
5. Apa saja agenda kedepan dalam sektor pertanian.

F. Daftar Pustaka

Hazell, P. and Haggblade, S. 1991. Rural-Urban Growth Linkages in India. Indian Journal of Agricultural Economics. 46 (4): 515-529.

Hazell, P. and Haggblade, S. 1993. Farm-Nonfarm Growth Linkages and the Welfare of the Poor. In Lipton, M. and van der Gaag, J. (edt). Including the Poor. The World Bank. Washington, DC.

Johnston, B.F. and Mellor, J.W. 1961. The Role of Agriculture in Economic Develop-ment. American Economic Review. 51 (4): 566-593.

Kuznets, S. 1964. Economic Growth and Contribution of Agriculture. In Eicher, C.K. and Witt, L.W. (eds). Agriculture in Economic Development. McGraw Hill. New York.

Lewis, W.A. 1954. Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. Man-chester School of Economic and Social Studies. 22: 139-91.

Martin,W. and Warr, P.G. 1992. The Declining Economic Importance of Agriculture: A Supply Side Analysis of Thailand. Working Paper in Trade and Deve-lopment No. 92/1. Research School of Pacific Studies, Department of Econo-mics and National Centre for Develop-ment Studies. The Australian National University. Canberra.

Mellor, J.W. 1973. Accelerated Growth in Agricultural Production and the Inter-sectoral Transfer of Resources. Jurnal Economic Development and Cultural Change 22.

Otsuka, K. and Reardon, T. 1998. Lessons from Rural Industrialization in East Asia: Are They Applicable to Africa? Paper presented at an IFRI/World Bank-sponsored Workshop on Strate-gies for Stimulating Growth of the Rural Nonfarm Economy in Developing Countries. Warrenton-VA.USA. May, 1998.

Timmer, C.P. 1988. The Agricultural Trans-formation. In Chenery, H.B. and Srinivasan, T.N. (eds). Handbook of Development Economics. Volume 1. North Holland. Amsterdam.

Tomich, T.P., Kilby,P. and Johnston, B.F. 1995. Transforming Agrarian Economies: Opportunities Seized, Opportunities Missed. Cornell University Press. Ithaca, NY.

World Bank. 2008. World Development Report 2008:Agriculture for Development. Washington, DC.



BAB - III

KARAKTERISTIK EKONOMI PERTANIAN DI INDONESIA

Tujuan Intruksional

1. Menjelaskan ciri-ciri pertanian di Indonesia
2. Menjelaskan permasalahan utama pertanian di Indonesia
3. Menjelasakan isu-isu aktual ekonomi pertanian di Indonesia.

A. Ciri-ciri pertanian di Indonesia

Pertanian rakyat merupakan suatu sistem pertanian yang dikelola oleh rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan pangan dalam negeri sebagai pengertian ekonomi mikro dan contohnya . Sebagai negara agraris yang terkenal dengan tanah suburnya, sektor pertanian merupakam sektor yang paling banyak menerap tenaga kerja Indonesia. Hampir 40 persen dari seluruh penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian sebagai petani. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian harusnya menjadi pondasi paling kuat dalam struktur perekonomian negara kita sebagai bentuk kebijakan ekonomi mikro .

Sementara itu, jika dibandingkan dengan negara lain seperti Jepang dan Korea pastinya kita masih kalah jauh. Sebab hingga saat ini, produk pertanian yang menguasai pasar dunia ialah yang berasal dari kedua negara tersebut. Tentunya untuk menyaingi kedua negara tersebut selali membutuhkan teknologi yang mumpuni di bidang pertanian

juga harus diimbangi dengan skill para petani kita. Berbicara mengenai petani Indonesia maka akan selalu bersinggungan dengan tingkat kesejahteraan mereka. Simak jyga kriteria usaha kecil, menengah dan besar .

Sebab pada faktanya banyak petani yang ternyata hidup di bawah garis kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih dianggap lemah sebagai upaya untuk bisa meningkatkan taraf hidup petani. Apalagi dengan sistem pertanian rakyat yang selama ini diandalkan. Disebut pertanian rakyat sebab memang rakyatlah yang terlibat dalam sistem ini. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai hal ini, maka ciri-ciri pertanian rakyat di Indonesia sebagai berikut :

1. Berhubungan dengan Budidaya Tanaman Pangan

   Berbicara mengenai pertanian maka cakupannya akan sangat dekat dengan dunia budidaya. Mulai tahapan dari pembibitan, penanaman, perawatan, panen hingga pasca panen. Terdapat siklus panjang yang harus melalui proses hingga tanaman dapat menghasilkan buah atau hasil panen. Rata-rata dalam pertanian rakyat komoditas yang dibudidayakan ialah tanaman pangan, seperti padi, jagung, sayuran dan buah semusim. Tentunya dalam hal ini petani melakukan proses budidaya sesuai dengan tahapan tahapan tersebut.

   Tanaman pangan dipilih sebab secara pasar, kebutuhan akan jenis tanaman ini tidak dipengaruhi oleh harga. Selain itu, jenis tanaman pangan akan selalu di butubkan di pasaran. Para petani yang memang berada di bawah garis kemiskinan juga merasa lebih menguntungkan membudidayakan tanaman jenis ini. Sebab jika tidak terjualpun akan masih dapat di konsumsi sendiri. Sehingga mereka tidak akan terlalu merugi.

2. Dimulai Dengan Modal yang Relatif Tidak Besar

Pertanian rakyat juga memiliki ciri-ciri lain yakni modal yang dipakai untuk kegiatan tersebut relatif kecil. Sebab tentunya dengan tingak perekonomian yang rendah maka para petani cenderung memiliki modal yang kecil. Setelah panen mereka hanya akan menyisakan modal untuk membeli benih tanaman. Untuk pengolahan tanah akan mereka lakukan sendiri. Sedangkan untuk perawatan berupa pemupukan mereka akan mengamdalkan berhutang pada tengkulak. Sehingga saat panen tiba maka tentu saja hasil panen akan di beli murah. Kondisi ini berlangsung terus menerus dan akan selalu seperti ini. Sebab memang kendala utamanya ialah terletak di modal awal. Simak juga contoh teori permintaan , dan prinsip ekonomi manajerial .

3. Masih Menggunakan Sistem yang Sederhana

Berhubungan dengan poin 2, modal yang terbatas akan membuat petani melakukan budidaya yang terbatas juga. Pengolahan laham dilakukam scara manual, sehingga dalam waktu berhari-hari pun luas lahan yang dioleh tidak akan sebanding jika memggunakan mesin tentunya. Beluk lagi penanaman dan perawatan yang manual yang pastinya akan memakan waktu yang lama. Pastinya ini aka membuat hasil panen menjadi terpengaruh. Sebab sebuah sumber menyataka bahwa penggunaa alat dan mesin pertanian modern dapat meningkatnkan hasil.panen yang signifikan. Tentunya hal ini tidak akan bisa dicapai dalam pertanian rakyat yang semuanya menggunakan metode dan peralatan yang sederhana.

4. Tidak Memiliki Manajemen

Pertanian rakyat tentunya tidak memiliki manajemen sebagaimana

pertanian modern yang dikelola dalam skala besar. Sehingga dalam pertanian rakyat tidak akan diketahui apakah budidaya menguntungkan atau sebaliknya merugikan. Sebab tidak ada catatan administrasi sama sekali. Selain itu, tujuan budidayapun dilakuka semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan baru sisanya di jual. Sebaliknya dalam pertanian modern memang di kelola dengan tuuan untuk memdapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Inilah yang kemudian membuat pertanian rakyat cenderung sulit dikatakan sebagai sebuah usaha sebagai faktor non ekonomi yang menghambat pembangunan , melainkan hanya sebuah mata pencaharian dalam rangka memenuhi kebutuhan.

5. Skala Budidaya Merupakan Skala Kecil

   Ciri lain dari pertanian rakyat adalah bahwa skala budidaya yang dilakukan merupakan skala budidaya kecil. Dimana hasil panen yang diperolehpun relatif kecil. Sehingga hanya bisa memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Hal ini tentunya disebabkan dan berhubungan langsung dengan ciri lain pada poin 2 dan 3. Dimana modal yang di keluarkan sedikit sehingga alat yang digunakan juga relatif sederhana maka, skala budidayapun relatif kecil.

6. Para Pekerja Berasal Dari Kalangan Rakyat Kecil

   Pertanian rakyat merupakan pertanian dimana para pekerjanya berasal dari rakyat kecil. Oleh sebab itu, mereka bergantung kepada sektor ini untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Banyak rakyat kecil yang memilih untuk menjadi pekerja sebab untuk menjadi seorang petani tidak membituhkan skill yang mumpuni serta tidak ada batasan pendidikan. Yang terpenting adalah fisik yang kuat dan mampu melakukan pekerjaan kasar. Inilah yang kemudian, membuat banyak rakyat kecil terjun dan menekuni pekerjaan ini.

7. Produk Hanya Di jual di Pasar Tradisional

   Produk hasil panen yang dihasilkan dari pertanian rakyat ini hanya di jual di pasar tradisional. Sebab, rata-rata produk memiliki kualitas yang kurang baik. Sehingga tentunya tidak dapat bersaing dengan produk lain yang berasal dari pertanian modern lainnya. Kualitas yang kurang baik, tentunya akan berpengaruh kepada harga jual, sehingga produkpun akan dibeli dengan harga murah. Kualitas produk hanya mampu menembus pasar tradisional saja. Oleh karena itu, tentunya diperlukan sebuah usaha untuk mengubah sistem pertanian rakyat agar dapat berefek pada meningkatnya kesejahteraan petani.

Dalam hal ini, peran serta pemerintah dan organisasi perhimpunan tani sangatlah diperlukan. Sebab tanpa ada campur tangan keduanya maka pertanian rakyat hanya akan jalan ditempat saja. Ketika negara lain telah jauh lebih maju, maka apa yang bisa di capai oleh negara kita harusnya bisa lebih tinggi. Sebab secara lokasi dan sumber daya alam Indonesia jauh lebih unggul. Kita hanya tertinggal dalam kualitas dan skill para petani yang tentunya membutuhkan waktu yang relatif tidak sebentar untuk mengejar ketertinggalan ini.

Bahkan beberapa tahun lalu indonesia pernah swasembada pangan. Selain karena sebagian masyarakatnya bekerja sebagai petani Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Berikut akan saya sebutkan ciri ciri pertanian di indonesia.

Ciri ciri pertanian di indonesia :

1. Pertanian tropika

Sebagian besar daerah di Indonesia berada di daerah katulistiwa yang berarti merupakan daerah tropika. Dengan demikian jenis

tanaman, hewan, perikanan, dan hutan sangat dipengaruhi oleh iklim tropis (pertanian tropika). Disamping itu ada pengaruh lain yang menentukan corak pertanian di indonesia yaitu : bentuk negara yang berkepulauan dan topografinya yang bergunung gunung.

Letaknya yang berada diantara benua Asia dan Australia serta antara lautan Hindia dan Pasifik, memberikan pengaruh pada suhu udara, arah angin yang berakibat adanya perbedaan iklim di Indonesia.

2. Pertanian dataran tinggi dan rendah

Indonesia merupakan daerah vulcano (memiliki banyak gunung), sehingga memungkinkan memiliki daerah yang memiliki ktinggian dan dataran rendah. Dataran tinggi mempunyai iklim dingin, sehingga bisa ditanami tanaman beriklim subtropis.

3. Pertanian iklim basah (Indonsia barat) dan Pertanian iklim kering (Indonesia timur)

Indonesia bagian barat (Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan sebagaian Sulawesi) yang mempunyai iklim basah yang berarti memiliki curah hujan yang cukup tinggi (banyak hujan). Indonesia bagian timur (NTB, NTT, Maluku,dll) mempunyai iklim kering yang berarti curah hujannya rendah.

4. Adanya hutan tropika dan pandang rumput

Karena iklim basah dan berada di daerah tropika maka sering terjadi hujan dan membentuk hutan tropika, sedangkan di daerah kering lebih banyak terbentuk padang rumput.

5. Perikanan darat dan laut

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau, sehingga daerahnya terdiri dari daratan dan laut. Keadaan ini memungkinkan terdapatnya perikanan darat (contohnya seperti kolam) dan laut.

6. Pertanian di Jawa dan luar Jawa

Di daerah Jawa dan diluar Jawa mempunyai spesifikasi yang berbeda. Didaerah Jawa memiliki ciri tanahnya yang subur serta penduduk yang padat, hal ini dikarenakan Jawa merupakan central ekonomi di Indonesia.

Didaerah luar Jawa umumnya memiliki tanah yang kurang subur namun ada beberapa tanaman yang sangat cocok di tanam di daeah tersebut, selain itu penduduk di luar Jawa juga masih jarang, hal ini di karenakan pembangunan yang tidak merata.

Mempengaruhi corak pertanian. Pertanian di Jawa umunya merupakan tanaman bahan pangan, bersekala kecil, sedangkan pertanian diluar Jawa umumnya merupakan perkebunan, khutanan yang bersekala besar.

7. Pertanian rawa, pertanian darat (kering), pertanian beririgasi (basah)

Pertanian rawa yaitu pertanian yang lahannya tergenang sepanjang masa, sehingga biasanya tanah akan bersifat asam, dan tidak semua tanaman cocok di tanam di wilayah ini. Pertanian kering yaitu pertanian yang lahannya tidak mendpat aliran irigasi. Pertanian basah yaitu pertanian yang lahannya mendapatkan aliran irigasi,

8. Pertanian /sawah beririgasi, sawah tadah hujan, sawah lebak, dan sawah pasang surut

Penggolongan ini adalah penggolongan lahan yang ditanami padi. Sawah beririgasi airnya bersumber dari bendungan sungai, dam/ waduk, mata air dll. Berdasarkan tekniknya, irigasi dibagi menjadi beberapa teknik yaitu irigasi teknis, setengah teknis dan irigasi sederhana. Lahan / sawah tadah hujan sebenarnya memiliki saluran irigasi, namun saluran irigasi tersebut sumber airnya berasal dari air hujan. Sawah lebak, sawah jenis ini mendapatkan air terus menerus sepanjang masa.

Sawah pasang surut, sawah jenis ini mendapatkan air dari air sungai yang pasang karena air laut yang sedang pasang, pada sawah jenis ini juga sering terdapat saluran irigasi.

B. Permasalahan utama pertanian di Indonesia

Permasalahan pembangunan pertanian, perkebunan dan kehutanan masihdidominasi oleh beberapa permasalahan klasik yang membutuhkan langkah-langkah terstruktur dalam jangka panjang. Namun, ada beberapa pendekatan yang telah dilakukan dengan mencantumkan kendala-kendala tersebut dalam regulasi yang jelas. Dalam hal ini, lahan pangan berkelanjutan yang terus menghantui pembangunan telah ditetapkan sebagai komitmen bersama pengelolaannya, adapun permasalahan utama pertanian sebagai berikut :

1. Keterbatasan dan Penurunan Kapasitas Sumberdaya Pertanian

Pembangunan pertanian dihadapkan kepada permasalahan permintaan produk pertanian terutama pangan yang semakin

meningkat sejalan dengan meningkatnya pertambahan penduduk, sementara kapasitas sumberdaya alam pertanian terutama lahan dan air terbatas dan bahkan semakin menurun. Luas baku lahan pertanian semakin menurun karena pembukaan lahan pertanian baru sangat lambat sementara konversi lahan pertanian terus meningkat.

Masalah konversi lahan cukup berat terutama di Jawa. Setiap tahun sekitar 40.000 hektar lahan sawah produktif di Jawa dikonversi untuk kegiatan non-pertanian. Sementara ini masalah tersebut diatasi dengan meningkatkan intensitas tanam khususnya di Jawa, sedangkan untuk luar Jawa diatasi dengan pencetakan sawah baru. Namun selama 10 tahun terakhir, luas panen padi stagnan dibawah 12 juta hektar. Sumber air untuk pertanian semakin langka akibat kerusakan alam, terutamadi daerah aliran sungai (DAS).

Sementara itu, kompetisi pemanfaatan air juga semakin ketat dengan meningkatnya penggunaan air untuk rumah tangga dan industri. Besarnya tekanan penambahan penduduk terhadap lahan berakibat pemilikan dan penggarapan semakin terfragmentasi, sehingga jumlah petani gurem meningkat dengan rataan pemilikan lahan yang semakin kecil.

2. Sistem Alih Teknologi Masih Lemah dan Kurang Tepat Sasaran

Sistem adopsi atau alih teknlogi dinilai masih lemah karena lambatnya diseminasi teknologi baru (*invention*) dan pengembangan teknologi yang sudah ada *(innovation*) di tingkat petani. Rendahnya diseminasi teknologi disebabkan oleh beberapa hal. Sebelum diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, sistem penyampaian hasil teknologi dilakukan oleh penyuluh melalui proses aplikasi teknologi di area percontohan.

Pada era desentralisasi, kegiatan penyuluhan menjadi kewenangan pemerintah daerah dan permasalahan pada sistem penyampaian teknologi menjadi lebih kompleks akibat kurangnya perhatian pemerintah daerah pada fungsi penyuluhan pertanian. Institusi penyuluhan dianggap rendah kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hubungan keterkaitan antara peneliti, penyuluh, dan petani dinilai masih lemah. Oleh karena itu perlu adanya penataan kembali fokus dan prioritas penelitian serta sistem diseminasi yang mampu menjawab permasalahan petani disertai dengan revitalisasi penyuluhan pertanian, pendampingan, pendidikan dan pelatihan bagi petani.

3. Kualitas, Mentalitas, dan Keterampilan Sumberdaya Petani Rendah

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian. Tingkat pendidikan dan keterampilan rendah. Selama 10 tahun terakhir kemajuan pendidikan berjalan lambat. Tahun 1992, 50 persen tenaga kerjadi sektor pertanian tidak tamat SD, 39 persen tamat SD, sedangkan yang tamat SLTP hanya 8 persen (BPS, 1993). Tahun 2002, yang tidak tamat SD menjadi 35 persen tamat SD 46 persen dan tamat SLTP 13 persen (BPS, 2003).

Rendahnya mentalitas petani antara lain dicirikan oleh usaha pertanian yang berorientasi jangka pendek, mengejar keuntungan sesaat, serta belum memiliki wawasan bisnis luas. Selain itu banyak petani menjadi sangat tergantung pada bantuan/pemberian pemerintah. Keterampilan petani yang rendah terkait dengan rendahnya pendidikan dan kurang dikembangkannya kearifan lokal (*indigenous knowledge*).

Selama ini masalah di atas diatasi melalui peningkatkan

kemampuan SDM petani dan aparat melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Untuk mendukung kegiatan tersebut sarana yang digunakan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di Daerah seperti Balai Diklat, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian, dan Sekolah Pembangunan Pertanian. Ketertinggalan petani dalam hal pendidikan diatasi dengan pendekatan penyetaraan pendidikan yang selanjutnya dikaitkan dengan pelatihan keterampilan berusahatani. Disamping itu, berbagai upaya penguatan kapasitas petani juga perlu dilakukan terutama dalam hal pengembangan sikap kewirausahaan, kemampuan dalam pemasaran dan manajemen usaha.

4. Kelembagaan Petani dan Posisi Tawar Petani Rendah

Saat ini, keberadaan kelembagaan petani sangat lemah. Kelompok tani yang banyak dibentuk selama periode 1980-an dalam mengejar swa-sembada beras sudah banyak yang tidak berfungsi, mungkin hanya tinggal nama kelompok. Intensitas dan kualitas pembinaan terhadap kelompok pasca otonomi daerah jauh berkurang karena sistem penyuluhan yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Selama ini pengembangan kelembagaan petani umumnya berorientasi keproyekan. Kelompok tani hanya aktif pada saat proyek masih berjalan. Setelah masa proyek berakhir, umumnya kelompok tani yang dibentuk menjadi tidak aktif. Pembentukan kelompok tani seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Kondisi kelompok tani saat ini juga dinilai sangat buruk karena berbagai instansi pemerintah masing-masing membentuk kelompok tani/kelembagaan tani untuk pelaksanaan kegiatan proyek mereka.

Hal ini menyebabkan timbulnya banyak kelompok tani yang tumpang tindih. Berkaitan dengan hal ini, revitalisasi sistem penyuluhan perlu segera dilaksanakan agar fungsi PPL sebagai

pembina kelompok tani dapat kembali berjalan dengan baik. Disamping itu, kelembagaan petani yang ada saat ini perlu ditata dengan baik. Koordinasi ditingkat pusat dalam pembinaan kelompok tani perlu ditingkatkan agar kegiatan yang melibatkan petani tidak tumpang tindih. Pengembangan kelompok tani agar dilakukan dengan pendekatan pembangunan masyarakat *(community development).*

5. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga Terkait Dan Birokrasi

Kinerja pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh keterpaduan diantara subsistem pendukungnya, yaitu mulai dari subsistem hulu (industri agro-input, agro-kimia, agro-otomotif), subsistem budidaya usahatani (onfarm), subsistem hilir (pengolahan dan pemasaran) dan subsistem pendukung (keuangan, pendidikan, dan transportasi). Keterkaitan antar subsistem sangat erat namun penanganannya terkait dengan kebijakan berbagai sektor.

Sementara itu, Departemen Pertanianhanya memiliki kewenangan dalam aspek budidaya/usahatani. Berbagai kebijakan yang terkait dengan produk pertanian sering tidak harmonis dari hulu hingga ke hilir, seperti kasus penanganan impor produk pertanian (paha ayam, daging illegal, benih kapas transgenik). Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya kesamaan persepsi dan komitmen tentang peranan sektor pertanian dalam pembangunan nasional. Apabila disepakati bahwa sektor pertanian merupakan penggerak utama ekonomi nasioanal maka koordinasi antar instansi menjadi hal yang sangat penting dalam menyusun kebijakan maupun implementasinya. Untuk itu perlu perbaikan menejemen pembangunan pertanian dengan mengacu pada UU dan Peraturan Pemerintah.

6. Kebijakan Makro Ekonomi Yang Belum Berpihak Kepada Petani

Salah satu faktor penting yang menentukan kelanjutan dan kemampuan dayasaing usaha pertanian adalah adanya kebijakan makro yang kondusif. Saat ini kebijakan makro ekonomi baik fiskal, moneter, perdagangan, maupun prioritas dalam pengembangan ekonomi nasional dinilai belum kondusif bagi keberlanjutan dan kemampuan dayasaing usaha pertanian.

Kebijakan pemerintah yang belum memihak sektor petanian antara lain:

(1) penerapan pajak ekspor komoditas pertanian yang bertujuan untuk mendorong industri pengolahan produk pertanian dalam negeri;

(2) kredit perbankan yang disediakan pemerintah, porsi terbesar diserap oleh pengusaha konglomerat, sisanya adalah untuk koperasi, usaha kecil menengah termasuk petani;

(3) alokasi dana APBD untuk pembangunan sektorpertanian kurang memadai;

(4) beberapa daerah menarik biaya retribusi yang tinggi termasuk pada komoditas pertanian sehingga mengurangi dayasaing dan menjadi penghambat dalam investasi di sektor pertanian;

(5) pembangunan sarana dan prasarana lebih besar di perkotaan dibanding dengan perdesaan; dan

(6) liberalisasi perdagangan telah menyebabkan membanjirnya produk pertanian yang disubsidi berlebih oleh negara maju membuat petani kita tidak mampu bersaing

(7) kebijakan pembatasan impor produk pertanian (sapi potong)

membuat pergerakan harga dan pemenuhan produk tidak stabil. Untuk itu diperlukan:

a) advokasi kebijakan dengan instansi terkait, dan
b) dukungan legislatif dan stakeholderslainnya
c) penyediaan kebijakan yang lebih mengutamakan pada petani.

C. Isu-isu aktual ekonomi pertanian di Indonesia

1. Alih fungsi lahan pertanian

Faktor Eksternal

Faktor eksternal atau faktor dari luar merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi.

Faktor Internal

Faktor dari dalam, faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan. karakteristik petani yang mencangkup umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan yang dimiliki, dan tingkat ketergantungan terhadap lahan. Di zaman yang semakin modern ini tidak dipungkiri para generasi muda lebih memilih bekerja di bidang industri dan perkantoran daripada bekerja di bidang pertanian.

Faktor Kebijakan

Faktor kebijakan berkaitan dengan aspek peraturan (regulasi) yang

dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian

Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian

Dengan julukan Negara agraris yang dijunjungnya, tentu saja Indonesia memiliki banyak sekali potensi pertanian atau perkebunan yang bisa dijadikan sumber perekonomian Negara. Akan tetapi, seiring berkembangnya sistem perekonomian serta meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan lahan untuk kepentingan dalam bidang selain pertanian semakin meningkat pula.

Berdasarkan data statistik tahun 2014, luas lahan pertanian di Indonesia mencapai angka 41.5 juta Hektar. Dari jumlah tersebut, dapat dibagi menjadi tiga kategori yakni hortikultura 567 ribu hektar,tanaman pangan 19 juta hektar, dan terakhir tanaman perkebunan sebesar 22 juta hektar.

Berikut beberapa dampak alih fungsi lahan pertanian :

1. Berkurangnya lahan pertanian

   Dengan adanya alih fungsi lahan menjadi non-pertanian, maka otomatis lahan pertanian menjadi semakin berkurang. Hal ini tentu saja memberi dampak negatif ke berbagai bidang baik secara langsungmaupun tidak langsung.

2. Menurunnya produksi pangan nasional

   Akibat lahan pertanian yang semakin sedikit, maka hasil produksi juga akan terganggu. Dalam skala besar, stabilitas pangan nasional juga akan sulit tercapai. Mengingat jumlah

penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, namun lahan pertanian justru semakin berkurang.

3. Mengancam keseimbangan ekosistem

   Dengan berbagai keanekaragaman populasi di dalamnya, sawah atau lahan-lahan pertanian lainnya merupakan ekosistem alami bagi beberapa binatang. Sehingga jika lahan tersebut mengalami perubahan fungsi, binatang-binatang tersebut akan kehilangan tempat tinggal dan bisa mengganggu ke permukiman warga. Selain itu, adanya lahan pertanian juga membuat air hujan termanfaatkan dengan baik sehingga mengurangi resiko penyebab banjir saat musim penghujan.

4. Sarana prasarana pertanian menjadi tidak terpakai

   Untuk membantu peningkatan produk pertanian, pemerintah telah menganggarkan biaya untuk membangun sarana dan prasarana pertanian. Dalam sistem pengairan misalnya, akan banyak kita jumpai proyek-proyek berbagai jenis jenis irigasi dari pemerintah, mulai dari membangun bendungan, membangun drainase, serta infrastruktur lain yang ditujukan untuk pertanian. Sehingga jika lahan pertanian tersebut beralih fungsi, maka sarana dan prasarana tersebut menjadi tidak terpakai lagi.

5. Banyak buruh tani kehilangan pekerjaan

   Buruh tani adalah orang-orang yang tidak mempunyai lahan pertanian melainkan menawarkan tenaga mereka untuk mengolah lahan orang lain yang butuh tenaga. Sehingga jika

lahan pertanian beralih fungsi dan menjadi semakin sedikit, maka buruh-buruh tani tersebut terancam akan kehilangan mata pencaharian mereka.

6. Harga pangan semakin mahal

   Ketika produksi hasil pertanian semakin menurun, tentu saja bahan-bahan pangan di pasaran akan semakin sulit dijumpai. Hal ini tentu saja akan dimanfaatkan sebaik mungkin bagi para produsen maupun pedagang untuk memperoleh keuntungan besar. Maka tidak heran jika kemudian harga-harga pangan tersebut menjadi mahal.

7. Tingginya angka urbanisasi

   Sebagian besar kawasan pertanian terletak di daerah pedesaan. Sehingga ketika terjadi alih fungsi lahan pertanian yang mengakibatkan lapangan pekerjaan bagi sebagian orang tertutup, maka yang terjadi selanjutnya adalah angka urbanisasi meningkat. Orang-orang dari desa akan berbondong-bondong pergi ke kota dengan harapan mendapat pekerjaan yang lebih layak.

D. Pertanyaan

1. Jelaskan tentang ciri-ciri sektor pertanian
2. Jelaskan Permasalahan utama pertanian di Indonesia
3. Sebutkan Isu-isu aktual ekonomi pertanian di Indonesia



BAB - IV

APLIKASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI PADA USAHA TANI

Tujuan Intruksional

1. Menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi dalam Usahatani
2. Menjelaskan Prinsip-prinsip Teknik dalam Usahatani

A. Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam Usahatani

Semakin sedikit cakupan keadaan persaingan dan semakin sedikit pilihan yang terjadi pada situasi petani kecil, analisis ilmu ekonomi produksi dan teknik-teknik pengambilan keputusan semakin kurang berguna. Hal-hal kunci yang perlu dipertimbangkan adalah apakah

1. para petani kecil menghadapi pilihan-pilihan nyata tentang bagaimana mereka menggunakan sumberdayanya dan untuk apa sumberdaya itu digunakan
2. mempunyai perangsang untuk menggunakan sumberdaya yang ada dengan sebaik-baiknya
3. menghadapi ketidakpastian yang serius dalam hal produksi atau lebih menghadapi kepastian
4. mempunyai pilihan untuk menjual atau memperdagangkan sejumlah besar outputnya di pasar

5. mempunyai pilihan atau kebutuhan untuk membeli masukan-masukan usahatani yang penting di pasar
6. mempunyai tekad atau keinginan yang kuat atau meraih hari esok yang lebih baik
7. perlu mencapai atau mempertahankan tingkat outputterlepas dari kekurangan yang serius atas beberapa sumberdaya utama
8. mempunyai teknologi baru untuk berproduksi yang tersedia bagi segelintir dari mereka
9. mempunyai kemudahan atas sumber-sumber kredit
10. mempunyai sistim organisasi sosial dan ekonomi yang mencakup pemanfaatan pasar untuk meyatukan produsen dan konsumen.

Prinsip-prinsip ekonomi yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan usahatani antara lain:

a. Prinsip Keunggulan komparatif

   Untuk mewujudkan efisiensi dalam usaha tani, maka dibutuhkan ketepatan waktu dan tempat dalam memproduksi produk yang diusahakannya. Sebagai contoh, dalam usaha tani stawberi di Indonesia banyak ditanam di daerah dataran tinggi karena memang keadaan fisik pada lokasi inilah yang tepat untuk tanaman tersebut, sehingga dapat menghasilkan outcome yang maksimal.

b. Prinsip kenaikan hasil yang berkurang/The law of deminishing return

   Prinsip ini sangat tepat untuk menentukan tingkat produksi terbaik yang dihadapkan dengan terbatasnya sumber daya yang tersedia. Salah satu contohnya yaitu dalam menentukan jumlah tenaga kerja pada suatu kegiatan usaha tani, seorang manajer usaha tani akan

terus menambah jumlah tenaga kerja sampai pada titik rasional dengan keuntungan yang paling tinggi. Manajer usaha tani tersebut akan berhenti menambah tenaga kerja, jika penambahan tersebut justru menimbulkan penurunan keuntungan.

c. Prinsip Substitusi (The Principle of Substitution)

Prinsip subtistusi ini memberikan penjelasan mengenai metode berproduksi yang dapat memberikan manfaat besar dengan biaya sekecil – kecilnya. Contoh yang terjadi pada usaha tani di Indonesia, misalnya peternak itik yang biasanya menggunakan ikan sebagai makanan ternaknya, kemudian diganti dengan keong mas yang ternyata memiliki kandungan protein setara dengan ikan, dan tentunya dapat menekan biaya produksi, di mana harga keong mas jauh lebih murah dibandingkan harga ikan.

d. Prinsip Biaya Imbangan/Oportunitas (The Principle of Opportunity Cost)

Merupakan prinsip memilih cabang usaha dengan mengorbankan cabang usaha lain. Misalnya peternak itik petelur yang benar – benar focus dalam mengusahakan pemaksimalan output berupa telur itik akan kehilangan kesempatan untuk menjadi pengusaha ternak telur itik tetas.

e. Prinsip analisis biaya/Farm expenditure (Pengeluaran Biaya Pertanian)

Prinsip analisis biaya merupakan prinsip menentukan harga sesudah menghitung biaya produksi. Sesuai dengan tujuan perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan, maka prinsip inilah yang digunakan para pelaku usaha tani. Contoh pada usaha ternak itik petelur, pelaku usaha tani di bidang peternakan itik tersebut menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan, seperti bibit, makanan ternak, vitamin, tenaga kerja, dan biaya lainnya. Kemudian output, berupa telur itik, dijual dengan harga yang disesuai dengan

biaya produksinya. Selain itu, untuk menentukan harga dapat dengan menjumlahkan biaya produksi dengan keuntungan yang diinginkan, atau juga menentukan harga yang disesuaikan dengan memperhatikan harga yang ditawarkan pesaing.

f. Pemilihan cabang usaha

Prinsip pemilihan cabang ini merupakan keleluasaan bagi pelaku usaha tani untuk memilih cabang usahanya. Dengan indicator keberhasilan dapat memperoleh penghasilan yang tinggi dengan biaya yang rendah. Misalnya, seorang petani padi tidak hanya menanam padi beras putih, tetapi memperluas cabang usahanya dengan menanam beras ketan dan beras merah, dengan catatan asalkan penambahan cabang usahanya itu dapat meningkatkan penghasilan dari petani tersebut.

g. Baku timbang tujuan (Goal Trade-off)

Di era globalisasi dengan persaingan yang semakin ketat, prinsip baku timbang tujuan ini sangatlah tepat untuk mewujudkan efisiensi usaha tani. Contoh yang terjadi di Indonesia, ketika para petani di suatu wilayah beramai – ramai menanam padi, ternyata ada petani yang beralih menanam ubi. Petani ubi tersebut sudah barang tentu menghasilkan pendapatan lebih tinggi karena sedikitnya pesaing yang mengusahakan produk serupa dengan petani ubi tersebut.

B. Prinsip-prinsip Teknik dalam Usahatani

Produksi adalah proses menggunakan sumberdaya untuk menghasilkan barang-barang, jasa, atau kedua-duanya. Produsen dapat menggunakan salah satu atau ketiga faktor produksi (tenaga kerja, modal, bahan baku) itu dengan kombinasi yang berbeda, guna menghasilkan satu atau banyak produk. Unsur kunci keputusan petani

mengenai apa yang akan dihasilkan dan bagaimana melakukannya adalah tujuannya untuk mendapatkan semakin banyak, bahkan sebanyak-banyaknya, hasil dari jumlah sumberdaya yang terbatas.

Ada tiga hubungan dasar dalam produksi, yang disebut hubungan respon (response relationship), yaitu

a. hubungan antara sumberdaya yang dipakai dan jumlah produksi (input-output).
b. cara-cara yang berbeda untuk mengkombinasikan sumberdaya dan mensubstitusikan satu sama lain dalam proses produksi (input-input).
c. hubungan antara berbagai produk yang dapat dihasilkan (output-output).

Secara terperinci tentang ketiga hubungan respon tersebut adalah

1. Kombinasi Input-Output

   Input yang mempengaruhi hasil tanaman per satuan disebut input variabel, misalnya tenaga kerja, bibit, jumlah penyiangan per ha dan lain-lain. Lahan merupakan input tetap dalam jangka pendek. Dengan menganggap pengaruh-pengaruh lain konstan, hubungan langsung antara seringnya penyiangan dengan jumlah hasil per satuan menunjukkan respons hasil per satuan terhadap jumlah penyiangan dan disebut fungsi respons/response function/ fungsi produksi. Fungsi produksi umumnya dirumuskan menjadi $Y = f(X1, X2, ..., Xn)$. Bentuk-bentuk fungsi produksi antara lainlinier, kuadratik, Cobb Douglass

2 . Kombinasi Input-Input

Inputvariabel dalam usahatani lebih dari satu jenis, sehingga dapat dilakukan kombinasi input-inputvariabel untuk menghasilkan jumlah output ang sama dengan biaya semurah mungkin, atau substitusi antara dua atau lebih input untuk memperoleh biaya minimal. Penambahan satu faktor produksi diikuti dengan penurunan faktor produksi lainnya, dengan asumsi hasil produksinya tetap.

Agar dana yang terbatas dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, maka input-inputnya dapat diganti sehingga biaya yang dihemat karena menggunakan lebih sedikit suatu macam inputmenjadi hampir sama seperti biaya ekstra karena menggunakan inputlain.

3. Kombinasi Output –Output

Bagaimana cara memperoleh keuntungan maksimal seandainya memproduksidua produk atau lebih? Jika produknya bersifat komplementer atau suplementer, maka dari segi teknis akan lebih baik untuk menghasilkan dua produk sampai pada suatu titik di mana keduanya mulai bersaing atas sumberdaya yang terbatas. Kombinasi terbaik adalah kombinasi yang paling banyak mendatangkan uang, yaitu dengan memperhitungkan kemungkinan kombinasi teknis dan harga dari masing-masing produk.

Pada kombinasi dua produk yang mendatangkan uang terbanyak, imbalan marjinal karena menggunakan sumberdaya yang tersedia untuk menghasilkan lebih banyak satu macam produk hampir sama dengan imbalan marjinal yang diperoleh karena menggunakan sumberdaya untuk

menghasilkan ebih banyak produk alternatifnya. Dalam hal ini, tiada kemungkinan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan seandainya mensubstitusikan satu macam produk dengan menghasilkan lebih sedikit produk yang lainnya, atau disebut prinsip imbalan eki-marginal (equimarginal returns). Di samping itu, yangperlumendapat perhatian adalah karakteristik produk pertanian yang dapat dilihat dari sifat fisik, ekonomi, dan sifat sosialnya.

C. Pertanyaan

a. Susunlah data tentatif yang menggambarkan hubungan respon antara penyiangan dengan produk padi total per ha dan produk marjinal

b. Apakah menurut Anda konsep hubungan respons "input-input", "input-output", dan "output-output" berguna jika Anda memberi nasihat kepada seorang petani subsisten tentang praktek-praktek produksi tanaman atau ternaknya? Jika tidak/ya, mengapa?

c. Menurut Anda apakah ilmu ekonomi produksi relevan dengan situasi petani kecil di daerah tropis?



BAB - V

TEORI PRODUKSI PERTANIAN

Tujuan Intruksional

1. Memahami LDR dalm Produksi Pertanian
2. Memahami Fungsi Produksi
3. Memahami pengaruh luas lahan terhadap pendapatan petani.
4. Memahami pengaruh kualitas tanah terhadap pendapatan petani.

A. LDR dalam Produksi Pertanian

Dalam proses produksi dikenal hukum kenaikan hasil berkurang (Law of DiminishingReturns) disingkat dengan LDR. LDR berlaku di sektor pertanian dan di luar pertanian. LDR berbunyi sebagai berikut: Bila satu faktor produksi ditambah terus dalam suatu proses produksi, ceteris paribus, maka mula-mula terjadi kenaikan hasil, kemudian kenaikan hasil itu menurun, lalu kenaikan hasil nol dan akhirnya kenaikan hasil negatif.

Ceteris paribus artinya hal-hal lain bersifat tetap, faktor produksi lain tetap jumlahnya, hanya satu variabel tertentu yang berubah jumlahnya. Selain jumlah atau kuantitas maka kualitas faktor produksi itu juga sama.

Dalam LDR ini terdapat istilah-istilah produksi sebagai berikut:

1. TP (total product) atau produksi total yaitu jumlah produksi pada level pemberian input tertentu. Input adalah faktor produksi atau bagian/unsur faktor produksi, misalnya input pupuk adalah bagian dari faktor produksi modal, luas lahan adalah bagian dari faktor produksi alam.
2. AP (average product) hasil rata-rata atau produksi rata-rata yaitu jumlah hasil dibagi dengan jumlah input yang dipakai. Kalau AP tenaga kerja (labor) disingkat dengan APL (Average Product of Labor), kalau AP modal capital disingkat dengan APC (Average Product of Capital).
3. MP (marginal product) atau produk marjinal yaitu kenaikan hasil yang disebabkan oleh kenaikan atau pertambahan satu unit input. MP labor disingkat dengan MPL (Marginal Product of Labor) dan MP capital disingkat dengan MPC (Marginal Product of Capital), dan sebagainya.

LDR dapat dijelaskan bila satuan input dan output dalam satu proses produksi adalah kuantitatif, bila satuannya kualitatif sulit diterangkan, walaupun dalam proses produksi itu LDR berlaku. Kuantitatif artinya dapat diukur dengan satuan tertentu, misalnya jumlah output dan input dalam satuan Kg, Liter, hektar dan sebagainya. Kalau satuan hasil (output) maupun satuan input tidak secara kuantitatif, misalnya produksi sangat baik atau kurang baik, satuan input misalnya sangat banyak, agak kurang, maka LDR tidak dapat menjelaskannya.

Ingat bahwa LDR berlaku jika hanya satu input yang berubah atau bertambah atau berkurang,misalnya hanya jumlah pupuk yang bertambah dari 100 kg per hekta menjadi 150 kg perhektar, jenis pupuknya adalah sama, factor-fakto yang lainnya adalah tetap. Faktor-faktor lain itu misalnya penyiangan tanaman, penyemprotan hama

(dalam fisik dan biayanya atau modal) dan lain-lain. Kalau jumlah labor dan modal sama-sama berubah maka LDR tidak dapat berfungsi.

LDR ini berlaku dalam segala segi kehidupan.

Misalnya seorang mahasiswa jika membaca buku ekonomi pertanian:

- Membaca selama 1 jam dikuasai 2 lembar,
- membaca 2 jam dikuasai 5 lembar,
- membaca 3 jam dikuasai 9 lembar,
- membaca 4 jam dikuasai 11 lembar

Kenaikan hasilnya atau MP membaca adalah:

- (2-0)/(1-0) = 2;
- (5-2)/(2-1) = 3;
- (9-5)/(3-2) = 4.

Jadi sampai membaca selama 3 jam kenaikan hasil (MP) naik, selanjutnya dengan membaca selama 4 jam MP = (11-9)/(4-3) = 3 lembar, pada saat ini MP sudah menurun.

Suatu percobaan pemupukan pada tanaman bayam, dengan keterangannya adalah:

- luas tanaman adalah 1 rante.
- diberikan pupuk urea pada 5 tingkat, satuannya adalah kg.
- produksinya adalah daun bayam, satuannya adalah kg.

B. Fungsi produksi

1. Teori Produksi

Teori produksi yaitu teori yang mempelajari bagaimana cara

mengkombinasikan berbagai penggunaan inputpada tingkat teknologi tertentu untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Sasaran teori produksi adalah untuk menentukan tingkat produksi yang efisien dengan sumber daya yang ada (Sudarman, 2004).

Selanjutnya Bishop dan Toussaint (1979) menyatakan bahwa produksi adalah suatu proses di mana beberapa barang dan jasa yang disebut input diubah menjadi barang-barang dan jasa lainyang disebut output. Mubyarto (1986) menyatakan bahwa produksi pertanian adalah hasil yang diperoleh sebagai akibat bekerjanya beberapa faktor produksi sekaligus yaitu modal, tenaga kerja dan tanah. Dalam pengertian teknisnya produksi berarti proses memadukan (menjadikan) barang-barang atau zat dan tenaga yang sudah ada. Dalam pengertian ekonomis, produksi berarti pekerjaan yang menimbulkan guna, memperbesar guna yang ada dan mengabaikan guna itu di antara orang-orang banyak. Teori produksi dapat diperjelas dengan menggunakan pendekatan fungsi produks.i

Fungsi produksi menurut Soekartawi (2003) adalah hubungan fisik antara variabel yang dijelaskan (Y) dengan variabel yang menjelaskan (X). Variabel yang dijelaskan biasanya berupa output dan variabel yang menjelaskan berupa input. Dalam pembahasan teori ekonomi produksi maka telaahan yang banyak diminati dan dianggap penting adalah telaahan fungsi produksi ini. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, sebagai berikut.

1) Melalui Fungsi produksi, maka dapat diketahui hubungan antara faktor produksi (input) dan produksi (output) secara langsung dan hubungan tersebut dapat lebih mudah dimengerti;
2) Melalui Fungsi produksi, maka dapat diketahui hubungan antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X)

serta sekaligus mengetahui hubungan antarvariabel penjelas, secara matematis dan dapat dijelaskan sebagai berikut.

3) Y = f (X1, X2 , ..., Xi , ... , Xn).....(2.1)

Digunakannya fungsi produksi maka hubungan Y dan X diketahui dan sekaligus hubungan Xi, ... , Xndan X lainnya juga dapat diketahui.Pada tingkat teknologi tertentu, hubungan antara inputdan output tercermin dalam suatu rumusan fungsi produksi sebagai berikut (Nicholson, 2001):

Q = f (K, T, M,....).....(2.2)

Keterangan:

Q=jumlah output yang dihasilkan selama periode tertentu

K= jumlah inputyang berupa faktor produksi modal

T= jumlah inputyang berupa faktor produksi tenaga kerja

M= jumlah inputyang berupa faktor produksi bahan mentah

Tanda titik-titik menunjukkan bahwa masih terdapat kemungkinan variabel yang lain mempengaruhi output di dalam proses produksi.

Suatu asumsi dasar sifat fungsi produksi adalah menunjukkan hubungan bahwa jumlah barang produksi bergantung pada jumlah faktor produksi, sehingga jumlah barang produksi merupakan variabel tidak bebas sedangkan faktor-faktor produksi merupakan variabel bebas. Kondisi demikian, output akan mencapai tingkat maksimum untuk kemudian turun kembali ketika semakin banyak input variabel yang ditambahkan kepada input lain yang sudah tetap, maka fungsi produksi dianggap tunduk pada suatu hukum yang disebut *The Law of Diminishing Returns,* yaitu: "Bila satu macam input penggunaannya terus ditambah sedangkan input-input yang

lain tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input yang ditambahkan tadi mula-mula menaik, tetapi kemudian menurun bila input tersebut terus menerus ditambah" (Boediono, 1998). Untuk dapat melihat berlakunya hukum tersebut dapat dilihat darikurva-kurva sebagai berikut.

a. Kurva Total Physical Product (TPP), adalah kurva yang menunjukkan tingkat produksi total (Q) pada berbagai tingkat penggunaan inputvariabel dan input-inputlain dianggap tetap, secara matematis dapat ditulis (Boediono, 1998)

   TPP = f(X) .....(2.3)

b. Kurva Average Physical Product (APP), adalah kurva yang menunjukkan hasil rata-rata per unit inputvariabel pada berbagai tingkat penggunaan inputtersebut, secara matematis ditulis :

$$APPx = \frac{TPP}{X} \quad \text{.....} \quad (2.4.)$$

   Keterangan:

   APPX= besarnya produksi rata-rata

   TPP = besarnya produksi total

   X = inputvariabel;

c. Kurva Marginal Physical Product (MPPX), adalah kurva yang menunjukkan tambahan TPPXkarena

adanya tambahan penggunaan satu inputvariabel, secara matematis ditulis :

$$MPPx = \frac{\Delta TPP}{\Delta X} \quad \text{.....} \quad (2.5.)$$

Keterangan:

MPPX= produksi marjinal rata-rata

ΔTPP = perubahan produksi total

ΔX= perubahan input variabel

Menurut Boediono (1998) hubungan antara ketiga kurva TPP, APP, dan MPP mempunyai karakteristik sebagai berikut.

1. Penggunaan inputX sampai tingkat dimana TPPXcekung ke atas (0 sampai A), maka MPPXmenaik, demikian pula APPX ;
2. Pada tingkat penggunaan inputX yang menghasilkan TPPXyang menaik dan cembung ke atas (yaitu antara A dan C), maka MPPXmenurun;
3. Pada tingkatpenggunaan inputX yang menghasilkan TPPX yang mulai menurun, maka MPPX menjadi negatif; dan
4. Pada tingkat penggunaaan inputX dimana garis singgung pada TPPXpersis melalui titik origin (B), maka MPPX= APPXmaksimum.

Elastisitas produksi adalah persentase perubahan dari

output sebagai akibat dari persentase perubahan dari input. Elastisitasproduksi ditulis melalui rumus sebagai berikut (Soekartawi, 2003):

$$EP = \frac{\Delta Y/Y}{\Delta X/X} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (2.6.)$$

$$EP = \frac{X}{Y}\,\frac{\Delta Y}{\Delta X} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (2.7.)$$

Keterangan:

Ep = elastisitas produksi

ΔY= perubahan output

ΔX= perubahan input

Y= Output

X= input

Karena ΔY / ΔX adalah MPP, maka besarnya Ep tergantung dari besar kecilnya MPP dari suatu input, misalnya inputX.

Produksi Marjinal (Marginal Productivity = MP) merupakan tambahan jumlah yang diproduksi karena ada tambahan salah satu faktor produksi yang ada. Produksi Marjinal ditulis melalui rumus sebagai berikut (Soekartawi, 2003):

MP = P' = ðP/ðQ.....(2.8)

Keterangan:

MP = turunan pertama dari fungsi produksi

2. Biaya produksi

Menurut Soekartawi (2002) biaya produksi dibedakan menjadi dua, yaitu (a) Biaya tetap (fixed cost), dan (b) Biaya tidak tetap (variable cost). Biaya tetap, umumnya didefinisikan sebagai biaya yang relatif tetap jumlahnya dalam jangka pendek. Biaya tetap total jumlahnya sama sepanjang proses produksi. Artinya walaupun produk yang diperoleh banyak atau sedikit jumlahnya akan tetap.

Namun biaya tetap rata-rata tergantung pada besar kecilnya produksi. Di pihak lain biaya variabel atau biaya tidak tetap adalah merupakan biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh besar kecilnya produk yang dihasilkan. Cara menghitng biaya tetap (fixed cost) adalah sebagai berikut.

$$FC = \sum_{i-1}^{n} X_i \; P_{xi} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (2.9.)$$

Keterangan:

Xi(i=1,2,3,dst): banyaknya inputtetap ke-i

PXi(i=1,2,3,dst): harga dari inputtetap ke-i

Rumus 2.10dapat digunakan untuk menghitung biaya total. Total biaya atau total cost (TC) adalah jumlah dari biaya tetap (fixed cost/ FC) dan biaya tidak tetap (variable cost/ VC). Rumusnya adalah sebagai berikut (Soekartawi, 2002):

TC = FC + VC.....(2.10)

3. Pengertian Pendapatan

Kegiatan usaha tani bertujuan untuk memperoleh produksi

pertanian, yang pada akhirnya akan dinilai dengan uang. Bagi petani pendapatan yang tinggi merupakan tujuan dari usaha taninya. Soekartawi dkk (1986) membagi pengertian pendapatan usaha tani menjadi tujuh. Dua di antaranya sebagai berikut:

1) Gross Farm Income, yaitu pendapatan kotor petani adalah perkalian antara nilai produksi (Value of Production) atau penerimaan kotor usaha tani (Gross Return) yang diperoleh dengan harga jual;
2) Net Farm Income, yaitu pendapatan bersih petani adalah selisih antara pendapatan kotor usaha tani dengan pengeluaran biaya usaha tani.Dari pengertian pendapatan usaha tani tersebut, secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut (Soekartawi, 2002)

TR = Y . Py.....(2.11)

Dimana:

TR = total penerimaan

Y = produksi asparagus

Py= harga Y; dan

Pd = TR –TC.....(2.12)

Keterangan:

Pd = pendapatan bersih

TR = total penerimaan

TC = total biaya

Dalam perhitungan pendapatan usaha tani dikenal dua pendekatan yaitu pendekatan pendapatan (income approach) dan pendekatan keuntungan (profit approach). Pendekatan pendapatan diterapkan pada usaha tani yang subsistem sampai semi komersial. Pendekatan keuntungan umumnya diterapkan pada usaha tani yang komersial, di mana sudah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi secara keseluruhan.

Menurut Nicholson (2001), untuk memperoleh laba yang paling maksimum, akan memilih tingkat output pada saat mana penerimaan marjinal (Marginal Revenue= MR) sama dengan biaya marjinal (Marginal Cost= MC),

MR = dR/dQ = dC/dQ = MC.....(2.13)

4. Teori Tenaga Kerja

Istilah employment dalam bahasa Inggris berasal dari kata kerja to employyang berarti menggunakan dalam suatu proses atau usaha memberikan pekerjaan atau sumber penghidupan. Jadi employmentberarti keadaan orang yang sedang mempunyai pekerjaan.Penggunaan istilah employment sehari-hari biasa dinyatakan dengan jumlah orang dan yang dimaksudkan ialah sejumlah orang yang ada dalam pekerjaan atau mempunyai pekerjaan. Pengertian ini mempunyai dua unsur yaitu lapangan atau kesempatan kerja dan orang yang dipekerjakan atau yang melakukan pekerjaan tersebut.Jadi pengertian employmen tdalam bahasa Inggris sudah jelas yaitu kesempatan kerja yang sudah diduduki (Soeroto,2006).

Pengangguran dalam suatu negara adalah perbedaan diantara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja

yang sebenarnya.Angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu tertentu. Untuk menentukan angkatan kerja diperlukan dua informasiyaitu (1) jumlah penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun dan belum ingin bekerja (contoh adalah pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga dan pengangguran sukarela), dan (2) jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang masuk pasar kerja (yang sudah ingin bekerja) jumlah penduduk dalam golongan (2) dinamakan angkatan kerja dan penduduk golongan (1) dinamakan bukan angkatan kerja. Dengan demikian angkatan kerja dalam suatu periode tertentu dapat dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk usia kerja dengan jumlah bukan angkatan kerja. Perbandingan diantara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja yang dinyatakan dalam persen dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja.

Dalam prakteknya suatu negara dianggap sudah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh ataukesempatan kerja penuh (Sukirno, 1994). Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1969, tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhanmasyarakat (pasal 1). Jadi pengertian tenaga kerja menurut ketentuan ini meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja, dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tenaganya sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran.

Menurut Simanjuntak (2000) tenaga kerja (man power) mengandung dua pengertian. Pertama, tenaga kerja

mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini tenaga kerja mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua, tenaga kerja mencakup orang yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut, mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tenaga kerja atau man powerterdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Menurut Simanjuntak (2000) angkatan kerja dibedakan dalam tiga golongan seperti berikut.

1) Penganggur (*open unemployment*), yaitu orang yang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan.
2) Setengah pengangguran (*underemployment*), yaitu mereka yang kurang dimanfaatkan dalam bekerja dilihat dari segi jam kerja, produktivitas kerja dan pendapatan. Setengah pengangguran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
    a) setengah pengangguran kentara (visible under-employed) yakni mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, dan
    b) setengah pengangguran tidak kentara (invisible underemployed) yaitu mereka yang produktivitas kerja dan pendapatannya rendah.
    c) Bekerja penuh, yaitu keadaan dimana bekerja sesuai dengan jam kerja yaitu 35 jam seminggu dan pendapatannya, produktivitas kerja tinggi.

Menurut Manning, (1990) dalam Marhaeni dan Manuati, (2004), permintaan terhadap tenaga kerja selain dapat dilihat secara mikro yaitu dari segi perusahan juga dapat dilihat secara makro baik secara sektoral, jenis jabatan, dan status hubungan kerja. Permintaan tenaga kerja secara makro juga sering dikenal dengan istilah kesempatan kerja atau jumlah orang yang bekerja. Konsep bekerja atau kesempatan kerja mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu.Suatu negara dianggap baru mulai mendekati titik balik atau turning point dalam pembangunan apabila jumlah tenaga kerja disektor pertanian mulai turun secara absolut.Lebih lanjut dikatakan bahwa pembangunan biasanya disertai dengan perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor manufaktur dan sektor jasa, serta keberhasilan strategi pembangunan biasanya sering dikaitkan dengan kecepatan pertumbuhan sektor manufaktur yang dianggap berkaitan erat dengan peningkatan produktivitas pekerja.

C. Pengaruh luas lahan terhadap pendapatan petani

Kebutuhan pangan dunia selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Luas lahan pertanian yang ada pada saat ini dirasakan masih belum memadai untuk pemenuhan target tersebut. Karena itulah diperlukan perluasan lahan. Permasalahan yang ada adalah petani seringkali tidak memiliki biaya yang cukup untuk perluasan lahan. Luas lahan garapan yang ada pada saat ini saja telah membuat petani mengeluarkan banyak biaya produksi. Karena itulah banyak petani menyiasati dengan memaksimalkan lahan yang ada dengan mengefisienkan pembiayaan produksinya (Fuglie, 2010).

Ahishakiye (2011) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pertanian di Burundi menyebutkan

bahwa luas lahan merupakan faktor penentu pada besaran biaya yang dikeluarkan oleh petani. Semakin luas lahan garapan maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh petani.Pertimbangan luas lahan ini juga didukung dengan tingkat kesulitan pengolahan lahan, seperti kontur lahan yang berbukit atau berdinding curam sehingga rawan longsor. Semakin luas lahan maka kesulitan padapengolahan lahan akan semakin besar dan berdampak pada besarnya biaya produksi.

D. Pengaruh kualitas tanah terhadap pendapatan petani

Tanah merupakan media dari berbagai jenis tanaman pangan. Tanah sebagai sumber daya alam yang terperbaharui bukan berarti tidak dapat mengalami kualitas. Zhang (2011) yang melakukan penelitian di Cina menemukan bahwa kualitas tanah mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Karena itulah Zhang menyarankan agar dapat tercipta sebuah sistem yang mengintegerasikan antara konservasi tanah dengan pengelolaan tanaman pangan. Upaya konservasi ini perlu dilakukan untuk keberlanjutan usaha pertanian di Cina, namun tetap dengan mengedepankan efisiensi dalam konservasi tanah tersebut. Efisiensi menjadi sangat penting karena mengingat beban biaya konservasi tidaklah sedikit.

Killham (2011) menyatakan bahwa konservasi tanah untuk menjaga kualitas tanah dari waktu ke waktu memerlukan berbagai inovasi. Hal ini terjadi mengingat penurunan kualitas tanah dari waktu ke waktu akan semakin meningkat. Kondisi ini berdampak pada penerapan inovasi baru dengan tekonologi maju yang tentunya akan memakan banyak biaya. Karena itulah upaya konservasi ini perlu didukung dengan tindakan manajemen yang tepat sehingga selain dapat menjagakualitas tanah, juga akan dapat menghemat biaya

E. Pertanyaan

1. Jelaskan tentang Fungsi Produksi
2. Bagaimana pengaruh luas lahan terhadap pendapatan petani.
3. Bagaimana pengaruh kualitas tanah terhadap pendapatan petani.



BAB - VI

SUMBERDAYA PERTANIAN

Tujuan Intruksional

1. Menjelaskan Sumberdaya alam dan lingkungan Pertanian
2. Menjelaskan Sumberdaya Manusia (Petani)
3. Menjelaskan lahan pertanian
4. Menjelaskan modal pertanian

A. Sumberdaya alam dan lingkungan Pertanian

Sumberdaya alam yang ada merupakan unsur dari lingkungan hidup yang mendukung kehidupan di muka bumi, dan dibentuk atau diciptakan oleh alam menurut hukum-hukumnya. Sumberdaya alam letaknya menetap pada lokasi tertentu, sehingga pengolahannya mengikuti letak lokasi sumberdaya alam tersebut.

Sumberdaya alam sifatnya terbatas, sebaliknya jumlah penduduk dan pola hidup semakin meningkat, sehingga kebutuhan akan sumberdayapun meningkat. Sumberdaya alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu ekosistem, yaitu lingkungan tempat berlangsungnya hubungan timbal balik antara mahluk hidup dengan lingkungan, antara mahluk hidup yang satu dengan mahluk hidup yang

lainnya, antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lainnya. Hubungan timbal balik di atas merupakan salah satu bidang kajian geografi. Sumberdaya alam ialah suatu sumberdaya yang terbentuk karena kekuatan alamiah, misalnya tanah, air, biotis, udara, ruang mineral, alam (landscape), energi matahari serta angin.

Moh. Soerjani (1987:18) mengemukakan sebagai berikut: "Untuk kepentingan pembangunan ekonomi, sumberdaya alam digolongkan berdasarkan potensi penggunaanya, misalnya (1) Sumberdaya alam penghasil energi, seperti air, gas bumi, sinar matahari, minyak bumi, batubara, dan angin. (2) Sumberdaya alam penghasil bahan baku yang terdiri atas bahan galian tambang, biotis, tanah dan perairan. (3) Sumberdaya daya lingkungan hidup seperti udara, ruang, landscape dan sebagainya".

Pada konsep ekologi terdapat dua komponen yang tidak dapat dipisahhan. Komponen itu adalah lingkungan di satu pihak dan makhluk hidup atau organisme di pihak lain. Untuk dapat melihat hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan secara jelas kita harus menguasai pengertian lingkungan secara baik. Pengertian lingkungan hidup dewasa ini ramai dibahas, baik itu dari kalangan ahli lingkungan ataupun pemerintah.

Beberapa pengertian mengenai lingkungan hidup dari berbagai pihak dapat diikuti dibawah ini :

(a) Otto Soemarwoto (2004:51) seorang ahli lingkungan mengemukakan definisi lingkungan hidup yaitu : “Enviroment” adalah istilah bahasa inggris, untuk lingkungan di Indonesia banyak kita gunakan istilah lingkungan hidup atau lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah segala sesuatu disekeliling organisme itu bepengaruh pada kehidupan.

(b) Undang-undang No: 32, tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu : “Lingkungan hidup

adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dengan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya".

Berdasarkan definisi tadi, maka ditarik kesimpulan bahwa ruang lingkup lingkungan yang mempengaruhi kehidupan manusia sangat luas. Lingkungan tersebut meliputi berbagai unsur antara lain : Semua benda, berupa manusia, hewan tumbuhan, tanah, air serta udara keseluruhan ini disebut sebagai materi dan satuan-satuannya disebut sebagai komponen. Daya, disebut juga energi. Keadaan disebut juga kondisi atau situasi. Perilaku atau tabiat. Ruang, yaitu wadah diamana baebagai komponen berada. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan.

Indonesia dahulu terkenal akan hasil padinya yang luar biasa. Hal ini sempat membuat indonesia mampu memenuhi kebutuhan beras di seluruh indonesia. Pada sumber daya alam pertanian, di indonesia terbagi menjadi 3 tempat. Yaitu sawah, ladang, dan tegalan. Pembagian ini dilihat berdasarkan lahan basah dan lahan keringnya (Baca: Pertanian Lahan Basah dan Lahan Kering).

1. Sawah

Sawah adalah jenis tempat menanam yang membutuhkan banyak air dalam proses menanamnya. Sawah memiliki banyak jenis. Yaitu sawah tadah hujan, sawah irigasi, dan sawah lebak. Sawah tadah hujan adalah sawah yang memanfaatkan musim hujan sebagai masa tanam. Sawah ini diairi oleh hujan, sehingga hanya dapat di pakai pada saat musim hujan. Saat musim kemarau sawah ini biasanya dijadikan ladang jagung.

Sawah irigasi adalah sawah yang memanfaatkan saluran irigasi

untuk mengairi sawah. Sawah irigasi tidak membutuhkan musim. Karena dapat diairi sewaktu- waktu. Sawah irigasi adalah sawah yang paling umum di Indonesia. Sawah lebak adalah sawah yang menfaatkan luapan air sungai untuk mengairi sawah. Sawah ini juga hanya dapat dipakai saat musim hujan. Sawah ini biasanya berada di sekitar sungai.

2. Ladang

Ladang adalah salah satu sistem pertanian. Berbeda dengan sawah, ladang memanfaatkan tanah kering sebagai media tanam. Sawah tadah hujan dan sawah lebak, saat tidak dipakai, akan beralih fungsi sebagai ladang. Jika pengolahan ladang salah, maka tanah akan menjadi tidak subur. Jika tanah menjadi tidak subur, maka ladang akan dipindah dengan membuka ladang baru. Hal ini adalah salah satu alsan terjadingan pengundulan hutan. Penggundulan hutan adalah salah satu alasan tercemarnya air dan tanah. Memakai ladang dengan cara yang benar adalah dengan mengurangi pemakaian pupuk kimia, dan lebih banyak memakai pupuk kompos atau pupuk kandang.

3. Tegalan

Tagalan adalah ladang yang telah menetap. Perbedaan dengan ladang adalah, tegalan biasanya di tanami oleh tanaman musiman. Selain itu, tegalan sangat bergantung dengan musim hujan. Sehingga hanya dapat dipakai saat musim hujan. Tegalan tidak dapat di airi dengan memakai sistem irigasi, karena bentuknya yang tidak rata.

Sawah, ladang, dan tegalan adalah bentuk- bentuk drai pertanian. Dalam dunia pertanian, sumber daya alam yang dihasilkan tidak hanya berupa padi. Ladang dan tegalan adalah dua bentuk lahan

pertanian yang tidak dapat menanam padi. Hasil sumber daya alam yang dihasilkan oleh bidang pertanian antara lain:

a. Padi adalah salah satu sumber alam yang paling banyak di jumpai di indonesia, karena dianggap sebagai makanan pokok.
b. Jagung adalah salah satu tanaman yang di tanam di ladang. Jagung adalah tanaman musiman, selain itu, sawah tadah hujan, saat musim kemarau biasa beralih fungsi menjadi ladang jagung.
c. Kedelai adalah salah satu tanaman yang di tanam di ladang maupun tegalan. Kedelai bisa di jadikan sebagai pengganti susu sapi bagi orang yang menderita alergi laktosa.
d. Kacang tanah adalah jenis kacang- kacangan yang sering di temui. Hal ini karena kacang tanah sangat mudah di tanam di tanah indonesia yang subur.

B. Sumberdaya Manusia (Petani)

Menurut Rodjak (2006), petani sebagai unsur usaha tani memegang peranan yang penting dalam pemeliharaan tanaman atau ternak agar dapat tumbuh dengan baik, iaberperan sebagai pengelola usaha tani. Petani sebagai pengelola usaha tani berarti ia harus mengambil berbagai keputusan di dalam memanfaatkan lahan yang dimiliki atau disewa dari petani lainnya untuk kesejahteraan hidup keluarganya. Petani yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang bercocok tanam hasil bumi atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu. Apabila ada orang yang mengaku petani yang menyimpang dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bukan petani.

Dilihat dari hubungannya dengan lahan yang diusahakan maka petani dapat dibedakan atas:

a) Petani pemilik penggarap ialah petani yang memiliki lahan usaha sendiri serta lahannya tersebut diusahakan atau digarap sendiri dan status lahannya disebut lahan milik.

b) Petani penyewa ialah petani yang menggarap tanah orang lain atau petani lain dengan status sewa. Alasan pemilik lahan menyewakan lahan miliknya karena membutuhkan uang tunai dalam jumlah yang cukup besar dalam waktu singkat, atau lahan yang dimilikinya itu terlalu jauh dari tempat tinggalnya.

   Besarnya nilai sewa lahan biasanya ada hubungan dengan tingkat produktivitas lahan usaha yang bersangkutan, makin tinggi produktivitas lahan tersebut makin tinggi pula nilai sewanya. Namun, dalam prakteknya nilai sewa lahan usaha tani sawah berkisar antara 50-60% dari produktivitasnya, misalnya apabila per hektar hasilnya sebesar1-1,2 ton gabah kering per tahun, maka nilai sewanya harus senilai gabah tersebut pada waktu terjadi transaksi. Lamanya waktu sewa biasanya minimal satu tahun untuk selanjutnya dapat diperpanjang kembali sesuai dengan perjanjian antara pemilik tanah dan penyewa.

c) Petani penyakap (penggarap) ialah petani yang menggarap tanah milik petani lain dengan sistem bagi hasil. Produksi yang diberikan penyakap kepada pemilik tanah ada yang setengahnya atau sepertiga dari hasil padi yang diperoleh dari hasil lahan digarapnya. Biaya produksi usaha tani dalam sistem sakap ada yang dibagi dua dan ada pula yang seluruhnya ditanggung penyakap,

kecuali pajak tanah dibayar oleh pemiliktanah.

d) Petani penggadai adalah petani yang menggarap lahan usaha tani orang lain dengan sistem gadai. Adanya petani yang menggadaikan lahan miliknya, karena petani pemilik lahan tersebut membutuhkan uang tunai yang cukup besar dalam waktu mendesak, tanah miliknya tersebut tidak mau pindah ke tangan orang lain secara mutlak. Namun, adanya hak gadai tersebut secara berangsur-angsur pindah haknya menjadi milik penggadai. Hal ini terjad iapabila uang gadai yang pertama tidak dapat dikembalikan pada waktu yang telah ditetapkan atau uang gadainya terlalu besar, sehingga tidak mungkin lagi untuk dikembalikan. Dalam keadaan demikian biasanya penggadai menambah uang gadainya sesuai dengan nilai atau harga tanah pada saat masa gadainya berakhir. Menurut Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH, 1960) dalam suatu pasalnya tercantum bahwa apabila masa gadai telah melewati tujuh tahun, secara otomatis penggadai harus menyerahkan kembali tanah yang digadai kepada pemiliknya tanpa meminta uang gadaiannya. Besarnya uang gadaiper tahun untuk luas lahan tertentu tidak ada ketentuan yang pasti, tetapi bergantung kepada si pemilik tanah berapa besar yang diperlukannya. Lamanya masa gadai tergantung pada kesanggupan yang menggadaikan lahan biasanya yang menentukan masa gadai itu adalah penggadai sendiri.

e) Buruh tani ialah petani pemilik lahan atau tidak memiliki lahan usaha tani sendiri yang biasa bekerja di lahan usaha tani petani pemilik atau penyewa dengan mendapat upah, berupa uang atau barang hasil usaha tani, seperti beras ataumakanan lainnya. Hubungan kerja di dalam usaha tani tidak diatur oleh

suatu perundang-undangan perburuhan sehingga sifat hubungannya bebas sehingga kontinyuitas kerja bagi buruh tani yang bersangkutan tidakterjamin.

Dewasa ini mungkin tidak ada lagi petani yang subsisten penuh atau komersial penuh, sekarang sebagian besar kelompok tani pada tahap semi komersial (Johnson, 1981). Petani dalam usaha agribisnis mempunyai dua peranan ganda yaitu:

a) Sebagai produsen komoditas agribisnis. Petani berfungsi sebagai penghasil produk agribisnis yang berupa tanaman, ternak, dan kayu untuk memenuhi keluarganya maupun untuk pasar (domestik dan pasar ekspor).
b) Sebagai konsumen. Petani akan membutuhkan komoditas yang tidak dihasilkannya terutama hasil industri yang bahan bakunya dari produk pertanian dan juga dari hasil pertaniansendiri.

Menurut Egbert de Vries (1985) dalam Ilham (2007) kondisi empiris mengenai petani dan sektor pertanian akan lebih dipahami oleh petani sendiri dibandingkan orang luar. Oleh karena itu, untuk menganalisis profil petani dan persoalannya harus dilihat dari sudut pandang petani sendiri. Petani beserta keluarganya, usahanya, tenaga kerjanya, konsumsinya, hartanya dan hutangnya, rencana-rencananya, harapan dan kekhawatirannya yang memberikan arah dan karakteristik kepada sistem pertanian saatini. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari petani dan lingkungannya. Data dan informasi yang dikumpulkan berkaitan dengan aspek ekonomi dan yang tidak berkaitan dengan variabel

ekonomi, yaitu variabel sosial dan budaya seperti keamanan, kenyamanan, kejayaan dan kasih sayang menurut Stevens dan Jabar (1988) dalam Ilham (2007).

Kajian perlu dilakukan lebih mendalam yang berkaitan juga dengan peubah sosial budaya karena keragaman pertanian yang cukup tinggi. Jenis komoditas yang diusahakanpetanidapat memengaruhi profil petani yang meliputi aspek demografi, penguasaan aset, ketenagakerjaan, teknologi dan kelembagaan. Aspek demografi yang dapat digunakan untuk melihat profil petani adalah usia, pendidikan, asal daerah dan lama tinggal penduduk di suatu daerah.

Aspek penguasaan aset yang bisa dikaji dalam melihat profil petani yaitu dilihat dari luas lahan dan kepemilikan lahan. Aspek lainnya yang memengaruhi profil petani adalah ketenagakerjaan yang dapat dilihat dari sisi lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang tersedia dan menyerap tenaga kerja atau dengan kata lain penduduk yang berusaha di bidang (sektor), terbagi menjadi sembilan sektor lapangan pekerjaan yaitu Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri, Listrik Gas dan Air, Konstruksi, Perdagangan, Transportasi dan Komunikasi, Lembaga Keuangan dan Jasa.

Menurut A.T Mosher, pertanian adalah sejenis proses produksi yang khas yang didasarkan atas pertumbuhan tanaman dan hewan, para petani mengatur dan menggiatkan pertumbuhan tanaman dan hewan itu dalam usaha taninya. Kegiatan produksi dalam setiap usaha tani merupakan aspek penting. Dari defenisi diatas dapat ditarik pengertian bahwa pertanian adalah suatu tempat yang dipergunakan petani untuk mengusahakan agar tanaman dan hewan dapat berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia terutama sebagai sumber penghidupan.

C. Lahan Pertanian

Manusia merupakan bagian integral dari lingkungan. Manusia terbentuk oleh lingkungan dan sebaliknya manusia juga membentuk lingkungan hidupnya (Brontowiyono, 2005). Segala tindakan manusia dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dengan demikian sangat mempengaruhi dalam implementasi pembangunan berkelanjutan.

Sumberdaya alam sebagai modal dasar pembangunan, dalam pemanfaatannya harus diketahui karakteristiknya terlebih dahulu, seperti distribusinya yang tidak merata, saling interaksi dan kebergantungan, dan klasifikasi yang terbarukan atau tidak terbarukan (Suparmoko 2008). Kompleksnya interaksi antar komponen sumberdaya alam tidak dapat dianggap secara parsial, tetapi membentuk suatu sistem yang komprehensif dan menyeluruh (Dietz, 2000; Brontowiyono, 2006).

Kajian tentang penduduk dengan sumberdaya alam dan lingkungan mempunyai arti penting, karena pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan oleh penduduk apabila kurang memperhatikan karakteristiknya, akan mengakibatkan penurunan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan (Biswas, 2008).

Sumberdaya alam dan lingkungan bersifat dinamis, baik jumlah maupun mutunya, dan perubahan sumberdaya alam dan lingkungan mengalami transisional yang semula didominasi oleh alam, kemudian didominasi oleh manusia (Suriatmadja 1984). Keterbatasan sumberdaya, terutama sumberdaya lahan pertanian, sangat berpengaruh terhadap pola ketahanan dan strategi rumah tangga (Calow, et al, 2009). (Yeates 1980) mendefinisikan ketahanan rumah tangga sebagai tingkat kemampuan rumah tangga perdesaan untuk menjaga keberlangsungan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keberlangsungan proses produksi.

Lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan (Arsyad,2006). Lahan diperlukan sebagai ruangan atau tempat di permukaan bumi yang diperguinakan oleh manusia untuk melakukan segala macam kegiatan.

Lahan merupakan sumberdaya pembangunan yang memiliki karakteristik unik:

(1) luas relatif tetap karena peruahan luas akibat proses alami (sedimentasi) dan proses artifisial (reklamasi) sangat kecil;
(2) memiliki sifat fisik (jenis batuan, kandungan mineral, topografi,dsb) dengan kesusaian dalam menampung kegiatan masyarakat yang cenderung spesifik.

Oleh karena itu lahan perlu diarahkan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan yang paling sesuai dengan sifat fisiknya serta dikelola agar mampu menampung kegiatan masyarakat yang terus berkembang (Dardak,2005).

1. Karakteristik dan Kebutuhan Lahan

Kemapuan lahan adalah kapasitas suatu lahan untuk berproduksi (Anonim 2012). Kemampuan ini sering diartikan sebagai potensi lahan untuk penggunaan pertanian secara umum denagan kemampuan produksi dari tanah tersebut yang didasarkan pada fakta-fakta iklim, drainase dan kemiringan. Klasifikasi kemampuan lahan merupakan penilaian lahan secara sistematik dan pengelompokannya ke dalam beberapa kategori berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari (Arsyad,2006).

Sesuai dengan sifat dan faktor-faktor pembatas yang ada, tiap-tiap lahan mempunyai daya guna yang berbeda antara satu lahan dengan lahan lainnya, pada penentuan kemampuan lahan, sifat, dan faktor pembatas yang dipakai adalah yang menentukan dan mempengaruhi mudah tidaknya suatu lahan menjadi rusak jika lahan tersebut dijadikan suatu usaha pertanian. Langkah klasifikasi kemampuan lahan agar tanah dapat digunakan dengan tepat adalah dengan menyelidiki dan mengumpulkan data tentang sifat-sifat tanah dan faktor pembatas yang diperlukan dan setelah itu dikombinasikan antara pemakaian lahan dan konservasi lahan.

Budi dan Kartaatmadja (2002) selanjutnya dalam penelitiannya pada musim kemarau tahun 2000 di wilayah layanan irigasi Waduk Pondok, Ngawi, Jawa Timur mengungkapkan bahwa efisiensi penggunaan air memiliki korelasi positif terhadap peningkatan produktivitas padi sawah. Konsumsi air total yang banyak justru memiliki nilai produktivitas yang lebih rendah. Penelitian ini menarik untuk dikembangkan dalam mengungkapkan cara efisiensi penggunaan air yang sangat relevan bagi daerah rawan kekeringan.

Konservasi lahan untuk produktivitas tanaman pangan juga telah dikaji oleh Ratnada dan Yusuf (2003) di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY dengan fokus pada perilaku petani dalam konservasi lahan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat perilaku petani dalam upaya konservasi lahan pada sistem usaha pertanian padi sawah irigasi tergolong sedang. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor motivasi petani mencapai keberhasilan, wawasan petani tentang konservasi lahan, keaktifan petani mencari informasi konsearvasi lahan, dan intensitas penyuluhan tentang konservasi lahan. Perilaku

petani dalam konservasi lahan ternyata mempunyai pengaruh kuat dan positif dengan produktivitas dan pendapatan usaha tani.

Penelitian ini secara implisit merekomendasikan pentingnya upaya konservasi lahan dalam upaya peningkatan produktiviats tanaman pangan serta tuntutan dilibatkannya petani secara aktif dalam upaya tersebut. Masrun (2009) melakukan kajian pengaruh luas lahan, intensitas pertanaman, dan produktivitas terhadap pertumbuhan produksi padi sawah di Indonesia dalam kurun tahun 1980-2001. Hasilnya menyimpulkan bahwa intensitas pertanaman memiliki peranan penting, sedang luas lahan dan produktivitas cenderung menurun pertumbuhannya. Hal tersebut membuktikan fluktuasi penggunaan total produksi tidak berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan produksi atau telah terjadi levelling offproduktivitas.

Karakteristik lahan adalah suatu parameter lahan yang dapat diukur atau diestimasi. Kegunaannya adalah untuk membedakan satuan lahan yang berbeda penggunaan dan digunakan untuk mendeskripsikan kualitas lahan, misalkan kemiringan lahan, tekstur lahan, jeluk tanah, dan curah hujan, satuan pemetaan lahan dalam survei sumberdaya lahan disertai dengan deskripsi karakteristik lahan (Jamulya dan Sunarto, 1995).

Kualitas lahan adalah sifat-sifat yang komplek dari suatu lahan yang nyata perbedaannya mempengaruhi tingkat kesusaian lahan untuk suatu bentuk penggunaan tertentu. Kualitas lahan dinilai atas dasar karakteristik lahan yang berpengaruh, kualitas lahan dapat merupakan faktor pembatas jika tidak atau hampir tidak dapat memenuhi parsyaratan unyuk memperoleh produksi yang optimal dalam pengelolaan suatu penggunaan lahan tertentu (Tukidal dan Suratman,1995).

Karakteristik lahan berbeda dengan kualitas lahan, karakteristik lahan merupakan parameter lahan yang dipakai untuk menentukan kualitas lahan. Suatu karakteristik lahan dapat berpengaruh pada suatu kualitas lahan lainnya, tetapi tidak dapat berpengaruh pada kualitas lahan lainnya, karakteristik lahan pada umunya tidak dipergunakan secara langsung dalam kegiatan evaluasi sumberdaya lahan sedangkan kualitas lahan terkadang dapat diukur secara langsung, meskipunyang diuraikan hanya dua atau tiga karakteristik lahan dalam suatu kelompok (Jamulya dan Tukidal, 1995).

Pembatas lahan dibedakan menjadi dua bagian seperti pembatas lahan secara permanen yaitu pembahas lahan yang tidak dapat dengan mudah diperbaiki dengan usaha perbaikan lahan misalnya kemiringan lahan,kedalaman tanah, bahaya banjir dan iklim, sedangkan pembatas lahan sementara yaitu pembahas lahan yang dapat diatasi atau diperbaiki dengan cara pengelolaan. Lahan seperti kandungan unsur-unsur hara yaitu kesuburan tanah dengan cara memberikan pupuk (Tukidal dan Suratman 1995).

Karakteristik lahan digunakan dalam mengevaluasi sumber daya lahan karena merupakan parameter lahan yang diperlukan di dalam membedakan satuan lahan yang berbeda macam penggunaannya serta berguan untuk mendeskripsikan kualitas lahan, karakteristik lahan yang erat kaitannya untuk keperluan evaluasi lahan dapat dikategorikan dalam 3 faktor utama, yaitu topografi, tanah dan iklim.Karakteristik lahan tersebut (terutama topografi dan tanah) merupakan unsur pembentuk satuan tanah Pertanian di lahan kering, bergantung pada hujan.

Dengan kondisi topografi yang kurang menguntungkan, air hujan yang jatuh hanya sebagian kecil saja yang berinfiltrasi, selebihnya menjadi run off yang mengalir ke sungai dan kemudian ke

laut. Akibatnya produksi pertanian hanya semusim saja. Pada lahan dengan kondisi seperti ini sangat potensial dikembangkan berbagai jenis irigasi untuk mendukung produktifitas pertanian tersebut. Menggunakan teknologi irigasi suplemen, musim tanam (untuk tanaman semusim) pada sebagian besar wilayah Indonesia tidak terbatas hanya pada musim hujan saja, tetapi bisa diperpanjang sampai pada pertengahan musim kemarau.

Hal ini dimungkinkan karena sekitar 83 % wilayah Indonesia mempunyai curah hujan tahunan > 2.000 mm. Jika teknologi panen hujan dan hemat air serta irigasi suplemen secara teknis dan sosial ekonomis dapat diterapkan, maka masalah kekurangan air, sebagai akibat perubahan iklim, akan dapat diatasi (Haryadi 2002).

Tejoyuwono (1991) mengilustrasikan kemampuan dan kesesuaian lahan dalam pengertian daya dukung,diman dari perbandingan antara daya dukung lahan (supply) dan nilai kemanfaatannya (demand) dapat dinilai kelayakannya. Apabila terdapat ketidakesesuaian antara daya dukung lahan dan kemanfaatannya maka dapat mengakibatkan ketidakefisienan yang berarti daya dukung telah terlampaui atau tidak efektif, karena tingkat pemanfaatan masih jauh dibawah kemampuan daya dukung lahannya.

D. Modal Pertanian

Modal dalam usaha pertanian diklasifikasikan sebagai bentuk kekayaan, baik berupa uang maupun barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu secara la ngsung atau tak langsung dalam suatu proses produksi. Pembentukan modal bertujuan untuk meningkatkan

produksi dan pendapatan usaha tani, serta menunjang pembentukan modal lebih lanjut (Soekartawi, 1989).

Penerapan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktifitas usaha pertanian bukan hanya membutuhkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga modal untuk membeli input yang di butuhkan. Faktor modal memegang peranan penting yang dipertimbangkan petani sebelum melakukan usahatani (Hermanto, 1992). Modal diperlukan terutama untuk pengadaan sarana produksi (benih, pupuk dan pestisida), yang dirasakan petani semakin tinggi harganya.

Sumber dana yang berasal dari rumah tangga petani sering dipandang tidak cukup untuk membiayai peningkatan usahataninya. Karena pada umumnya rumah tangga petani di Indonesia adalah petani kecil dan bermodal lemah. Menurut Mudiak (1988), perkembangan sektor pertanian tidak mungkin terjadi tanpa akumulasi modal perubahan teknologi pertanian sebagai pemacu pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan modal.

Permasalahan modal bagi petani sampai saat ini umumnya menjadi masalah klasik yang sepertinya tidak pernahselesai. Persoalan itu terutama terjadi pada pertanianyangdilaksanakan dengan skala kecil. Modal seolah-olahmenjadi faktor pembatas optimasi pertanian yangdilakukan petani.

Sebagian besar usaha pertanian yangdilakukan petani masih mengandalkan modal sendiri yangberasal dari asset petani dan pendapatan petani. Padahal,kadangkala pendapatan dan asset petani harus digunakanuntuk berbagai keperluan keluarganya mulai dari konsumsipangan, pakaian, sekolah anak, kesehatan, dan biaya sosial.Pada kontek pendapatan dan asset yang dimiliki petanirelatif berjumlah sedikit, tidak heran jika urusan modalpetani dikaitkan dengan tengkulak atau rentenir dengantingkat bunga yang tinggi.

Permasalahan modal untuk pembiayaan pertanian skala kecil menjadi komplek karena akses ke lembaga pembiayaan formal sulit dapat dipenuhi petani. Kelengkapan adminisntrasi usaha pertanian sulit dapatdipenuhi sehingga banyak dinilai tidak layak bank(unbankable). Secara umum, dihadapan lembagapembiayaan formal, usaha pertanian tidak memenuhisyarat dan criteria 5-C, yaitu character, condition ofeconomy,capacity to repay, capital, dan collateral) yang merupakan aturan/mekanisme standar perbankan dalampenyaluran permodalan. Dengan demikian, diperlukanadanya lembaga keuangan atau pembiayaan untukpertanian yang mampu mengeliminir keterbatasan 5-C yang dihadapi petani.

Dari sisi pengusaha, untuk menyelesaikan masalah sumberdaya modal yang dihadapi petani yaitu dengan jalan kemitraan melalui konsep kerja sama. Konsep kerja sama usaha melalui kemitraan ini adalah jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan petani kecil yang didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra. Hal ini berarti bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan petani kecil mempunyai kedudukan yang setara mengenai hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling mengeksploitasi satu sama lain dan tumbuh berkembangnya rasa saling percaya di antara par pihak dalam mengembangkan usahanya.

Kemitraan dengan petani tersebut penting bagi perusahaan untuk menjamin pasokan bahan mentah dengan kualitas terkontrol. Perusahaan mitra menyediakan pinjaman modal kepada petani mitra untuk biaya awal budidaya. Dalam perjanjian disebutkan komitmen kedua belah pihak untuk bekerja sama, area pertanaman komoditas yang disepakati, standar kualitas produk, dan harga yang akan

dibayarkan atas hasil panen selama periode kemitraaan. Setelah satu tahun, perjanjian akan ditinjau kembali.

Petani setuju menyerahkan hasil panennya pada perusahaan dan mengikuti petunjuk teknis budi daya dari perusahaan untuk mendapat kualitas produk sesuai kualifikasi. Perusahaan akan membeli semua hasil panen mereka dengan harga yang disepakati sepanjang memenuhi standar kualitas. Produk masih menjadi milik petani selama belum diserahkan kepada pihak perusahaan.

Struktur kemitraan di lapangan adalah antara petani yang diwakili oleh ketua kelompok tani dengan pusat pengumpul (collecting center) dari perusahaan mitra di desa tersebut. Petani akan menerima benih berkualitas dan bila perlu, bantuan berupa pupuk serta pestisida disediakan melalui collecting center.

Fungsi utama collecting center adalah mengumpulkan hasil panen komoditas dari petani mitra. Di sini produk akan dipilah sesuai kualifikasi. Selanjutnya dilakukan pengemasan sebelum dikirim ke perusahan mitra Dengan hubungan kerjasama melalui kemitraan ini diharapkan pengusaha besar atau menengah dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan petani kecil, sehingga petani kecil akan lebih berdaya dan tangguh di dalam berusaha demi tercapainya kesejahteraan.

E. Pertanyaan

1. Jelaskan Sumberdaya alam dan lingkungan Pertanian
2. Bagaimanan Sumberdaya Manusia (Petani) dapat memanen secara maksimal
3. Apakah lahan pertanian sudah memadai untuk kelola petani di indonesia
4. Apakah modal pertanian sudah dapat mengakomodir usaha pertanian di pedesaan



BAB - VII

KELEMBAGAAN PERTANIAN

Tujuan Intruksional

1. Memahami Elemen Pemberdayaan Kelembagaan Pertanian
2. Memahami Peluang Pemberdayaan Kelembagaan.
3. Memahami Strategi Pemberdayaan Kelembagaan.

A. Elemen Pemberdayaan Kelembagaan Pertanian

Alam kehidupan komunitas petani, posisi dan fungsi kelembagaan petani meru-pakan bagian pranata sosial yang memfasili-tasi interaksi sosial atau social interplay dalam suatu komunitas. Upaya pemberdayaan ke-lembagaan petani guna meningkatkan perha-tian dan motivasi berusahatani akan lebih memberikan hasil bila memanfaatkan makna dan potensi 3 (tiga) kata kunci utama dalam konteks kelembagaan, yaitu: norma, perilaku serta kondisi dan hubungan sosial.

Signifikansi ketiga kata kunci tersebut dicerminkan dalam perilaku dan tindakan petani, baik dalam tindakan individu, maupun dalam tindakan kolektif dan komunal. Setiap keputusan yang diambil selalu akan terkait atau dibatasi oleh norma dan pranata sosial masyarakat petani di lingkungannya. Vice-versa, kondisi

demikian menunjukkan bahwa proses pengambilan ke-putusan dalam masyarakat petani merupakan suatu tindakan berbasis kondisi komunitas (community-based action) yang dapat diman-faatkan sebagai salah satu celah masuk (entry-point) upaya diseminasi teknologi.

Upaya pemberdayaan kelembagaan petani memerlukan reorientasi pemahaman dan tindakan bagi para fasilitator perubahan selaku agen perubahan (change agent) dalam pelaksanaan program pembangunan pertani-an. Keterlibatan fasilitator pembangunan yang memiliki kemampuan komunikasi yang sepa-dan merupakan salah satu kunci keberhasilan proses diseminasi dan alih teknologi pertanian. Proses diseminasi teknologi akan berjalan lebih mulus bila disertai dengan pemahaman dan pemanfaatan potensi elemen-elemen kelembagaan dan status petani dalam suatu proses alilh teknologi atau diseminasi teknologi baru.

1. Pemahaman dan Potensi Pemberdayaan Kelembagaan

Pemahaman terhadap konsep lemba-ga atau kelembagaan (institusi) sejauh ini lebih terpaku pada organisasi, baik organisasi for-mal maupun organisasi nonformal. Konvensi Uphoff (1992) dan Fowler (1992) menyatakan bahwa suatu lembaga dapat berbentuk organi-sasi, atau sebaliknya. Suatu lembaga dapat berbentuk organisasi seperti pemerintah, bank, partai, perusahaan dan lain-lain. Institusi dapat juga berupa tata peraturan seperti hukum atau undang-undang, sistem perpajakan, tata ke-sopanan, adat-istiadat, dan lain-lain.Dalam konteks kelembagaan pertani-an, pemahaman terminologi "lokal" diinterpretasikan sebagai sesuatu yang memiliki karakteristik tersendiri yang berkaitan dengan kondisi setempat. Terminologi "lokal" meliputi dasar-dasar untuk melakukan tindak kolektif, energi untuk melakukan konsensus, koordinasi tanggung jawab; serta

menghimpun, meng-analisis dan mengkaji informasi.

Hal-hal ini tidak terjadi secara otomatis, namun memerlukan kehadiran institusi yang bersifat spesifik lokasi. Sebagai contoh adalah lembaga candoli di wilayah Priangan Timur (Jawa Barat) yang berfungsi sebagai penentu waktu panen komunal. Lembaga candoli bersifat lokal (Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Sumedang) dan eksistensinya (pernah) dibutuhkan karena penguasaannya akan informasi terkait per-kembangan fisik padi di lahan sawah di lokasi-lokasi tersebut (Suradisastra, 1999).

Dalam konteks sektor, fungsi lembaga dan kelembagaan lokal yang sangat signifikan ditunjukkan oleh lembaga subak sebagai bagian budaya masyarakat Bali. Subakmerupakan suatu lembaga terstruktur lintas-aspek yang berbentuk organisasi formal di berbagai hierarki administrasi dari tingkat tempek (kelompok tani) sampai ke tingkat organisasi pemerintah kabupaten (sedahan agung) dengan melibatkan norma adat dan keagamaan. Subak merupakan suatu gam-baran lengkap interaksi positif antara aspek politis pemerintahan, norma, adat, keagamaan serta aspek teknis dan teknologi pertanian (Suradisastra et al., 2002).

Kegiatan bertani yang melibatkan berbagai aspek inter-sektor seperti demikian meningkatkan kohesi sosial di lingkungan masyarakat petani Bali sehingga upaya diseminasi inovasi dapat dilaksanakan secara lebih lancar. Setiap segmen kegiatan usahatani padi sawah di Bali selalu disertai ritual tertentu sebagai bagian dari norma sosial dan rambu-rambu keagamaan sekaligus di-dukung oleh kebijakan politik pembangunan pemerintah. Potensi kelembagaan masyarakat lokal (*indigenous community institution),* terma-suk di dalamnya kelembagaan komunitas petani, dicirikan oleh keberadaan sikap kepemimpinan (leadership), tata-peraturan dan norma sosial, serta struktur dan peran kelembagaan serta toleransi sosial masyarakat

dan kelembagaan dalam tatanan sosial setempat.

Bila suatu kelembagaan, baik dalam bentuk organisasi maupun dalam bentuk norma dan pranata sosial lainnya, dinilai tidak mampu melayani kebutuhan masyarakat, kelembaga-an tersebut akan kehilangan posisinya dalam pranata sosial setempat, perlahan-lahan mati, berangsur-angsur menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat, atau digantikan oleh kelembagaan baru yang sesuai dengan dina-mika masyarakat.

2. Struktur Kelembagaan

Secara alami, suatu kelembagaan tradisional senantiasa berevolusi menyesuaikan diri ke bentuk dan tingkat yang sejalan dengan proses dan tingkat evolusi sosial masyarakat lingkungannya. Kelembagaan yang tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan ling-kungannya akan kehilangan perannya dan akhirnya mati digantikan oleh kelembagaan baru yang lebih sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Contoh kelembagaan yang mampu beradaptasi dan berubah ke dalam bentuk lebih modern antara lain adalah kapunduhan di Jawa Barat. Kapunduhan merupakan suatu lingkup kehidupan bertetangga (*neighborhood)* yang meliputi areal fisik dan populasi dibawah desa. Kapunduhan diketuai oleh seorang punduh yang berfungsi sebagai penyalur informasi dan sebagai mediator dengan punduh-punduh lain dan dengan kepala desa setempat (Suradisastra, 1999).

Di sisi lain, lembaga otini-tabenak atau dewan adat di wilayah pegunungan tengah Papua masih bertahan dan memainkan fungsinya sebagai penyaring dan penyalur informasi dari dunia luar (Dimyati et al., 1991). Kelembagaan organisasi petani peng-guna air di Bali (subak) mampu beradaptasi dan berintegrasi dengan lembaga eksternal. Subak merupakan organisasi tradisional unik

yang berbentuk organisasi formal di hierarki pemerintah daerah tingkat kabupaten, namun di tingkat lapang (daerah aliran sungai) tetap berbentuk organisasi nonformal.

Struktur organisasi subak terdiri atas Sedahan Agung yang merupakan posisi kepemimpinan formal (official position) tingkat pemerintah daerah (kabupaten) yang dikepalai oleh pejabat yang mendapat gaji sebagai pegawai negeri. Sedahan Agung membawahi seluruh pekaseh(ketua) subak gde yang berada di lingkup kabupaten tersebut. Subak gde berupa organisasi nonformal dengan seorang pekaseh (ketua) yang tidak mendapat gaji atau imbalan dari pemerintah (Suradisastra et al., 2002).

Perkembangan organisasi lokal selalu dikaitkan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat perpaduan (intermingling) bentuk organisasi dengan fungsinya sebagai suatu kelembagaan. Contoh perpaduan fungsi dan struktur kelembagaan ditunjukkan oleh kelem-bagaan mayorat sebagai suatu lembaga pengelolaan air guna memenuhi kebutuhan kelompok petani setempat. Mayorat yang terdapat di beberapa lokasi di Jawa Barat adalah organisasi nonformal yang bertugas mengelola dan mengatur pembagian air bagi anggotanya. Mayorat diketuai seorang mayor atau ulu-uludan bertugas mengatur penggunaan air dari sumber air komunal di lokasi desa atau kam-pung. Eksistensi mayorat kini telah dievolusi-kan menjadi organisasi formal Kelompok Pe-tani Pengguna Air (Suradisastra, 1997; 1999).

Kelembagaan kemasyarakatan dapat bersifat temporer dan hanya aktif pada saat-saat diperlukan. Contoh kelembagaan organisasi seperti ini antara lain terlihat dalam fenomena plong dan sonor di lokasi pemukiman transmigrasi pasang-surut Sumatra Selatan. Plong ada-lah kelembagaan normatif gotong-royong yang menyediakan pelayanan pengolahan lahan (pratanam) secara bergilir antar anggotanya. Sonoradalah lembaga gotong royong penanaman padi

pada lahan kosong yang dikuasai keluarga petani transmigran dan hanya dilakukan saat kemarau panjang yang terjadi 5 tahun sekali (Suradisastra, 1999).

Struktur kelembagaan petani dilengkapi pula dengan lembaga-lembaga kegiatan produksi yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan produktif pertanian dalam tiap musim. Contoh terlengkap kelembagaan petani yang memiliki keterkaitan lintas-sektor adalah lembaga subak. Kegiatan produksi pertanian dalam konteks subak merupakan suatu kegiatan sosio-tekno-religius daripada sebagai kegiatan tekno-ekonomi (Suradisastra et al., 2002).

3. Fungsi Kepemimpinan (leadership)

Kepemimpinan merupakan salah satu celah-masuk (entry-point) penting dalam mem-berdayakan, menata dan mempertahankan kelangsungan hidup kelembagaan petani. Pe-mimpin atau ketua kelembagaan berfungsi sebagai mobilisator, penyaring dan penyalur informasi eksternal, penasehat sosial kemasya-rakatan, dan berbagai fungsi sosial lainnya sekaligus sebagai enforcer (penegak) pelak-sanaan nilai dan norma sosial komunitas petani setempat.

Seorang pemimpin pada sebuah kelembagaan juga menentukan apa sanksi so-sial yang diberikan terhadap anggota komunitas yang melanggarnya.Dalam kaitannya dengan introduksi nilai-nilai eksternal, seorang pemimpin kelem-bagaan bahkan mampu menghentikan proses dan progres perubahan sosial di wilayahnya. Dalam kelompok masyarakat yang berada dalam tahap awal evolusi organisasi, lembaga kepemimpinan umumnya berupa seorang individu sebagai kepala suku dengan berbagai nama: keret (Arfak, Papua), ondoafie (Sarmi, Papua), pah-tuaf (Tetun), raja-soa (Maluku) dan lain-lain (Suradisastra, 2006). Para pemuka masyarakat tersebut juga memegang peran penting dalam kaitannya dengan kegiatan

bertani dan kehidupan petani di lingkungan etnisnya.

Pemimpin atau ketua kelembagaan sering dibantu oleh kelembagaan sesepuh lokal seperti dewan adat, lembaga ketahanan desa, dan lain-lain. Contoh kondisi seperti ini adalah kasus etnis Dani di wilayah pegunungan tengah Papua yang memiliki lembaga pengambil kepu-tusan kolektif otini-tabenak yang memainkan peran penting dalam mengalirkan informasi dari atas ke bawah (top-down). Lembaga ini me-mainkan peran signifikan dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif sebelum kepala suku sebagai pimpinan lembaga menya-lurkan informasi tersebut kepada masyarakat yang dipimpinnya

4. Norma dan Adat-istiadat

Norma, adat istiadat dan tata penga-turan sosial lain memainkan peran penting dalam proses produksi pertanian. Kelembaga-an tersebut dimanifestasikan dalam bentuk pranata dan interaksi sosial verbal (terucap-kan) dan interaksi nonverbal (tidak terucap-kan). Pada etnis Minang dikenal kelembagaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berbentuk organisasi semi-struktur, berfungsi menata dan mengawasi kehidupan sosial masyarakat, ter-masuk kehidupan petani dan praktek berusa-hatani.

Etnis Sunda mengenal kelembagaan pengaturan pamali, parancah, dan uga serta manajemen kolektif aktif melalui babasan "silih asih, silih asah, silih asuh" dan gugur gunung(gotong royong) serta manajemen top-down "saur ratu sabda raja" (Suradisastra, 1997).

Babasan atau motto "silih asih, silih asah, silih asuh" dimanifestasikan dalam bentuk sikap sa-ling menyayangi atau memperhatikan masalah dan kebutuhan rekan petani (silih asih), melakukan diskusi guna meningkatkan penge-tahuan pertanian

(silih asah), dan saling mendo-rong meningkatkan kegiatan bertani (silih asuh). Motto "saur ratu sabda raja" bermakna bahwa norma atau peraturan yang disusun oleh peme-rintah yang harus diikuti oleh seluruh komunitas petani dan masyarakat.

Di sisi lain, norma dan tata aturan lokal secara psikologis berfungsi sebagai rem sosial atau sebagai pelancar tindakan kolektif dan individual masyarakat anggotanya.Dalam sektor pertanian terdapat kelem-bagaan pengaturan waktu tanam di berbagai etnis Indonesia. Kelembagaan pengatur waktu tanam di Bali disebut dewase, etnis Jawa menyebutnya pranata mangsa, dan etnis Marind di Papua Selatan menyebutnya sambanim dan pakasanim (Suradisastra et al., 1990; Sura-disastra, 1992).

Norma yang berkaitan dengan proses produksi merupakan produk aktivitas kelembagaan organisasi lokal yang berkembang di lokasi yang bersangkutan. Otini-tabenak pada etnis Dani di pegunungan tengah Papua merupakan kelembagaan tata pengaturan norma dan perilaku sosial masyarakat dan merupakan filter sosial bagi informasi baru yang dimasukkan kedalam tatanan sosial setempat (Dimyati et al., 1991).

Toleransi SosialKelembagaan petani memiliki ragam toleransi yang disebut daya-lenting sosial (social resilience) dalam menghadapi intervensi dan penetrasi gagasan eksternal. Social resilience mencerminkan upaya kelompok atau kelemba-gaan masyarakat dalam mempertahankan kelembagaan nilai sosial dan norma lokal dalam proses intervensi atau introduksi nilai dan norma eksternal. Kelenturan sosial dicerminkan oleh proses dan perubahan sikap dan bentuk kelembagaan dalam konteks waktu.

Semakin tinggi daya lenting sosial, semakin besar tole-ransi masyarakat dan kelembagaan sosialnya dalam menghadapi proses perubahan yang disebabkan oleh lembaga eksternal.

Hasil akhir proses introduksi gagasan eksternal memiliki 3 kemungkinan:

(a) sikap komunitas atau kelem-bagaan lokal tidak berubah dengan menolak intervensi secara total (*social resilience rendah),*

(b) mengembangkan konsensus nilai dan norma lokal dengan nilai dan norma eksternal (*social resilience sedang*) yang berakhir pada proses evolusi dan metamorfosis kelembagaan ke bentuk baru, dan

(c) menerima seutuhnya nor-ma dan kelembagaan introduksi (social resilience tinggi) dan berakhir pada matinya kelembagaan lama dan digantikan dengan kelembagaan introduksi.

Upaya introduksi kelembagaan baru memerlukan pengkondisian masyarakat dan kelembagaan lokal guna memaksimalkan daya-lenting sosial ke posisi yang paling mengun-tungkan kedua belah pihak serta mengidentifikasi entry-point yang tepat. Kelemahan yang sering dijumpai dalam introduksi gagasan, tek-nologi atau kelembagaan baru adalah pende-katan yang kaku dan terburu-buru sebagai akibat pola pendekatan top-down yang kurang didasarkan pada pertimbangan yang berakar pada kebutuhan masyarakat lokal.

Introduksi gagasan, teknologi atau kelembagaan introduksi umumnya menerapkan strategi pengelompokan petani dalam suatu wadah bersama seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani atau koperasi. Tindakan ini seringkali mengabaikan eksistensi dan peran kelembagaan petani yang tengah berjalan.

Upaya pengelompokan sering-kali mengabaikan fakta bahwa

petani pedesaan pada umumnya hanya memiliki pengalaman pada kegiatan produksi atau bahkan hanya pada subsistem produksi. Akibatnya adalah sering terjadi introduksi gagasan, teknologi, atau kelembagaan eksternal ditolak atau program introduksi tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pendekatan yang diterapkan hen-daknya terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengkaji fakta bahwa suatu norma sosial atau kelembagaan masyarakat umumnya mencer-minkan dan bermula dari dinamika masyarakat dan kelembagaan lokal yang beroperasi dalam komunitas mereka.

B. Peluang dan Strategi Pemberdayaan Kelembagaan.

1. Peluang Pemberdayaan

Peluang pemberdayaan kelembagaan terletak pada potensi kelima elemen di atas melalui perannya sebagai alat mobilisasi massa, penyaring dan penyalur informasi eksternal Pemanfaatan elemen-elemen kelembagaan se-bagai entry-points bagi introduksi informasi baru akan memberikan hasil yang lebih baik bila terjadi interaksi positif antara nilai dan norma lokal dengan kondisi biofisik dan sifat teknologi atau informasi yang diintroduksikan.

Sesuai dengan teori perkembangan negara-negara di daerah tropis dari Huntington (1980) dimana kebudayaan bertani di negara tropis bersifat intrusif, yaitu lebih merupakan budaya yang diintroduksikan dengan peru-bahan minor dalam aspek tertentu. Secara implisit teori ini mengemukakan bahwa ke-giatan pertanian modern bukan merupakan usaha asli petani setempat, namun lebih berupa kegiatan hasil penyesuaian dengan tradisi lokal yang telah berlangsung berabad-abad.

Sejalan dengan budaya bertani tradisional Indonesia yang bersifat survival agricultureatau land-to-mouth agriculture, perkembangan kelembagaan lokal juga berjalan ke arah social survivability dan social stability yang mendu-kung tujuan dan kegiatan produktif masyarakat petani. Sejauh ini hampir tidak terdapat kelem-bagaan tradisional petani yang mengembang-kan orientasi komersil dalam kegiatan produktif untuk bertahan hidup.

Dalam paradigma land-to-mouth existence, kegiatan pertanian senan-tiasa didukung oleh lembaga-lembaga penga-turan bercocok tanam, lembaga mobilisasi tenaga dan massa, serta lembaga pengatur norma dan perilaku sosial sesuai dengan tingkat evolusi sosial setempat.

Introduksi lembaga baru yang ber-orientasi ekonomi seperti lembaga pasar dan pemasaran, koperasi, lembaga perkreditan dan lembaga lainnya harus mencari celah dan waktu yang tepat agar bisa diterima oleh masyarakat dan norma setempat. Introduksi inovasi (baik berupa teknologi maupun introduksi kelembagaan baru) yang dilakukan tanpa mempertimbangkan fungsi kelembagaan lokal, norma dan budaya masyarakat, sering-kali mengalami kegagalan, atau memerlukan waktu lama untuk diadopsi. Inovasi cangkul pada masyarakat etnis Dani di lembah Baliem memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menggantikan budaya mengolah lahan dengan tugal. Contoh lain adalah upaya introduksi pupuk pada awal intensifikasi padi awal tahun 1960-an yang memperoleh sambutan dingin dari petani dan kelembagaan lokal di Jawa.Kekurangpedulian terhadap penting-nya menemukan entry-point kelembagaan sering menimbulkan kebingungan dalam rekayasa kelembagaan yang sesuai dengan tujuan produksi pertanian.

Keadaan ini diperparah lagi dengan upaya mengejar waktu agar suatu program dapat menunjukkan hasilnya dalam waktu singkat. Evolusi kelembagaan memerlu-kan waktu lama sehingga dibutuhkan suatu program pembangunan sektor yang bersifat longitudinal (multi years) dan konsisten dalam upaya mencapai tujuannya. Sebagai gambaran adalah kasus upaya evolusi kelemba-gaan produksi pertanian melalui program SUP (Sistem Usaha Pertanian), SUTPA (Sistem Usaha Pertanian Berbasis Padi), Corporate Farming, Sistem dan Usahatani Agribisnis, P3T (Program Pengembangan Pertanian Terpadu), dan akhirnya program Prima Tani.

Perubahan program ini terjadi hanya dalam kurun waktu kurang dari 15 tahun, sedangkan perubahan norma dan kelembagaan memerlukan waktu beberapa dekade sebelum stakeholder pembangunan pertanian benar-benar memahaminya (Suradisastra, 2006).

Pendekatan Berbasis Komunitas (Community-based Approach) Kelima elemen pemberdayaan di atas yang berakar pada budaya masyarakat setem-pat merupakan entry-points pemberdayaan yang bila dimanfaatkan secara baik mampu memberikan hasil positif bagi pemberdayaan dan revitalisasi kelembagaan petani. Secara teknis pendekatan berbasis komunitas sangat bergantung kepada dinamika dan perubahan sosial dan kelembagaan yang melibatkan seluruh stakeholder kelembagaan petani dan di seluruh hierarki struktural pemerintahan dan lembaga-lembaga terkait.Langkah-langkah pemberdayaan ke-lembagaan petani sebagai suatu upaya perubahan sosial diawali dengan tahap diagnostik.

Dalam fase ini dilakukan diagnosaatau analisis situasi lintas-sektor, lintas-disiplin, dan lintas-aspek elemen-elemen peru-bahan sosial di suatu wilayah pembangunan. Dalam tahap ini kelompok perekayasa model pemberdayaan (ilmuwan dari berbagai disiplin keilmuan) merupakan aktor utama dalam proses identifikasi dan

diagnosa masalah lapangan. Dalam fase ini, lembaga riset dan perguruan tinggi diposisikan sebagai think-tank an lembaga pembinaan (penyuluhan) se-dangkan lembaga perancangan pembangunan daerah berperan sebagai pemberi input.

Tahap diagnostik dilanjutkan dengan tahap rancang-bangun dimana peran lembaga pembinaan dan penyuluhan meningkat secara proporsional. Lembaga perancangan pemba-ngunan secara politis mulai berperan dalam kegiatan koordinasi dan administratif kewila-yahan. Petugas dan penyuluh lapang sebagai ujung tombak pemberdayaan memegang posisi kunci dalam menghimpun, merangkum, menyaring dan menganalisis situasi sosio-teknis petani setempat. Dalam saat yang sama, lembaga-lembaga sektor merancang model dan kegiatan pemberdayaan di lokasi-lokasi percontohan.

Dalam tahap ini terjadi proses penyempurnaan rancangan model pemberdayaan dengan input dari seluruh stakeholder. Fase ini juga memberikan kesem-patan untuk menggali lebih dalam peluang pemanfaatan entry-point dalam memperlancar proses pemberdayaan kelembagaan baru.Dalam tahap uji coba dilakukan eva-luasi dinamika komponen pemberdayaan ke-lembagaan yang disesuaikan dengan kondisi sosial petani sekaligus dilakukan pula peman-tauan proses perubahan sosial sebagai resul-tan interaksi introduksi model pemberdayaan dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

Tahap uji coba juga merupakan fase dimana strategi pemberdayaan kelembagaan dipilih dan disepakati. Entry-point strategi introduksi model pemberdayaan dikaji dan disepakati dalam fase ini setelah hasilnya dianalisis secara lintas keilmuan. Dalam fase ini dilakukan sosialisasi rancangan strategis penye-baran model pemberdayaan baru kepada lem-baga dan aparat terkait

program pembangunan untuk menyusun rekomendasi oleh lembaga teknis daerah dan rekomendasi politis oleh kepala daerah.

Tahap berikutnya adalah mengidentifikasi dan mengembangkan strategi implementasi model pemberdayaan sesuai dengan karakteristik sosial kelembagaan masyarakat. Fase verifikasi dan implementasi merupakan tahap terahir dimana lembaga pembinaan masyarakat beserta aparatnya memikul tanggung jawab terbesar dalam sosialisasi dan penerapan model pember-dayaan dan norma sosial yang baru.

2. **Paradigma Perubahan**

Setiap upaya dan tahap perekayasaan kelembagaan senantiasa dihadapkan pada pi-lihan paradigma penerapan yang bersifat evolutif atau revolutif. Paradigma evolusi dicer-minkan dalam proses yang lambat dan teratur dengan sesedikit mungkin korbanan yang diberikan kelembagaan sebagai suatu sistem yang memiliki tatanan dan hierarki strtuktural. Pendekatan evolutif disesuaikan dengan proses evolusi sosial secara alami dimana perubahan dan penerapan model pemberdayaan dilakukan secara bertahap tanpa melakukan perubahan drastis terhadap pola kegiatan yang tengah berlangsung.

Strategi ini memakan waktu relatif lama dan proses adopsi terjadi secara bertahap karena kelompok stakeholder memiliki cukup waktu untuk memahami, mengevaluasi, dan melakukan eksperimentasi penerapan teknik pemberdayaan secara gradual.

Paradigma revolusi dalam proses perubahan sosial kelembagaan dimanifestasikan

dalam bentuk pendekatan dan proses secara cepat. Model dan strategi pemberdayaan yang tengah berjalan digantikan secara

total dengan model dan struktur yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan. Pada umumnya paradigma ini dapat disejajarkan dengan pola pendekatan top-down dengan parameter pemberdayaan subyektif. Kedua paradigma di atas selalu terda-pat dalam setiap langkah pemberdayaan dalam proporsi yang sejalan dengan kondisi dan status pemberdayaan kelembagaan yang bersangkut-an.

Berkaitan dengan kondisi ini, Suradisastra (1999) mengemukakan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi katalis atau fasilitator pemberdayaan kelemba-gaan petani. Para katalis ini kemudian bekerja secara sitematis dan melakukan langkah-langkah identifikasi situasi sebagai berikut:

(a) Memulai kegiatan pengenalan kelembagaan dalam kelompok kecil. Upaya ini membuka kemungkinan bagi anggota kelompok atau organisasi untuk memahami sifat permasalahan kelembagaan dan teknik untuk mengantisi-pasinya;

(b) Memulai kegiatan secara informal. Perekayasa kelembagaan dan para katalis ber-peran sebagai fasilitator;

(c) Memecahkan masalah bersama (problem-solving oriented). Dalam arahan ini peran katalis adalah mena-namkan sikap bahwa membuat kesalahan da-lam proses pengambilan keputusan bukanlah sesuatu yang memalukan dan patut ditekankan bahwa hal tersebut dapat diperbaiki; dan

(d) Memperkuat hubungan horisontal. Hubungan horisontal antar anggota kelembagaan yang akan dievolusikan ditujukan untuk melakukan proses difusi informasi. Hubungan ini memungkinkan anggota kelompok untuk berkomunikasi secara lebih luwes dan terbuka.

Evolusi kelembagaan dari tahap non-formal dan non-struktur ke tingkat formal ter-struktur dilakukan setelah langkah-langkah diatas berjalan lancar dan pola komunikasi telah terbentuk. Namun pada era reformasi yang menggebu-gebu akhir-akhir ini suara perom-bakan pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*) ke pola pendekatan pembangunan dari bawah ke atas (*bottom-up*) semakin lantang. Kedua pola pendekatan ini pada hakekatnya memiliki penyimpangan dalam pemahaman dan penerapannya.

Pola pendekatan top-downmenganut paham bahwa perencana, teknokrat dan pakar memiliki seluruh pengetahuan dan informasi, kearifan dan moral yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Masya-rakat hendaknya berterima kasih karena mereka merupakan kelompok yang akan me-nikmati hasil pembangunan tersebut. Penyim-pangan pemahaman pendekatan bottom-uppercaya bahwa masyarakat memiliki semua materi yang dibutuhkan untuk pembangunan yang mereka inginkan tanpa campur tangan para birokrat dan teknokrat.Pengalaman menunjukkan bahwa masyarakat hendaknya diikutsertakan dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan ban-tuan dan tuntunan pelaksana kebijaksanaan.

Dalam kondisi ini harapan dan energi sosial berpadu dengan bimbingan untuk mencapai tujuan. Sikap ini menempatkan masyarakat sebagai mitra pembangunan dan bukan se-mata-mata sebagai "penikmat hasil pemba-ngunan". Upaya pemberdayaan ekonomi ke-rakyatan hendaknya menganut pola kombinasi pendekatan populis bottom-up dan pende-katan paternalistik top-down dalam konteks tertentu.Sumberdaya yang tersedia di masya-rakat petani, baik sumberdaya finansial mau-pun sumberdaya nonfinansial dapat dimanfaat-kan secara lokal dan disesuaikan dengan kebutuhan setempat (*locally and finely tuned*).

Hal ini dimungkinkan karena kebutuhan pem-bangunan dapat diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan riil. Masyarakat yang diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dan implementasinya akan lebih responsif untuk turut memikul tanggung jawab pengelolaan pelaksanaan kegiatan. Hal ini akan membantu mengurangi biaya yang disediakan pihak pemerintah.

Disamping itu pengetahuan dan keterampilan lokal (*indigenous technical know-how*) mampu diadaptasikan untuk membantu penghematan biaya dan peningkatan keun-tungan.Pemikiran di atas secara eksplisit menggambarkan keikutsertaan masyarakat sebagai mitra pembangunan, dan bukan lagi sebagai kelompok sasaran. Dalam keadaan ini partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, ter-utama dalam bentuk partisipasi yang bersifat mobilisasi spontan yang diartikan secara posi-tif. Partisipasi merupakan unsur perekat dimana masyarakat merupakan faktor sentral dalam proses pembangunan. Partisipasi menempatkan masyarakat sekaligus sebagai mitra pemba ngunan, pemegang risiko *(stakeholders*) serta pembuat dan pengambil keputusan yang menyangkut masa depan mereka.

C. Pertanyaan

1. Jelaskan mengenai Elemen Pemberdayaan Kelembagaan Pertanian
2. Apa saja Peluang Pemberdayaan Kelembagaan.
3. Bagaimana memahami Strategi Pemberdayaan Kelembagaan.

D. Daftar Pustaka

Dimyati, A., K. Suradisastra, A. Taher. 1991. Sumbangan Pemikiran Bagi Pembangunan Pertanian di Irian Jaya. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Depar-temen Pertanian. Jakarta.

Fowler, A. 1992. Prioritizing Institutional Development: A New Role for NGO Centres for Study and Development. Sustainable Agricultrure Programme Gatekeeper Series SA35. IIED, London.Huntington, E. 1980.

Huntington's Climatic Theory of Underdevelopment. In I. Vogeler and A. de Souza (eds.) Dialectics of Third World Development, pp. 55-65. Allanheld Osmun, Montclair.

Knipscheer, H., and Kedi Suradisastra. 1986. Farmer Participation in Indonesian Livestock Farming Systems by Regular Research Field Hearings (RRFH). Agricultural Administration 22(4): 205-209.

Pretty J. 1994. Regenerating Agriculture. Earthscan Publications Ltd, London.

Rhoades R. 1987. Farmers and Experimentation. Agricultural Administration (R and E) Network Paper 21. ODI, London.

Suradisastra, K., W.K. Sejati, Y. Supriatna, dan D. Hidayat. 2002. Institutional Description of the Balinese Subak. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Vol. 21 No.1, 2002. Badan Penelitian dan Pengem-bangan Pertanian, Departemen Pertanian.

Suradisastra, Kedi 1997. Alternatif Model Sistem Manajemen Sumberdaya Lahan Gunung Halimun. Lokakarya Penyempurnaan Model Sistem Manajemen Sumberdaya Lahan Gunung Halimun, UPT-INRIK Unpad, 20 Pebruari 1997

Suradisastra, Kedi 1997. Alternatif Model Sistem Manajemen Sumberdaya Lahan Gunung Halimun. Lokakarya Penyempurnaan Model Sistem Manajamen Sumberdaya Lahan Gunung Halimun, UPT-INRIK Unpad, 20 Pebruari 1997.

Suradisastra, Kedi. 1999. Pengembangan Sumber-daya Manusia dan Pengokohan Kelem-bagaan Dalam Proses Alih Teknologi.

Disajikan dalam Pelatihan Alih Teknologi, UPT Balai Pengembangan Teknologi Tepat-Guna, Subang 1-10 Februari 1999.

Suradisastra, Kedi. 2006. Revitalisasi Kelembagaan Untuk Percepatan Pembangunan Sektor Pertanian Dalam Otonomi daerah. Orasi Pengukuhan Peneliti Utama Sebagai Profesor Riset Bidang Sosiologi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Desem-ber 2006.

Suradisastra, Kedi; Muchamad Yusron dan Asep Saefudin (eds). 1990. Pendekatan Agro-ekosistem untuk Pengembangan Pedesaan Nusa Tenggara Timur. Kelompok Penelitian Agro-ekosistem. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Universitas Nusa Cendana, dan The Ford Foundation.

Suradisastra, Kedi; Muchamad Yusron, dan M. Husein Sawit (eds). 1990. Analisis Agro-ekosistem untuk Pembangunan Masyarakat Pedesaan Irian Jaya. Kelompok Penelitian Agro-ekosistem. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Cendera-wasih, dan The Ford Foundation.

Suradisastra, Kedi; Muchamad Yusron; Asep Saefudin, dan Ruly Hardianto (eds). 1990. Analisis Agro-ekosistem Kabupaten Manokwari, Irian Jaya. Kelompok Penelitian Agro-ekosistem. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Cendera-wasih, dan The Ford Foundation.

Uphoff, N. 1992. Local Institutions and Participation for Sustainable Development. Gatekeeper Series SA31. IIED, London.

Warren D. 1991. The Role of Indigenous Knowledge in Facilitating a Participatory Approach to Agricultural Extension. Paper Presented at the International Workshop on Agricultural Knowledge Systems and the Role of Extension. Bad Boll, Germany. 21-24 May.



BAB - VIII

BIAYA PRODUKSI PERTANIAN

Tujuan Intruksional

1. Memahami Biaya Produksi dan macam-macam produksi,
2. Memahami konsep biaya produksi pertanian.

A. Biaya produksi

Pada saat melakukan suatu kegitan usaha setiap individu atau kelompok pasti memerlukan biaya yang digunakan untuk memproduksi suatu barang yang dihasilkannya tidak terkecuali seorangpetani. Petani membutuhkan biaya produksi untuk menghasilkan tanaman yang diproduksinya. Biaya produksi yang dikelurakan seorang petani selama melakukan kegiatan usahatani antara lain untuk membayar biaya perawatan tanaman seperti pembelian obat pembasmi hama dan juga pupuk yang dapat meningkatkan kualitas tanaman yang di produksi petani.

Selain itu, biaya produksi yang harus dikeluarkan petani dalam melakukan kegiatan produksi yaitu untuk membayar upah tenaga kerja dari awal penanaman tanaman yang di produksinya hingga prosen panen tanaman tersebut. Semua hal tersebut membutuhkan biaya yang kadang cukup besar. Banyak petani yang merawat sendiri

tanaman yang di produksinya untuk menekan biaya produksi untuk meningkatkan pendapatannya.

Menurut Mulyadi (1999) biaya produksi adalah biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Contohnya adalah biaya depresiasi mesin dan equipment, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya gaji karyawan yang digunakan yang bekerja dalambagan-bagian, baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan proses produksi.Pengertian biaya produksi dalam arti sempit adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva, sedangkan dalam arti luas biaya produksi adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang dilakukan untuk tujuan tertentu (Ahyari, 1979).

Biaya produksi juga merupakan biaya yang dipakai untuk menilai persediaan yang dicantumkan dalam laporan keuangan dan jumlahnya relatif lebih besar daripada jenis biaya lain yang selalu terjadi berulang-ulang dalam pola yang sama secara rutin (Mas'ud, 1989).

Biaya produksi menurut Daniel(2002) adalah biaya sebagai kompensasi yang diterima oleh para pemilik faktor-faktor produksi, atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh para pengusaha dalam proses produksi, baik secara tuani maupun tidak tunai.

Sedangkan menurut Sriyadi(1995) biaya produksi adalah pengorbanan yang seharusnya dapat diduga lebih dahulu dan tidak dapat dihindarkan, yang dapat dihitung dengan nilai uang dan yang berhubungan dengan produksi barang dan jasa. Dari penjelasan-penjelasan yang telah dijabarkan diatas maka dapat disimpulkanbahwa biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan guna membiayai proses produksi dalam mengolah bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi produk jadi yang siap untuk digunakan oleh konsumen.

1. Macam-Macam Biaya Produksi

Menurut Haryanto(2002), biaya produksi secara lebih luas dalam suatu perusahaan dapat dibedakan menjadi :

1) Biaya Tetap (Fixed Cost)

Biaya tetap merupakan biaya yang dalam kurun waktu tertentu jumlahnya tetap dan tidak berubah. Biaya ini tidak tergantung dari banyak sedikitnya barang atau output yang dihasilkan. Misalnya biaya gaji pegawai tetap, manajer, sewa tanah, penyusutan mesin, bunga pinjaman bank. Biaya tetap ini dibedakan menjadi dua macam yaitu :

a. Biaya tetap total (total fixed cost), merupakan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam jumlah tetap dalam jangka waktu tertentu.

b. Biaya tetap rata-rata (average fixed cost), merupakan biaya tetap yang dibebankan pada setiap satuan output yang dihasilkan.

2) Biaya Variabel (Variabel Cost)

Biaya variabel merupakan pengeluaran yang jumlahnya tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan jumlah output yang dihasilkan. Dalam hal ini, semakin banyak jumlah produk yang dihasilkan, semakin besar pula biaya variabelnya. Misalnya biaya bahan baku, bahan pembantu, bahan bakar, dan upah tenaga kerja langsung. Biaya variabel ini dibedakan menjadi dua macam yaitu :

a. Biaya variabel total (total variabel cost), merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan selama masa

produksi output dalam jumlah tertentu.

b. Biaya variabel rata-rata (average variabel cost), merupakan biaya variabel yang dikeluarkan untuk setiap unit output

3) Biaya Total (Total Cost)

Biaya total merupakan jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi semua output, baik barang maupun jasa. Biaya ini dapat dihitung dengan menjumlahkan biaya tetap total dengan biaya variabel total.

4) Biaya Rata-rata (Average Cost)

Biaya rata-rata merupakan biaya total yang dikeluarkan untuk setiap unit output.

5) Biaya Marginal (Marginal Cost)

Biaya marginal merupakan kenaikan dari biaya total yang diakibatkan oleh diproduksinya tambahan satu unit output..

2. Perhitungan Biaya Produksi

Menurut Mowen (2006) perhitungan biaya produksi ialah : "salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan akurat, tepat dan jelas juga sangat penting dalam menentukan harga pokok penjualan untuk nmencapai target laba yang diharapkan"

3. Tujuan Perhitungan Biaya produksi

Pada umumnya tujuan dari berdagang ialah mendapatkan dengan memperoleh pendapatanyang semaksimal mungkin dengan

pengorbanan yang seminimal mungkin. Untuk mengetahui beberapa besar jumlah laba yang diharapkan diperlukan perhitungan yang pas baik dari pengorbanan maupun pendapatan (Mowen, 2006).

Tujuan dari perhitungan biaya produksi antara lain :

a. Untuk mengendalikan biaya Pengendalian biaya biasa dilakukan dengan menetapkan beberapa cara, yaitu salah satunya dengan sistem biaya normal atau standar. Sistem ini diambil dari pengalaman pada masa lalu atau bisa disebut penelitian ilmiah.
b. Untuk Perencanaan dan Pengukuran prestasi kerja Hal ini perlu dilakukan agar dapat menetapkan kebijakan pada masa yang akan datang. Sebelum melakukan proses produksi dan pemakaian tenaga kerja terlebih dahulu difikirkan secara matang untung mempertimbangkan kejadian-kejadian diamasa yang akan datang.
c. Untuk Penetapan Biaya Sebelum hasil produksi dijual, sebelumnya terlebih dahulu harus ditetapkan harga jualnya. Pada kenyataannya harga jual produksi tidak didasarkan dengan biaya produksi karena masih ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkandalam menetapkan dalam menetapkanharga jual. Misalkan penawaran dan permintaan dan peraturan pemerintah. Akan tetapi biaya produksi merupakan langkah pertama dalam menentukan harga jual. Biaya produksi juga sebagai dalam penentuan tingkat laba yang diinginkan.

B. Konsep Biaya Produksi Pertanian

1. Konsep Pendapatan

Dalam penelitian ini, pendapatan yang digunakan adalah pendapatan Petani pemilik lahan. Menurut Sukirno (2002) bahwa pendapatan merupakan balas jasa yang diterima atas keikutsertaan seseorang dalam proses produksi barang dan jasa, pendapatan ini dikenal dengan nama pendapatan dari kerja (Labour Income). Selain pendapatan dari kerja, pekerja sering kali mendapatkan pendapatan lain yang bukan merupakan balas jasa dari kerja, pendapatan bukan dari kerja ini disebut nonlabour income.

Pemanfaatan pekerja dapat dilihat dari pendapatan yang diterimna seseorang. Apabila seseorang mempunyai keterampilan tertentu, misalnya diperoleh dari pendidikan atau latihan dan bekerja di suatu lapangan usaha dan dalam lingkungan usaha tertentu, maka diharapkan akan diperoleh pendapatan sebesar tertentu yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa pendapatan sesorang tergantung pada keterampilan di bidang tertentu yang dapat diperoleh dari pendidikan, latihan keterampilan, dan pengalaman bekerja pada bidang tertentu.

Untuk menghitung besar kecilnya pendapatan dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu (Sukirno,2002).

1) Pendekatan produksi (*production approach*), yaitu dengan menghitung semua nilai produksi barang dan jasa akhir yang dapat dihasilkan dalam periode tertentu.

2) Pendekatan pendapatan (*Income Approach*), yaitu dengan menghitung nilai keseluruhan balas jasa yang dapat di terima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu periode tertentu.

3) Pendekatan pengeluaran (*Expenditure Approach*), yaitu pendapatan yang diperoleh dengan menghitung pengeluaran konsumsi masyarakat.

2. Konsep Biaya Produksi

Menurut Alma (2000) biaya adalah setiap pengorbanan untuk membuat suatu barang atau untuk memperoleh suatu barang yang bersifat ekonomis rasional. Jadi dalam pengorbanan ini tidak boleh mengandung unsur pemborosan sebab segala pemborosan termasuk unsur kerugian, tidak dibebankan ke harga pokok. Jenis dan perilaku biaya merupakan elemen kunci dalam proses penganggaran, terutama menyangkut tanggung jawab manager. Biaya dapat dibagimenjadi tiga (3) yaitu:

1) Biaya Variabel, yaitu biaya yang berubah-ubah secaralangsung dengan tingkat aktivitas yang ada, misalnya komponen penjualan menurut metode komisi langsung.
2) Biaya Semi Variabel, yaitu biaya yang bervariasi dengan tingkat aktivitas yang ada tetapi tidak dalam propasi langsung.
3) Biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berpengaruh oleh perubahan aktivitas tetapi bersifat konstan selama periode tertentu.

Biaya juga dapat dikelompokkan menjadi :

1) Biaya langsung, yaitu biaya yang langsung dibebankan pada aktivitas atau bagian tertentu dari organisasi.
2) Biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak dapat dikaitkan dengan produk tertentu.

2. Konsep Luas Lahan

Luas lahan dapat diartikan sebagai lahan sawah dan lahan bukan sawah baik yang digunakan dan tidak digunakan termasuk lahan yang sementara tidak digunakan atau di usahakan (BPS, 2013).

Pengertian atau definisi luas lahan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan di batasi pematang (galengan atau saluran) untuk menahan atau mengalirkan air yang biasanya ditanami varieta sunggul tanaman yang dibudidayakan.
2) Bukan Lahan Sawah adalah semua lahan selain lahan sawah yang biasanya ditanami dengan tanaman palawija atau padi gogo. Lahan anggrek yaitu suatu lahan yang dipergunakan oleh petani untuk membudidayakananggrek.

Pendapatan petani dipengaruhi oleh luas lahan, dimana semakin luas lahan petani maka pendapatannya juga akan meningkat. Hubungan antara luas lahan dengan pendapatan bahwa luas lahan berpengaruh positifterhadap pendapatan/penghasilan petani anggrek. Lahan yang dikelola dengan baik tentunya akan memberikan hasil yang baik dan menguntungkan bagi petani (anggrek).

2. Konsep Keterampilan

Menurut Rivai (2004:226) menegaskan bahwa keterampilan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Keterampilan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan saat ini. Keterampilan memiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil

melaksanakan pekerjaan.

Menurut Simamora (2004:276) bahwa tujuanpemberian keterampilan adalah sebagai berikut :

1) Memperbaiki kinerja.
2) Memutahirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi.
3) Mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar konpeten dalam bekerja
4) Membantu dalam memecahkan masalah operasional.
5) Mempersiapkan karyawan untuk promosi.
6) Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi.
7) Memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi.

Dari pendapatan diatas, maka dapat diartikan bahwa tujuan keterampilan itu sebenarnya untuk meningkatkan kecerdasan serta meningkatkan keahlian pegawai pada masing-masing bidang pekerjaan agar nantinya dapat bekerja secara efektif dan efisien.

Jenis keterampilan menurut Simamora (2004:278), jenis-jenis keterampilan yang dapat diselenggarakan didalam organisasi adalah sebagai berikut :

1) Keterampilan keahlian, merupakan keterampilan yang sering dijumpai didalam organisasi. Kriteria penilaian efektivitas keterampilan juga berdasarkan pada sasaran yang didefinisikan dalam tahap penilaian.
2) Keterampilan ulang, adalah subset keterampilan keahlian. Keterampilan ulang berupaya memberikan para pegawai

keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah

3) Keterampilan lintas fungsional. Melibatkan keterampilan pegawai untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan.

Adapun beberapa manfaat dari sebuah keterampilan diantaranya, menurut Simamora (2004:280) adalah sebagai berikut :

1) Manfaat untuk karyawan
   - Membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif.
   - Membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri.
   - Membantu karyawan mengatasi stress, tekanan, frustasi dan konflik.

2) Manfaat untuk perusahaan
   - Mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas atau sikap yang lebih positif terhadap orientasi profit.
   - Membantu karyawan untuk mengetahui tujuan perusahaan.
   - Menciptakan hubungan antara karyawan dan atasan.

3) Manfaat dalam hubungan SDM, antar grup dan pelaksanaan kebijakan.
   - Meningkatkan komunikasi antar grup dan individual

- Memberikan iklim yang baik untuk belajar, pertumbuhan dan koordinasi.
- Membuat perusahaan menjadi tempat yang lebih baik untuk bekerja dan hidup.

Keterampilan sangat diperlukan guna meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Keterampilan hendaknya diberikan agar dapat membantu kinerja para pegawai sehingga dapat meningkatkan tingkat produktivitas perusahaan

C. Pertanyaan

a. Jelaskan definisi biaya produksi dan sebutkan rumus biaya produksi yang Saduara ketahui.

b. Jelaskan konsep biaya produksi pertanian dan ada berapa konsep biaya pertanian jelaskan masing-masing.



BAB - IX

TATANIAGA DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN

Tujuan Intruksional

1. Menjelaskan dasar Tataniaga
2. Menjelaskan definisi dan ruang lingkup Tataniaga Pertanian
3. Menjelasakan Tataniaga (*Marketing*) dan Penjualan (*Selling)*
4. Menjelaskan Tataniaga dan Distribusi
5. Menjelaskan Peranan Tatniaga Dalam Pembangunan Pertanian
6. Menjelaskan Sektor Konsumsi

A. Pengertian Dasar Tataniaga

Dalamam bagian ini akan diuraikan secara umum pengertian dasar tataniaga, yang meliputi definisi dan ruang lingkup tataniaga, serta peranannya agar Anda memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang tataniaga yang diterapkan di bidang pertanian. Di sini Anda akan diajak untuk memahami apa itu tataniaga, apa bedanya tataniaga dengan penjualan (selling), mengapa kegiatan tataniaga diperlukan dalam suatu perekonomian yang berkembang, serta apa peranan tataniaga dalam pembangunan ekonomi.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyaksikan

berbagai peristiwa/kejadian dan persoalan-persoalan seperti berikut ini.

a. Buah apel varietas Manalagi, sayuran kubis, teh Sosro, beras Rojolele, dan kopi bubuk Kapal Api tersedia untuk dijual di Pasar Swalayan Hero Jakarta. Padahal kita mengetahui bahwa Jakarta bukanlah produsen produk-produk tersebut. Umumnya komoditas-komoditas itu berturut-turut dihasilkan oleh para petani yang tinggal di Batu (Kabupaten Malang), Pengalengan (Kabupaten Bandung), Kabupaten Sukabumi, Slawi (Kabupaten Tegal), Delanggu (Kabupaten Klaten), dan Lampung.

b. Sepanjang waktu kita dapat menikmati lezatnya rasa buah lengkeng, jeruk, durian, rambutan, dan manisnya gula tebu. Padahal kita semua mengetahui bahwa buah-buahan tersebut biasanya dihasilkan pada musim-musim tertentu, seperti panen raya lengkeng di Ambarawa yang biasanya terjadi pada bulan Februari/Maret, jeruk dari Brastagi (Sumatra Utara) dan Sambas-Pontianak yang berproduksi sepanjang waktu melalui pengaturan pola tanam, durian dari Thailand, rambutan pada bulan November sampai dengan Januari, dan tebu pada bulan September sampai dengan November dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung.

c. Perut kita lapar, sebagian dari kita ada yang lebih suka memasuki restoran/warung siap saji (fast food restaurant), seperti restoran/warung masakan padang, warung tegal (warteg) dibandingkan dengan jenis restoran/warung lainnya yang menyediakan produk serupa.

d. Pemerintah menetapkan harga dasar (floor price) dan harga langit-langit (ceiling price) untuk komoditas pertanian tertentu (padi) dalam rangka mengakomodasi kepentingan

petani produsen dan konsumen yang hampir selalu bertentangan. D

e. Mengapa sebagian dari kita, sering kali secara apriori, beranggapan bahwa tengkulak itu selalu merugikan petani produsen?

f. Mengapa harga produk pertanian sebagian besar mengalami fluktuasi harga yang cenderung merugikan petani ?

Sederet peristiwa dan pertanyaan-pertanyaan lain masih dapat disebutkan dan di daftar lebih lanjut. Akan tetapi, cukuplah dari ilustrasi-ilustrasi tersebut dapat menggambarkan bahwa semuanya itu sangat berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi yang disebut tataniaga (marketing).

B. Definisi Dan Ruang Lingkup Tataniaga Pertanian

Jika kepada 100 responden diminta untuk mendefinisikan istilah tataniaga maka bisa diduga akan terdapat 100 macam definisi tentang kata tataniaga. Perbedaan tentang definisi mengenai satu istilah biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan sudut pandang bagi orang yang mendefinisikannya. Apalagi istilah tataniaga sering disamakan begitu saja dengan kata-kata, seperti penjualan, perdagangan, distribusi, dan periklanan yang merupakan sebagian kecil saja dari kegiatan tataniaga. Untuk menyamakan pandangan kita semua, dalam modul ini digunakan kata tataniaga sebagai terjemahan dari kata marketing dalam bahasa Inggris. Tataniaga juga merupakan padanan dari kata pemasaran.

Berikut ini akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan tataniaga, beda tataniaga dengan penjualan dan distribusi, serta apa

yang dimaksud dengan tataniaga pertanian?

C. Tataniaga (Marketing) dan Penjualan (Selling)

Penjualan hanyalah merupakan salah satu segi dari tataniaga, yaitu yang hanya memikirkan dan mengurusi soal pertukaran barang dan jasa. Di dalam penjualan, seseorang hanya memproduksi apa yang ingin diproduksinya, dan kemudian ia berkeliling ke berbagai pasar menjajakan barang tersebut agar dapat dijual kepada calon pembeli. Dalam tataniaga, seseorang mulai dengan calon pembeli. Kemudian ia merencanakan dan memproduksi apa yang diinginkan oleh calon pembeli tersebut. Jadi, ia merencanakan segala kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk memuaskan keinginan konsumen yang pada akhirnya memperoleh laba.

Dengan demikian, pada penjualan titik perhatiannya ialah keperluan atau kepentingan si penjual, sedangkan pada tataniaga fokusnya adalah keperluan dan kepentingan si pembeli atau konsumen.

D. Tataniaga dan Distribusi

Banyak orang non-tataniaga mengacaukan pengertian ini, yaitu menyamakan pengertian distribusi dengan tataniaga. Distribusi atau dalam hal ini distribusi fisik, hanya merupakan bagian dari tataniaga. Distribusi mencakup semua aktivitas yang terlibat dalam pemindahan fisik barang dari produsen ke pemakai akhir atau konsumen.

Berikut dikutip 3 macam definisi tataniaga yang dikemukakan oleh Kinnear, et al. (1983), The American Marketing Association

(1960) dan Kotler (1997). Menurut Kinnear & Bernhardt:

"*Marketing consists of all the activities of individual and organization that are designed to encourage and facilitate exchanges satisfying to all parties involved*" (Tataniaga mencakup semua kegiatan individu dan organisasi yang ditujukan untuk mendorong dan memperlancar pertukaran yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat) (Kinnear & Bernhardt: pp.9).

Untuk The American Marketing Association (1960) mengemukakan bahwa:

"*Marketing is the performance of business activities that direct the flow of goods and services to the customer or user*" (Tataniaga merupakan kinerja dari kegiatan usaha/bisnis yang mengarahkan aliran barang dan jasa kepada pelanggan atau pengguna)".

Selanjutnya, Kotler (1997) mendefinisikan tataniaga sebagai: "suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain."Untuk memperkaya definisi ini, dijelaskan pula istilah-istilah berikut ini: kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants)*, permintaan (*demands)*, produk (barang, jasa, dan gagasan) (products), nilai, biaya, dan kepuasan (value, cost, and satisfaction), pertukaran (exchange), transaksi (*transactions)*, hubungan dan jaringan (*networking & relation*), serta pasar (*markets*).

Kebutuhan manusia (*needs*) adalah suatu keadaan yang dirasakan ingin diperoleh oleh seseorang. Apabila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi maka orang tersebut tidak bahagia. Keinginan manusia (*wants*) adalah pola kebutuhan manusia yang dibentuk oleh kebudayaan dan individualitas seseorang. Seseorang yang lapar di Bogor menginginkan nasi, lauk-pauk, dan lalapan; sedangkan seseorang yang lapar di Milan (Italia) menginginkan pizza.

Permintaan (*demands*) adalah suatu keinginan yang menjadi permintaan bila didukung oleh daya beli. Permintaan yang didukung daya beli disebut real demand, sedangkan yang belum didukung daya beli disebut potential demand. Produk (products)adalah sesuatu yang dapat ditawarkan pada suatu pasar untuk mendapat perhatian dan untuk memiliki, yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Nilai, Biaya dan Kepuasan (value, cost,and satisfaction).

Nilai adalah perkiraan konsumen atas seluruh kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Pertukaran (*exchange*) adalah tindakan seseorang untuk memperoleh kepuasan mendapatkan suatu benda yang diinginkan dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Transaksi (transactions)adalah terdiri atas suatu perdagangan nilai-nilai antardua pihak. Konsep transaksi mengarah pada konsep pasar, yaitu suatu himpunan pembeli aktual dan pembeli potensial dari suatu produk.

Hubungan dan jaringan (*networking and relation*). Hubungan merupakan praktik pemasaran yang bertujuan membangun hubungan jangka panjang yang memuaskan dengan pihak-pihak kunci, yaitu pelanggan, pemasok, penyalur guna mempertahankan preferensi, dan bisnis jangka panjang. Jaringan pemasaran terdiri dari perusahaan dan semua pihak-pihak pendukung yang berkepentingan, seperti pelanggan, pegawai di bagian pemasaran, pemasok, penyalur, agen iklan, ilmuwan universitas dan pihak lain yang bersama-sama dengan perusahaan telah membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan.

Pasar (*market*). Pengertian pasar telah banyak didefinisikan oleh ahli-ahli ekonomi. Definisi yang tertua dan paling sederhana menyatakan bahwa pasar adalah sebagai suatu lokasi secara fisik di mana terjadi jual beli. Definisi lain pasar adalah suatu keadaan terbentuknya suatu harga dan terjadinya perpindahan hak milik

produk tertentu. Alfred Marshal mendefinisikan pasar sebagai suatu tempat di mana penawaran dan permintaan membentuk suatu harga tertentu.

Menurut Kotler (1997) suatu pasar adalah himpunan pembeli aktual dan pembeli potensial dari suatu produk. Pemasaran dan Calon Pembeli. Pengertian pemasaran hasil pertanian juga diturunkan dari pengertian istilah pemasaran di atas yang diterapkan kepada barang-barang input dan output pertanian, misalnya pemasaran sarana produk bibit, pupuk, alat-alat pertanian, juga hasil-hasil pertanian, seperti kopi, karet, kopra, tembakau.

Dalam hubungannya dengan definisi ini maka Tataniaga Pertanian dapat didefinisikan sebagai berikut: "Tataniaga Pertanian adalah mencakup segala kegiatan dan usaha yang berhubungan dengan perpindahan hak milik dan fisik dari barang-barang hasil pertanian dan kebutuhan usaha pertanian dari tangan produsen ke tangan konsumen termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan tertentu yang menghasilkan perubahan bentuk dari barang yang ditujukan untuk lebih mempermudah penyalurannya dan memberikan kepuasan yang lebih tinggi kepada konsumennya".

Thomsen mendefinisikan Tataniaga Pertanian, "adalah mencakup segala pekerjaan dan badan-badan yang menyelenggarakannya terlibat dalam pemindahan hasil-hasil pertanian dari petani termasuk hasil-hasil yang berasal dari hasil pertanian (seperti tekstil) sampai ke tangan konsumen akhir".

Definisi Tataniaga Pertanian yang diberikan oleh Kohls dan Downey adalah suatu "keragaan (performance)" semua usaha mencakup kegiatan arus barang dan jasa, mulai dari titik usahatani sampai di tangan konsumen akhir". Prof. Bachtiar Rifai memberikan definisi Tataniaga Pertanian yang lebih tegas, yakni "Tataniaga Pertanian adalah serangkaian jasa-jasa untuk mengusahakan benda-benda

mengalir mulai dari titik produksi hingga titik konsumsi".

Pengertian jasa-jasa dalam hal ini termasuk atau mencakup semua fungsi yang mengubah sesuatu benda dalam hal bentuk, waktu, tempat atau hak milik. Berdasarkan kenyataan, definisi-definisi di atas tidak begitu memuaskan karena sedikit sekali keterangan yang dapat diberikan tentang komoditas, partisipan dan luas pasar, serta batas pasar dengan pasar. Di samping itu juga tidak memberikan indikasi tentang struktur pasar atau sifat dari proses pembentukan harga.

Struktur pasar dimaksud adalah suatu dimensi yang menjelaskan definisi industri dan perusahaan, jumlah perusahaan atau pabrik dengan berbagai ukuran size and concentration, deskripsi product and product differentiation, syarat-syarat entry. Sebenarnya proses tataniaga itu dimulai jauh sebelum barang-barang diproduksi dan tidak dimulai pada saat produksi selesai, juga tidak berakhir setelah penjualan. Apabila ditinjau dari segi ekonomi, kegiatan tataniaga adalah kegiatan produktif. Disebut kegiatan yang produktif karena kegiatan tataniaga tersebut memberikan kegunaan bentuk, waktu, tempat, dan hak milik.

E. Peranan Tataniaga Dalam Pembangunan Pertanian

Peranan tataniaga dalam pembangunan ekonomi umumnya dan khususnya dalam pembangunan pertanian (sebagai bagian dari pembangunan ekonomi), telah banyak diakui dan ditulis dalam berbagai literatur.

Peter Drucker (1958), seorang pakar Manajemen Pemasaran, misalnya mengemukakan bahwa tataniaga merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang berkembang. Tanpa suatu sistem pemasaran yang efektif, negara-negara sedang

berkembang tidak dapat menghindarkan diri dari lingkaran setan (vicious circle) kemiskinan. Mereka tidak dapat meninggalkan era hidup yang subsistem untuk menghasilkan surplus bagi pasar karena tidak ada pembeli untuk barang-barang yang mereka hasilkan, juga karena setiap orang menghasilkan barang untuk mencukupi kebutuhannya sendiri.

Mematahkan lingkaran setan kemiskinan memerlukan suatu perubahan besar dalam sistem pemasaran yang khas di negara-negara sedang berkembang. Tataniaga yang efektif dibutuhkan untuk menghubungkan produsen dengan konsumen, pemasaran yang efektif berarti menyerahkan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen.

Hal ini berarti menyampaikan barang-barang kepada mereka pada waktu yang tepat, bentuk dan kualitas yang sesuai dengan selera mereka dengan harga yang bersedia mereka bayar. Hal ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah, terutama apabila dibayangkan begitu beraneka ragamnya barang-barang yang dapat dihasilkan dalam suatu perekonomian yang sangat maju, dan banyaknya jenis barang serta jasa yang diinginkan konsumen. Tataniaga yang efektif dalam suatu perekonomian yang kompleks adalah lebih sulit karena adanya kesenjangan (gap) antara para produsen dan konsumen menurut berbagai cara.

A.T. Mohser (1966) mengemukakan pentingnya pasar dan tataniaga bagi produk-produk yang dihasilkan para petani. Mohser bahkan menganggap bahwa pasar untuk hasil usahatani merupakan salah satu syarat pokok dari lima syarat yang harus tersedia bagi para petani jika pertanian hendak dikembangkan. Tanpa pasar untuk hasil usahatani maka tidak akan ada pengembangan pertanian.

F. Sektor Konsumsi

Pada sektor produksi, spesialisasi, dan pembagian kerja mengakibatkan kemampuan penawaran yang berbeda-beda sedangkan permintaan yang berbeda-beda akan kegunaan bentuk, waktu, tepat, dan pemilikan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan.

Dengan kombinasi input yang dimilikinya (tanah, tenaga kerja, modal dan manajerial) petani menghasilkan output fisik padi/beras, kentang, apel dan seterusnya. Jika untuk kebutuhan (konsumsi) sendiri sudah terpenuhi maka kelebihan produksi yang ada merupakan bagian output yang potensial untuk dijual/ dipasarkan (disebut juga marketable surplus) kepada pihak lain yang membutuhkannya.

Kelebihan ini perlu dijual mengingat petani mempunyai kebutuhan lain, misalnya ia perlu uang untuk membeli sandang (pakaian), pangan lain di luar yang dihasilkannya, dan papan (untuk membangun atau memperbaiki rumah tempat tinggalnya. Jika tujuan pembangunan pertanian adalah salah satunya adalah untuk meningkatkan taraf hidup petani (produksi dan pendapatan yang meningkat) maka harga yang layak untuk produk yang dihasilkan petani adalah suatu tuntutan yang tidak berlebihan.

Harga produk pertanian yang merangsang diharapkan dapat memacu pertumbuhan output pertanian. Di sisi lain konsumen sebagai pengguna produk-produk pertanian menginginkan harga-harga yang cukup rendah dalam usaha memaksimumkan kepuasannya. Di sini tataniaga berperan dalam menjembatani kesenjangan-kesenjangan dan atau kepentingan-kepentingan yang berlawanan antara produsen dan konsumen.

Menurut Mubyarto (1989) salah satu syarat tataniaga yang efisien ialah tataniaga yang mampu mengadakan pembagian yang

adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen terakhir kepada semua pihak yang turut serta di dalam kegiatan produksi dan tataniaga barang tersebut. Tataniaga juga berperan dalam menciptakan 4 macam kegunaan bagi suatu komoditas, yaitu kegunaan pemilikan (possession/ownership utility), kegunaan tempat (place utility), kegunaan waktu (time utility), dan kegunaan bentuk (form utility).

Kegunaan pemilikan diperoleh melalui proses pertukaran (jual beli); kegunaan tempat melalui kegiatan pengangkutan; kegunaan waktu melalui kegiatan penyimpanan, dan kegunaan bentuk melalui transformasi (pengubahan) produk menjadi bentuk yang lebih diinginkan konsumen melalui proses pengolahan. Contohnya, sekarung gabah kering tidak begitu berarti bagi orang yang sedang lapar. Akan tetapi, setelah ia diolah menjadi sepiring nasi yang diinginkan (form utility) dan dikirim ke tempat ia tinggal (place utility) pada waktu ia lapar (time utility) kegunaannya menjadi lebih banyak.

Menjual produk-produk pertanian umumnya dipengaruhi oleh sikap petani produsen. Sikap tradisional petani Indonesia, dengan sedikit kekecualian, selama ini lebih menitikberatkan pada efisiensi produksi dan memainkan peranan yang pasif dalam kegiatan tataniaga.

Dewasa ini mulai timbul kesadaran baru atau pergeseran konsepsi dalam pembangunan pertanian pada beberapa negara berkembang ke arah orientasi pasar (di Indonesia sendiri terjadi pergeseran tujuan pembangunan pertanian pada PJPT II, yaitu dari peningkatan produksi ke peningkatan pendapatan). Hal ini disebabkan oleh serentetan peristiwa yang cenderung meningkatnya tekanan atas nasib petani produsen, antara lain sebagai berikut.

1. **Terjadinya kelebihan produksi (over-supply) serta timbulnya persaingan yang semakin sengit di antara produsen hasil pertanian.** Hal ini disebabkan oleh peningkatan produktivitas dan pilihan yang lebih luas/terbuka atas hasil-hasil pertanian terutama di negara-negara berkembang. Contoh tentang hal ini ialah kasus produksi beras di Indonesia pada awal tahun 1993 yang berada di atas tingkat Swasembada sehingga menimbulkan tekanan atas harga beras yang tidak jarang petani harus menjualnya di bawah harga dasar yang ditetapkan pemerintah. Untuk melakukan tindakan ekspor pun Indonesia kalah bersaing dalam harga dengan negara-negara eksportir lain karena harga beras Indonesia di pasaran dunia tergolong cukup tinggi.

2. **Risiko investasi yang lebih tinggi dalam produksi**. Investasi modal semakin meningkat melalui tambahan pinjaman, dan supaya pembayaran pinjaman lancar petani dituntut untuk menciptakan pengembalian investasi (return on investment) yang memadai, produsen mencari keuntungan yang tinggi. Hal ini lebih mudah diperoleh melalui peningkatan efisiensi dalam produksi dan kemampuan dalam memasarkan produknya.

3. **Biaya operasional yang semakin meningkat.** Pencabutan atau pengurangan subsidi beberapa input tertentu (pupuk dan pestisida) dalam pertanian Indonesia, misalnya memperberat beban petani yang mengharuskan peningkatan efisiensi dalam produksi dan pemasaran.

4. **Kesadaran konsumen yang semakin meningkat** tentang ketersediaan pangan dalam hal kualitas dan kandungan gizinya guna memenuhi diet kesehatan.

5. **Bergabungnya para pembeli/konsumen hasil-hasil pertanian untuk meningkatkan kekuatan tawar-menawar mereka**. Perusahaan-perusahaan atau pedagang-pedagang yang membeli produk-produk pertanian menjadi lebih besar melalui perluasan dan penggabungan (amalgamasi) sehingga kontrol pasar menjadi lebih besar. Karena itu, para petani perlu berpengalaman dalam bernegosiasi, khususnya dengan pembeli-pembeli yang mempunyai posisi kuat dalam penentuan harga dan kualitas produksi, sedangkan para petani hanya menjadi penerima harga (price taker) sehingga yang menentukan harga adalah kaum pembeli dapat dihindari. Sebagai contoh, pabrik rokok di Indonesia sebagai konsumen tembakau dan cengkeh bergabung dalam GAPPRI.

G. Pertanyaan

1) Sebutkan beberapa kesenjangan (gap) antara sektor produksi dan konsumsi yang dapat dijembatani oleh kegiatan tataniaga!
2) Bagaimana tataniaga dapat menciptakan 4 macam kegunaan bagi suatu komoditas yang diperdagangkan? Jelaskan!
3) Apa yang menjadi penyebab timbulnya kesadaran baru di beberapa Negara berkembang untuk lebih memperhatikan lagi aspek tataniaga pertanian? Jelaskan!
4) Jelaskan apa yang dimaksud dengan pernyataan-pernyataan berikut ini:
   a) kebutuhan (needs) dan keinginan (wants)
   b) tataniaga dapat menciptakan kegunaan bentuk
   c) penjualan (selling)
   d) distribusi di atas, kerjakanlah latihan beriku



BAB - X

KARAKTERISTIK PRODUKSI DAN PRODUK PERTANIAN

Tujuan Intruksional

1. Memahami karakteristik Produksi
2. Memahami Produksi Bersifat Musiman
3. Memahami Produksi Bersifat Specifik Lokal dan Kondisonal
4. Memahami Adanya Variasi Biaya

A. Karakteristik Produksi

Hal yang terbaik untuk mempelajari tataniaga pada bidang pertanian sebagai titik tolak pertama ialah mengenal karakteristik umum kegiatan produksi dan sifat-sifat produk pertanian serta membedakannya dari sektor lain. Sebagian besar dari perbedaan ini berasal dari sifat pertanian pada negara-negara yang berpendapatan rendah (negara-negara berkembang).

Secara umum, karakteristik produksi pertanian, meliputi produksi bersifat musiman, produksi bersifat spesifik lokasi dan kondisional, desentralisasi pengambilan keputusan berproduksi oleh ribuan keluarga petani, ketidakpastian cuaca dan harga dalam berbagai bentuk, pemusatan produksi secara geografis, adanya

variasi biaya produksi, dan produksi pertanian sangat dipengaruhi oleh industri input pertanian (farm supply industry).

Produk-produk pertanian sekurang-kurangnya memiliki 5 karakteristik/ sifat penting, yaitu produk pertanian sebagian besar berupa bahan mentah/baku (raw material), produk-produk bersifat menguah (bulky/ voluminous), produk-produk mudah rusak/busuk (perishable), kualitas produknya lebih beragam, dan produk-produk khususnya bahan pangan dikonsumsi secara stabil sepanjang tahun. Karakteristik produksi dan produk pertanian secara terinci akan dikemukakan berikut ini.

B. Produksi Bersifat Musiman

Mungkin kita semua telah mengetahui bahwa tidak semua jenis tanaman hasilnya dapat dijumpai di pasar sepanjang tahun secara terus-menerus. Umumnya hasil terbanyak dijumpai pada waktu-waktu atau musim-musim tertentu. Musim tersebut berkaitan dengan iklim dan cuaca yang berpengaruh kuat kepada pertumbuhan dan produksi tanaman yang dibudidayakan. Tanaman bahan makanan pokok, seperti padi dan jagung merupakan tanaman semusim (annual crops) sehingga waktu panennya pun tertentu. Musim utama (penawaran tinggi) dari padi sawah, misalnya adalah antara bulan Maret sampai dengan bulan Mei, jagung pada bulan Desember sampai dengan Maret, cabe merah (lombok) di Brebes saat penawaran tinggi pada bulan Juni sampai dengan November, sedangkan penawaran rendah pada bulan Desember sampai dengan April.

Sebuah contoh lain dari pengaruh musim terhadap produksi tanaman di Indonesia, yaitu sangat dirasakan bila kita ingin

memakan buah-buahan. Buah mangga tak akan dapat dijumpai pada permulaan tahun, tetapi hanya didapatkan banyak dari bulan Agustus sampai dengan bulan November. Sebaliknya, buah duku banyak terdapat di pasar dari bulan Februari sampai dengan April. Buah durian banyak terdapat dari bulan Oktober sampai dengan Februari. Tanaman buah-buahan yang memberi hasil sepanjang tahun ialah nenas, nangka, pepaya, pisang, dan sirsak. Buah-buahan yang dihasilkan hampir sepanjang tahun ialah sawo, salak, avokad, jambu biji, dan cempedak; sedangkan yang menghasilkan menurut musim, tetapi berbuah dari tahun ke tahun ialah durian, duku, manggis, rambutan, jeruk siam, jeruk keprok, jeruk manis, jeruk besar, dan jeruk nipis. Tanaman buah-buahan yang menghasilkan menurut musim, tetapi dengan selingan yang terbatas, misalnya mangga dan kesemek.

C. Produksi Bersifat Specifik Lokal dan Kondisonal

Pemusatan produksi secara geografis. Tidak semua komoditas pertanian dapat tumbuh baik pada suatu tempat/lokasi atau dengan perkataan lain suatu lokasi pertanian tertentu biasanya hanya cocok untuk ditanami oleh beberapa komoditas pertanian. Hal ini berkaitan dengan perbedaan agroklimat dan tanah. Perbedaan dalam iklim dan tanah mengakibatkan timbulnya tanaman yang berbeda-beda yang telah menyesuaikan diri pada perbedaan-perbedaan dalam keadaan lingkungan setempat.

Untuk jenis tanaman tertentu biasanya membutuhkan persyaratan tumbuh yang tertentu pula agar dapat berproduksi dengan baik. Persyaratan iklim dan tanah untuk pertumbuhan tanaman bawang merah, misalnya berbeda dengan persyaratan untuk bawang putih walaupun keduanya sama-sama dari famili

Liliaceae. Bawang merah tumbuh baik pada iklim yang agak kering, suhu udara panas sehingga lokasi yang sesuai ialah dataran rendah.

Tanah yang dikehendaki adalah subur, gembur, dan aerasi baik, pH 5,5–6,5. Umumnya tanah yang cocok untuk bawang merah adalah lempung berpasir, sedangkan bawang putih lebih cocok ditanam di dataran tinggi (lebih dari 600 m dari permukaan laut), beriklim sejuk dan kering. Tanah yang dikehendaki adalah lempung berdebu, pH 6,5–7,0 drainase dan aerasi baik.

Karakteristik inilah yang menyebabkan kita mengenal adanya daerah surplus (kelebihan) dan daerah defisit (kekurangan) untuk suatu komoditas pertanian tertentu. Brebes, Tegal, dan Lombok Timur adalah daerah surplus (produsen utama) untuk bawang merah, sedangkan Ciwidey (Kabupaten Bandung) dan Sembalun (NTB) adalah produsen utama bawang putih. Pontianak (Kalimantan Barat) terkenal dengan jeruknya, Pengalengan dengan teh kualitas tingginya, Gayo dengan kopinya, Kabupaten Karawang dengan berasnya dan seterusnya.

Adanya daerah surplus produksi dan daerah defisit produksi atau adanya spesialisasi produksi secara geografis itulah yang menimbulkan adanya perdagangan antardaerah. Spesialisasi geografis dapat berubah dari waktu ke waktu, khususnya dengan adanya kemajuan teknologi budidaya. Sistem tataniaga harus dapat menyesuaikan terhadap pola produksi secara geografis yang berubah tersebut.

D. Adanya Variasi Biaya

Tidak ada biaya produksi tunggal untuk semua petani. Biaya produksi pertanian dipengaruhi oleh iklim, teknologi, ukuran usahatani dan keterampilan manajemen dari seorang petani.

Akibatnya, biaya produksi suatu komoditas pertanian sangat bervariasi antardaerah dan antarpetani. Sampai pada suatu ukuran usahatani, semakin rendah biaya rata-rata titik tertentu semakin besar, ini disebut adanya penghematan karena skala (economies of size). Penghematan skala dalam tataniaga lebih penting daripada penghematan skala dalam produksi untuk usahatani besar.

Variabilitas dalam biaya produksi terjadi karena dua alasan, yaitu (1) petani menerima harga yang sama untuk suatu produk, sedangkan biaya dapat berbeda maka ada suatu variasi yang lebar dalam keuntungan dan penerimaan usahatani sebagai akibat keterampilan pengelolaan yang dilakukan petani; dan (2) pada suatu saat dan pada beberapa tingkat harga terdapat petani yang tidak memperoleh keuntungan, tetapi juga tidak sampai rugi (impas) atau terdapat petani yang untung dan beberapa yang lain justru rugi.

1. Produksi Sangat Dipengaruhi Oleh Industri Input Pertanian

Industri pemasok usahatani menyediakan input-input, seperti pupuk, pestisida, benih, mesin-mesin, modal, tenaga kerja, lahan, dan seterusnya. Input-input ini dapat disediakan oleh usahatani sendiri atau membelinya dari perusahaan pemasok input (misalnya PUSRI, United Tractor, Kubota dan seterusnya). Pertumbuhan dan pentingnya sektor industri input mem-pengaruhi petani dalam beberapa cara, sebab telah menambah pasar lain bagi petani untuk beroperasi.

Pendapatan usahatani dapat ditingkatkan dengan keterampilan menjual komoditas usahatani. Pasar input usahatani juga telah menyumbang banyak keuntungan dalam efisiensi pertanian dewasa ini, khususnya dalam industri pupuk dan mesin-mesin pertanian. Pasar modal usahatani seperti BRI telah membiayai kredit

usahatani untuk membiayai sarana produksi pertanian dalam rangka intensifikasi usahatani. Secara keseluruhan, ketergantungan yang meningkat atas input-input telah mengurangi kemandirian para petani dan mempertalikan kesejahteraan ekonominya secara langsung dengan perekonomian di luar usahatani.

2. Karateritik Produk

1. Produk Pertanian sebagian Besar berupa Bahan Mentah/Baku

   Output pertanian umumnya berbentuk bahan mentah yang dapat diolah lebih lanjut. Pengolahan ini bisa sederhana, misalnya dari ubi kayu segar menjadi gaplek atau dari buah kelapa gelondongan menjadi kopra. Akan tetapi, bisa juga sangat kompleks, misalnya dari buah nenas segar menjadi sirup nenas atau jam atau dari buah kakao menjadi permen cokelat atau pasta. Namun, bagaimanapun rumitnya produk yang dijual oleh petani segera kehilangan jati dirinya (identitas) sebagai suatu produk usahatani karena telah berubah menjadi produk agroindustri (industri yang menggunakan hasil-hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya).

2. Produk Pertanian Bersifat Meruah (Bulky) dalam Hubungan dengan Nilainya

   Umumnya hasil pertanian itu merupakan barang bulk, artinya ia memerlukan ruangan yang luas, sedangkan nilainya (yang menempati ruang tersebut) kurang sepadan. Bulk mempengaruhi fungsi-fungsi tataniaga yang berkaitan dengan penanganan fisik, seperti pengangkutan dan penyimpanan. Untuk melindungi buah-buahan

dari kerusakan fisik, misalnya peti kemas yang lebih besar dibutuhkan. Di antara produk-produk pertanian sendiri terdapat perbedaan yang cukup besar dalam hal penghargaan nilainya, misalnya dua buah truk yang persis sama, yang satu dimuati dengan apel manalagi dan yang lainnya dimuati dengan kubis. Jika biaya angkut dianggap sama maka jelas mengangkut apel lebih menguntungkan dibandingkan dengan mengangkut kubis. Dengan perkataan lain, nilai apel jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kubis.

Contoh selanjutnya dapat dibuat untuk membandingkannya dengan produk-produk industri. Misalnya, truk yang mengangkut obat-obatan dianggap lebih bernilai dibandingkan dengan truk sama yang mengangkut padi. Menggunakan alat angkut kereta api atau kapal laut, acap kali didasarkan atas luasnya ruangan yang dipakai. Faktor inilah, antara lain menyebabkan orang-orang pada zaman abad ke-18 melakukan perdagangan internasional terutama untuk hal-hal pertanian yang bersifat mewah (lux), yang tinggi harganya, seperti rempah-rempah dan tanaman obat-obatan.

Baru setelah ditemukannya berbagai teknik yang berkaitan dengan perbaikan sarana dan prasarana angkutan, orang dapat memperdagangkan hasil pertaniannya secara lebih luas. Meskipun demikian, pada dasarnya kegiatan pengangkutan dan penyimpanan hasil-hasil pertanian memerlukan ruangan yang luas dan ongkos angkut yang lebih tinggi dibandingkan produk-produk nonpertanian.

3. Hasil Pertanian Umumnya Mudah Rusak (*Perishable*) dan Tidak Tahan Lama (*Undurable*)

   Umumnya hasil pertanian itu lekas menjadi busuk atau rusak dan tidak dapat tahan terlalu lama. Produk-produk hortikultura seperti buah-buahan dan sayuran adalah hasil pertanian yang mudah menjadi busuk atau rusak dan tidak dapat disimpan terlampau lama dalam keadaan yang segar (fresh). Produk-produk demikian harus segera dijual, kalau tidak petani sendiri akan rugi.

   Memang ada juga beberapa jenis hasil pertanian yang tidak cepat menjadi busuk atau rusak, akan tetapi jumlahnya tidak banyak dan waktu penyimpanannya juga tidak terlampau lama. Padi (gabah), misalnya dapat disimpan hingga beberapa tahun dan relatif tanpa mengalami susut mutu dan kuantitas yang terlalu besar, akan tetapi apabila disimpan dalam bentuk beras situasinya lain.

   Sifat mudah rusak dan tidak tahan disimpan lama mempunyai pengaruh kuat atas tataniaga produk tersebut. Sebagai suatu contoh yang sering kita temui di lapangan, misalnya ketika kita menyaksikan seorang petani menjual tomatnya dengan harga yang sangat rendah. Keputusan demikian terpaksa ia ambil dengan pertimbangan yang sederhana, yaitu daripada menunggu produk tersebut menjadi busuk karena menunggu harga tinggi yang kemungkinan besar tidak akan ada yang membelinya, lebih baik ia menjualnya segera. Karakteristik produk yang demikian berimplikasi pada perlunya tersedia fasilitas-fasilitas pemasaran. Bulky, plus produksi yang berubah-ubah membutuhkan fasilitas penyimpanan yang besar.

   Produk-produk yang mudah rusak membutuhkan penanganan cepat dan sering kali menggunakan lemari pendingin khusus.

Pengendalian kualitas sering menjadi masalah yang real dan kritis. Untuk menanggulangi keadaan demikian sudah dicoba berbagai usaha, antara lain dengan memperkenalkan berbagai teknologi pasca panen kepada petani.

4. Kualitas Produknya lebih Beragam

Kualitas atas mutu produk pertanian sangat dipengaruhi keadaan iklim dan cuaca. Pada keadaan iklim/cuaca baik biasanya kualitas produk baik, dan sebaliknya. Adanya variasi dalam kualitas sebagai akibat perubahan cuaca sering kali menyulitkan dalam proses standardisasi. Variasi kualitas juga dapat mengubah pola tataniaga meskipun kualitas bervariasi dan produk pertanian umumnya homogen. Ini berarti secara keseluruhan, para pembeli mempunyai alasan kecil untuk lebih menyukai produk seorang petani daripada produk petani lainnya. Sebagai akibatnya, masing-masing petani menerima harga yang kira-kira sama untuk kualitas produk yang sama.

5. Produk-produk Pertanian Dikonsumsi secara Stabil Sepanjang Tahun

Konsumsi hasil pertanian, khususnya yang berupa bahan makanan, relatif stabil sepanjang tahun. Hal ini ditunjukkan oleh elastisitas permintaan atas harga dan pendapatan yang umumnya rendah (inelastis). Sifat demikian ini apabila dikaitkan dengan sifat produksinya yang musiman dan jumlahnya yang tidak berketentuan karena dipengaruhi cuaca, ada tidaknya hama dan penyakit, menimbulkan masalah dalam penyimpanan dan pembiayaan.

E. Pertanyaan

1) Bagaimana karakteristik produksi pertanian yang bersifat musiman dan spesifik lokasi berpengaruh terhadap harga-harga produk tersebut? Jelaskan!
2) Bagaimana sifat produk pertanian yang mudah rusak dan kurang tahan disimpan lama berpengaruh kuat atas tataniaga produk tersebut? Jelaskan!
3) Jelaskan kaitan antara keadaan cuaca, yang berpengaruh atas produksi pertanian, dengan kemampuan merencanakan usahatani dari seorang petani!
4) Apa yang dimaksud dengan istilah atau pernyataan-pernyataan berikut ini?
   a) Umumnya hasil pertanian itu bersifat bulky
   b) Spesialisasi geografis
   c) Ukuran usahatani berkaitan erat dengan besarnya biaya produksi
   d) Kualitas produk pertanian pada umumnya tidak stabil



BAB - XI

PEMBANGUNAN PERTANIAN

Tujuan Intruksional

1. Memahami teori Pembangunan
2. Memahami kebijakan-kebijakan pembangunan pertanian
3. Memahami kebijakan pertanian terkait insentif produksi

A. Teori Pembangunan

Selama seperdua abad terakhir, teori pembangunan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terkait dengan perhatian para ahli terhadap masalah pembangunan, khususnya terhadap pembangunan di negara-negara berkembang yang sangat besar. Jumlah teori yang membahas pembangunan yang sangat banyak dan beragam dengan perspektif yang berbeda-beda pula maka untuk membantu memudahkan memahaminya maka teori-teori ini bisa dikelompokkan dalam beberapa perspektif atau paradigma.

Suwarsono dan So (1991) dalam mengurai sejumlah teori ini mengelompokkannya berdasarkan tiga perspektif, yaitu perspektif modernisasi, dependensi, dan sistem dunia. Sementara dengan cara yang hampir sama, Budiman (1995) mengklasifikasikan teori pembangunan juga dalam tiga kelompok, yaitu teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori pasca ketergantungan.

Pembahasan dalam bagian ini terutama mengacu pada pengelompokan yang dibuat Budiman. Pemahaman terhadap ketiga kelompok teori ini, meskipun yang dibahas hanya teori-teori penting saja, diharapkan dapat membantu Anda dalam mengetahui persoalan pembangunan dan jawaban untuk memecahkannya. Bahkan mungkin Anda dapat ikut berpikir dan merumuskan jawaban baru yang lebih baik. Tetapi minimal, uraian ini dapat membantu dalam membuat skema atau peta teori pembangunan yang pernah ada.

Kelompok teori modernisasi terutama menekankan pada faktor manusia dan nilai-nilai budaya sebagai pokok persoalan dalam pembangunan. Berbeda dengankelompok teori modernisasi, kelompok teori ketergantungan merupakan reaksi terhadap teori modernisasi yang dianggap tidak mencukupi, bahkan dianggapnya menyesatkan. Ketiga,kelompok yang disebut sebagai teori pasca ketergantungan. Kelompok teori ini merupakan reaksi atau menolak teori ketergantungan yang dianggap terlalu menyederhanakan persoalan, padahal dalam kenyataannya gejala pembangunan khususnya di negara-negara sedang berkembang jauh lebih kompleks.

1. Kelompok Teori Modernisasi

Perangkat teori modernisasi berasal dari konsep teori evolusi yang menganggap perubahan sosial pada dasarnya merupakan gerakan searah, linear, progresif dan perlahan-lahan, yang mengubah masyarakat dari tahapan primitif ke tahapan yang lebih maju, dan membuat berbagai masyarakat memiliki bentuk dan struktur serupa (Suwarsono dan So, 1991).

Berdasarkan premis seperti ini, mengutip Huntington, Suwarsono dan So mengemukakan bahwa teoritis perspektif modernisasi membangun kerangka teori dan tesisnya dengan ciri-ciri pokok:

1. Modernisasi merupakan proses bertahap. Hal itu misalnya terlihat antara lain dalam teori Rostow.
2. Modernisasi merupakan proses homogenisasi. Jadi, dengan modernisasi akan terbentuk berbagai masyarakat dengan tendensi dan struktur serupa.
3. Modernisasi terkadang mewujud dalam bentuk lahirnya sebagai proses Eropanisasi dan Amerikanisasi, atau dengan kata lain modernisasi sama dengan Barat.
4. Modernisasi dilihat sebagai proses yang tidak bergerak mundur.
5. Modernisasi merupakan perubahan progresif. Dengan demikian, modernisasi tidak saja merupakan sesuatu yang pasti terjadi, tetapi juga diperlukan dan diinginkan.
6. Modernisasi memerlukan waktu panjang (evolusioner).

Selain teori evolusi, perangkat asumsi lain teori modernisasi adalah teori fungsional. Suwarsono dan So menjelaskan bahwa teori fungsional memberikan tekanan pada keterkaitan dan ketergantungan lembaga sosial, pentingnya variabel kebakuan dan pengukur dalam sistem budaya, dan adanya kepastian keseimbangan dinamis-stasioner dari perubahan sosial. Terpengaruh oleh teori ini, ajaran modernisasi secara implisit mengandung sejumlah asumsi berikut.

1. Modernisasi merupakan proses sistematik, yang melibatkan perubahan pada hampir segala aspek tingkah laku sosial, termasuk di dalamnya industrialisasi, urbanisasi, diferensiasi, dan sebagainya.
2. Modernisasi diartikan sebagai proses transformasi, di mana struktur dan nilai-nilai tradisionalsecara total harus diganti dengan seperangkat struktur dan nilai-nilai modern.

3. Melibatkan proses yang terus-menerus (immanent).

Berbagai teori yang termasuk dalam kelompok Teori Modernisasi, seperti Teori Max Weber tentang Etika Protestan, Teori David McClelland tentang Dorongan Berprestasi, dan sebagainya, namun pada uraian berikut ini hanya dijelaskan tiga teori modernisasi, yaitu Teori Neil Smelser tentang Diferensiasi Struktural, Teori Harrod-Domar tentang tabungan serta investasi, dan Teori Rostow tentang tahap-tahap pembangunan.

1) Teori Neil Smelser tentang Diferensiasi Struktural

Modernisasi menurut Wilbert Moore ialah suatu transformasi secara menyeluruh masyarakat tradisional atau masyarakat pramodern yang corak teknologi serta organisasi sosialnya berkaitan seperti apa yang terdapat di negara-negara Dunia Barat yang maju -makmur dari segi ekonomi dan secara relatif stabil dari segi politik (Long, 1987).

Salah satu teori yang dapat menggambarkan proses modernisasi tersebut adalah teori Neil Smelser tentang "diferensiasi struktural". Menurut Smelser perkembangan ekonomi dan masyarakat itu mempunyai (sebagai ciri utama) struktur yang sangat berbeda, manakala perekonomian dan masyarakat terbelakang pun secara relatif tidak berbeda jauh. Perubahan bagi Smelser, berkisar di sekitar proses itu. Dengan diferensiasi, Smelser mengartikan bahwa proses sama halnya sebagaimana unit-unit sosial yang khusus dan berotonomi itu dibentuk. Pembentukan unit-unit sosial seperti ini tampaknya sama dengan yang berlaku di dalam beberapa bidang yang berbeda; dalam bidang ekonomi, keluarga, sistem politik dan institusi-institusi politik.

Model Smelser ini tidak terlibat dalam usaha untuk mengisolasi faktor penentu ekonomi, tetapi sebaliknya merupakan suatu usaha untuk memberikan transformasi sosial yang mengikuti pembangunan ekonomi, dan ditegaskannya sebagaimana halnya dengan Lewis, sebagai pertumbuhan outputsetiap individu dari kelompok masyarakat. Pembangunan ekonomi berlangsung melalui:

a. modernisasi teknologi, membawa perubahan dari teknik-teknik tradisional kepada aplikasi ilmu pengetahuan;
b. pertanian komersial yang bercirikan pergeseran dari pertanian subsistemmenuju pertanian untuk ekspor, mengadakan spesialisasi terhadap produksi yang akan diperdagangkan, dan menggiatkan buruh upahan;
c. proses industrialisasi yang menggambarkan transisi dari penggunaan kekuatan hewan dan manusia menuju penggunaan tenaga mesin, dan akhirnya;
d. urbanisasi yang meliputi perubahan-perubahan dimensi ekologi dan pergerakan pertanian dan perkampungan ke arah pertumbuhan pusat-pusat kota.

Proses-proses tersebut menurut Smelser, berlaku secara serentak dan kadang-kadang dalam kecepatan yang berbeda. Misalnya, dalam beberapa situasi kolonial, pertanian menjadi komersial tanpa disertai oleh industrialisasi, atau industrialisasi berkembang hanya dengan urbanisasi yang sedikit saja. Smelser mengakui bahwa perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam keadaan pramodern dan struktur-struktur tradisional mungkin mempengaruhi kekuatan modernisasi atas suatu sistem sosial tertentu (dengan itu variasi ke arah perubahan), ia menegaskan bahwa contoh model akan menggambarkan

sifat-sifat umum, ciri-ideal-tipikal dan proses pembangunan sosial itu sendiri.

2) Teori Harrod-Domar tentang Tabungan danInvestasi

Budiman (1995) mengemukakan bahwa salah satu teori ekonomi pembangunan yang sampai sekarang masih terus dipakai, meskipun sudah dikembangkan secara lebih canggih, adalah teori dari Evsey Domar dan Roy Harrod. Kedua ahli ekonomi ini, yang bekerjasecara terpisah, mencapai kesimpulan yang sama, yakni bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga akan rendah.

Asumsi model Harrod-Domar bahwa masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah penambahan investasi modal. Masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Kalau ada modal, modal itu diinvestasikan, hasilnya adalah pembangunan ekonomi. Berdasarkan pada model ini, resep para ahli ekonomi pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga untuk memecahkan persoalan keterbelakangannya adalah dengan mencari tambahan modal, baik dari dalam negeri (dengan mengusahakan peningkatan tabungan dalam negeri), maupun dari luar negeri (melalui penanaman modal dan pinjaman luar negeri).

3) Teori W.W. Rostow tentang Lima Tahap Pembangunan

Dalam bukunya yang terkenal, The Stages of Economic Growth, A Non-Communist Manifestoyang mula-mula terbit pada tahun 1960, Rostow (seorang ahli ekonomi) menguraikan teorinya

tentang proses pembangunan dalam sebuah masyarakat. Seperti juga para ahli ekonomiumumnya pada zaman itu, bagi Rostow pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju. Proses ini, dengan berbagai variasinya, pada dasarnya berlangsung sama di mana pun dankapan pun juga. Variasi yang ada bukanlah merupakan perubahan yang mendasar dari proses ini, melainkan hanya berlangsung di permukaan saja.

Rostow membagi proses pembangunan menjadi lima tahap, seperti dijelaskan oleh Budiman (1995) sebagai berikut.

a. Masyarakat tradisional

   Ilmu pengetahuan pada masyarakat ini masih belum banyak dikuasai. Karena itu, masyarakat semacam ini masih dikuasai oleh kepercayaan-kepercayaan tentang kekuatan di luar kekuasaan manusia. Manusia dengan demikian tunduk kepada alam, belum bisa menguasai alam. Akibatnya, produksi masih sangat terbatas. Masyarakat ini cenderung bersifat statis, dalam arti kemajuan berjalan dengan sangat lambat. Produksi dipakai untuk konsumsi. Tidak ada investasi. Pola dan tingkat kehidupan generasi kedua pada umumnya hampir sama dengan kehidupan generasi sebelumnya (mengalami sedikit perubahan).

b. Prakondisi untuk lepas landas

   Masyarakat tradisional, meskipun sangat lambat, terus bergerak. Pada suatu titik, dia mencapai posisi prakondisi untuk lepas landas. Biasanya, keadaan ini terjadi karena ada

campur tangan dari luar, dari masyarakat yang sudah lebih maju. Perubahan ini tidak datang karena faktor-faktor internal masyarakat tersebut, karena pada dasarnya masyarakat tradisional tidak mampu untuk mengubah dirinya sendiri. Campur tangan dari luar ini mengguncangkanmasyarakat tradisional itu. Di dalamnya mulai berkembang ide pembaruan. Ide-ide yang berkembang ini bukan sekedar pendapat yang menyatakan bahwa kemajuan ekonomi dapat dicapai, tetapi bahwa kemajuan ekonomi merupakan suatu kondisi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan lain yang dianggap baik; kebesaran bangsa, keuntungan pribadi, kemakmuran umum, atau kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka nantinya. Misalnya, seperti yang terjadi di Jepang dengan dibukanya masyarakat ini oleh armada angkatan laut Amerika Serikat.

Pada periode ini, usaha untuk meningkatkan tabungan masyarakat terjadi. Tabungan ini kemudian dipakai untuk melakukan investasi pada sektor-sektor produktif yang menguntungkan, termasuk misalnya pendidikan. Investasi ini dilakukan baik oleh perorangan maupun oleh negara. Sebuah negara nasional yang sentralistis juga terbentuk. Pendeknya, segala usaha untuk meningkatkan produksi mulai bergerak dalam periode ini.

Pada periode ini mulai tumbuh kaum usahawan, adanya perluasan pasar, pembangunan industri sehingga keadaan ini merupakan prakondisi untuk tahap berikutnya. Bahkan secara umum orang sependapat bahwa elit baru harus muncul dan harus diberi lapangan untuk memulai pembentukan suatu industri modern, karena golongan elit baru inilah yang menjadi inti dari terciptanya prasyarat-

prasyarat bagi take-off.

c. Lepas landas

Periode ini ditandai dengan tersingkirnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan merupakan sesuatu yang berjalan wajar, tanpa adanya hambatan yang berarti seperti ketika pada periode prakondisi untuk lepas landas.Pada periode ini, tabungan dan investasi yang efektif meningkat dari 5% menjadi 10% dari pendapatan nasional, atau lebih. Juga, industri-industri baru mulai berkembang dengan sangat pesat. Keuntungannya sebagian besar ditanamkan kembali ke pabrik yang baru. Sektor modern dari perekonomian dengan demikian jadi berkembang.

Dalam pertanian, teknik-teknik baru juga tumbuh. Pertanian menjadi usaha komersial untuk mencari keuntungan, dan bukan sekadar untuk konsumsi. Peningkatan dalam produktivitas pertanian merupakan sesuatu yang dalam proses lepas landas, karena proses modernisasi masyarakat membutuhkan hasil pertanian yang banyak, supaya ongkos perubahan ini tidak terlalu mahal.

Tahap lepas landas(take-off) merupakan tahap yang kritis, karena itu negara harus mampu secara otonom membangun struktur ekonomi nasional yang kuat. Rostow mengemukakan 3 cara yang dapat ditempuh, yaitu: (a) menggali/menambah investasi melalui kebijaksanaan pajak, (b) dana investasi dapat juga diperoleh melalui lembaga-lembaga keuangan, bank, pasar modal, obligasi pemerintah, dan sebagainya, dan (c) melalui perdagangan internasional.

Menurut Rostow titik terpenting dalam gerak kemajuan dari masyarakat yang satu ke yang lainnya adalah pada priode lepas landas. Oleh karena itu lepas landas harus memenuhi semua dari ketiga kondisi yang saling berkaitan berikut ini

1) Meningkatnya investasi di sektor produktif dari misalnya 5% menjadi 10% atau lebih dari pendapatan nasional.
2) Tumbuhnya satu atau lebih sektor industri manufaktur yang penting, dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi.
3) Adanya atau munculnya secara cepat lembaga-lembaga politik dan sosial yang bisa memanfaatkan berbagai dorongan gerak ekspansi dari sektor ekonomi modern dan akibat yang mungkin terjadi dengan adanya kekuatan-kekuatan ekonomi dari luar sebagai hasil dari lepas landas; di samping itu lembaga-lembaga ini kemudian bisa membuat pertumbuhan menjadi sebuah proses yang berkesinambungan.

d. Bergerak ke kedewasaan

Setelah lepas landas, akan terjadi proses kemajuan yang terus bergerak ke depan, meskipun kadang-kadang terjadi pasang surut. Antara 10% sampai 20% dari pendapatan nasional selalu diinvestasikan kembali, supaya bisa mengatasi persoalan pertambahan penduduk.Industri berkembang dengan pesat. Negara ini memantapkan posisinya dalam perekonomian global: barang-barang yang tadinya diimpor sekarang diproduksikan di dalam negeri;impor baru menjadi kebutuhan, sementara ekspor barang-barang baru

mengimbangi impor.

Sesudah 60 tahun sejak sebuah negara lepas landas (atau 40 tahun setelah periode lepas landas berakhir), tingkat kedewasaan biasanya tercapai. Perkembangan industri terjadi tidak saja meliputi teknik-teknik produksi, tetapi juga dalam aneka barang yang diproduksi. Yang diproduksikan bukan saja terbatas pada barang konsumsi, tetapi juga barang modal.

e. Zaman Konsumsi Massal yang Tinggi

Karena kenaikan pendapatan masyarakat, konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok untuk hidup, tetapi meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi. Produksi industri juga berubah, dari kebutuhan dasar menjadi kebutuhan barang konsumsi yang tahan lama.

Pada periode ini, investasi untuk meningkatkan produksi tidak lagi menjadi tujuan yang paling utama. Sesudah taraf kedewasaan dicapai, surplus ekonomi akibat proses politik yang terjadi dialokasikan untuk kesejahteraan sosial dan penambahan modal. Pada titik ini, pembangunan sudah merupakan sebuah proses yang berkesinambungan, yang bisamenopang kemajuan secara terus-menerus.

2. Kelompok Teori Ketergantungan

Pembangunan menurut teori ketergantungan digambarkan sebagai proses "keterbelakangan"atau proses pembangunan diberi label sebagai"ketergantungan"dalam pembangunan. Teori ketergantungan lebih memperhatikan sifat dari proses pertumbuhan ekonomi, dan memandang pembangunan sebagai pembebasan dari hubungan-

hubungan yang menindas dan eksploitatif, baik antarmanusia maupun antarbangsa.

Inti pemikiran teori ketergantungan seperti yang dikemukakan oleh Budiman (1995) didasarkan pada teori-teori imperialisme dan kolonialisme, baik yang Marxis maupun yang bukan, serta pemikiran Paul Baran dan Raul Prebisch. Teori ketergantungan kemudian menentang pendapat kaum Marxis klasik yang beranggapan bahwa (1) negara-negara pinggiran yang parakapitalis merupakan negara-negara yang tidak dinamis, yang memakai cara produksi Asia yang berlainan dengan cara produksi feodal di Eropa yang menghasilkan kapitalisme, dan (2) negara-negara pinggiran ini, setelah disentuh oleh kapitalis maju, akan bangun dan berkembang mengikuti jejak negara-negara kapitalis maju.

Andre Gunder Frank adalah salah seorang pencetus teori ketergantungan. Dalam konteks proses hubungan ekonomi antara negara maju dengan negara miskin, Frank membuat pembagian yaitu apa yang disebutnya dengan negara-negara metropolis maju (developed metropolitan countries)dan negara-negara satelit yang terbelakang (satellite underdeveloped countries). Hubungan ekonomi antara negara metropolis maju dan negara satelit yang terbelakang ini merupakan aspek utama perkembangan sistem kapitalis dalam skala internasional.

Menurut Frank, hubungan metropolis-satelit menyentuh keseluruhan sektor di negara-negara miskin, dan keterbelakangan sektor tradisional justru diakibatkan oleh adanya kontak dengan sistem kapitalis dunia yang masuk ke negara miskin melalui sektor modern di negara ini. Sektor modern merupakan kaki tangan sistem kapitalis dunia yang melakukan eksploitasi terhadap daerah atau sektor yang sekarang menjadi terbelakang. Frank tidak setuju pendapat yang mengatakan bahwa perkembangan ekonomi negara

miskin akan terjadi sebagai akibat hubungan ekonomi dengan negara maju. Hal ini didasarkan pada penemuan historis di Amerika Latin, yang memberi petunjuk bahwa perkembangan yang sehat dan otonom justru terjadi pada waktu hubungan metropolis-satelit ini tidak ada.

Dos Santos sebagai penganut teori ketergantungan yang lain memberikan definisi ketergantungan bahwa negara-negara pinggiran atau satelit pada dasarnya hanya merupakan bayangan dari negara-negara pusat metropolis. Bila negara pusat yang menjadi induknya berkembang, negara satelit bisa juga ikut berkembang. Bila negara induknya mengalami krisis, satelitnyapun kejangkitan krisis.

Definisi ini sebenarnya berbeda dengan konsep ketergantungan Frank. Bagi Frank, hubungan dengan negara metropolis selalu berakibat negatif bagi negara satelit. Tidak mungkin ada perkembangan di negara satelit, selama negara ini masih berhubungan dan menginduk kepada negara metropolis.

Dos Santos beranggapan lain. Dia menyatakan bahwa negara pinggiran atau satelit bisa juga berkembang, meskipun perkembangan ini merupakan perkembangan yang bergantung, perkembangan ikutan. Dinamika perkembangan ini tidak datang dari negara satelit tersebut, tetapi dari negara induknya. Dengan demikian, meskipun Frank dan Dos Santos merupakan tokoh dari teori ketergantungan, keduanya berbeda dalam beberapa hal.

Sumbangan Dos Santos yang lain adalah uraiannya yang lebih rinci tentang bentuk-bentuk ketergantungan. Dia membedakan tiga bentuk ketergantungan, yakni:

a. ***Ketergantungan Kolonial.*** Di sini terjadi dominasi politik, dalam bentuk penguasaan kolonial atau penjajah, dari negara pusat terhadap negara pinggiran. Kegiatan ekonomi

yang utama adalah perdagangan ekspor dari hasil bumi yang dibutuhkan oleh negara penjajah. Para penjajah memonopoli tanah, pertambangan dan tenaga kerja. Hubungan antara penjajah dan penduduk setempat bersifat eksploitatif.

b. **Ketergantungan finansial-industrial**.Di sini tidak ada dominasi politik dalam bentuk penjajahan. Negara pinggiran secara politis merdeka. Tetapi, dalam kenyataannya, negara pinggiran ini masih dikuasai oleh kekuatan-kekuatan finansial dan industrial dari negara pusatsehingga praktis ekonomi negara pinggiran merupakan satelit dari negara pusat. Seperti pada ketergantungan kolonial, negara pinggiran masih mengekspor bahan mentah bagi kebutuhan industri negara pusat. Negara pusat menanamkan modalnya, baik langsung atau melalui kerjasama dengan pengusaha lokal, untuk menghasilkan bahan baku ini. Dengan demikian, pengendalian dilakukan melalui kekuasaan ekonomi, dalam bentuk kekuasaan finansial-industrial.

c. **Ketergantungan teknologis-industrial.** Ini adalah bentuk ketergantungan baru. Kegiatan ekonomi di negara pinggiran tidak lagi berupa ekspor bahan mentah untuk keperluan industri di negara pusat. Perusahaan-perusahaan multinasional dari negara pusat mulai menanam modalnya dalam kegiatan industri yang produknya ditujukanke pasar dalam negeri dari negara-negara pinggiran. Meskipun industri ini ada di negara pinggiran, bahkan seringkali dimiliki oleh pengusaha lokal, tetapi teknologinya ada di tangan perusahaan-perusahaan multinasional. Seringkali

barang-barang modal berupa mesin industri yang ada tidak dijual sebagai komoditi, melainkan disewakan melalui perjanjian paten. Dengan demikian, penguasaan terhadap surplus industri dilakukan melalui monopoli teknologi-industrial

Klasifikasi ketergantungan yang dikemukakan oleh Dos Santos tersebut, semuanya merupakan ketergantungan sebagai suatu perangkat struktur, yaitu karena adanya perbedaan struktur internal antara negaramaju dengan negara terbelakangsehingga negara-negara terbelakang mengalami ketidakadilan dalam hubungan tersebut. Proses ketidakadilan ini sesungguhnya berasal dari dominasi negara-negara maju sebagai pemilik modal dalam menentukan kebijaksanaan investasinyasehingga investasi tersebut meskipun dirasakan positif oleh negara-negara sedang berkembang, tetap menimbulkan ketimpangan dalam perolehan nilai surplus yang masuk ke masing-masing negara. Nilai surplus ini biasanya lebih banyak yang mengalir ke negara investor daripada ke negara yang dibantu

B. Kebijakan-Kebijakan Pembangunan Pertanian

Secara makro, sejarah telah membuktikan bahwa pertanian telah memberikan surplus tenaga kerja, simpanan dan devisa negara yang mampu menyokong pertumbuhan sektor lain. Baik di negara maju maupun negara berkembang. Sektor ini juga mampu memberikan sumbangan yang besar pada perekonomian negara dan pertumbuhannya.

Hal ini karena pertumbuhan ekonomi sektor pertanian memiliki

multiplier effect(efek pengganda) yang lebih besar dibandingkan sektor lain. Beberapa studi menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang secara efektif mampu menurunkan kemiskinan baik di desa maupun di kota, meskipun keuntungan masyarakat yang secara ekonomi terbatas lebih rendah pada negara yang distribusi pendapatannya tidak merata.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan (terutama pembangunan pertanian) adalah rendahnya produktivitas dalam skala mikro, produksi total secara makro, dan kesejahteraan pelaku usaha pertanian itu sendiri.Dalam jangka pendek pembangunan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan, akan tetapi dalam jangka panjang tujuan pembangunan bertujuan memberikan kesetabilan harga pelaku usaha. Secara umum arah kebijakan pertanian adalah memberikan kepastian berlangsungnya usaha baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tentunya, kebijakan tersebut tidak terlepas dari perdagangan luar negeri.

Tujuan kebijakan pertanian mendasar tidak hanya meningkatkan produksi, akan tetapi hal yang lebih utama adalah pembangunan manusia, membantu mereka memenuhi kebutuhan dasarnya. Meningkatkan pendapatan keluarga pedesaan merupakan hal mendasar untuk mencapai tujuan tersebut, dan pada gilirannya menekankan pada peningkatan produktivitas dan memberikan harga pada tingkat petani yang tepat.

Perlu dipahami bersama bahwa kebijakan pertanian bukanlah suatu yang ekslusif, kebijakan yang terlepas dari kebijakan lainnya. Kebijakan pertanian untuk petani, terutama petani kecil, diarahkan bersifat inklusif. Sejarah mencatat bahwa keberhasilan kebijakan pertanian Indonesia sangat tergantung kondisi dasar kebutuhan petani. Paket pancausahatani yang dibungkus dengan program BIMAS (bimbingan massal) memberikan capaian yang relative

menggemberikan. Hal ini lebih dipengaruhi karena paket teknologi yang tanpa adanya pemberian kredit pendanaan (BIMAS) cenderung tidak diaplikasikan.

Selain itu, instrumen kebijakan pertanian merupakan hal yang tidak langsung dan lintas sektoral. Pengaturan harga output saja memberikan dampak yang lebih kecil dibandingkan denganpengaturan harga output dan harga input dalam bentuk rasio. Misalkan penetapan harga gabah saja tanpa mengatur harga pupuk memberikan dampak yang kurang berarti dibandingkan dengan pengaturan keduanya. Hal ini karena pupuk merupakan input penting dalam proses produksi.

Sekarang pemerintah tidak berperan langsung pada kegiatan produksi dan pemasaran akan tetapi lebih fokus untuk memastikan ketepatan fungsi faktor produksidan pasar produk di pedesaan termasuk pengembangan kelembagaan. Karenanya, kebijakan danperan legislasi (pembuatan peraturan) menjadi lebih penting.Dalam jangka panjang, ruang lingkup kebijakan pertanian diarahkan pada pertumbuhan pertanian. Ini merupakan yang perlu dikoreksi dari waktu ke waktu.

Kebijakan perlu diarahkan pada unsur-unsur ekonomi makro seperti kebijakan rasio harga output dan input, kebijakan pada pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusiatermasuk sumberdaya bersama dan sumberdaya publik seperti irigasi, kebijakan untuk mendapatkan akses input, pasar output, dan teknologi pertanian.

Untuk mencapai arah kebijakandalam jangka panjang, Norton (2004) memberikan prinsip-prinsip (strategi) antara lain:

- Keberlanjutan ekonomi (pendapatan). Strategi ini diarahkan untuk memberikan garansi pada pendapatan pelaku usaha (petani), artinya kebijakan tersebut memberikan pendapatan riel yang lebih besar dari waktu ke waktu.

- Keberlanjutan sosial (mengurangi kemiskinan), artinya strategi juga perlu diarahkan untuk menggapai masyarakat yang kurang beruntung misalnya petani marginal, dll.
- Keberlanjutan fiskal. Prinsip ini menggaris bawahi bahwa kemampuan fiscal pemerintah bersifat terbatas, karenanya perlu adanya penggalian sumberdana atau sumberdaya lain lain untuk mendanai program-program pemerintah.
- Keberlanjutan kelembagaan. Kelembagaan ini dimaksudkan untuk memunculkan kemandirian petani. Misalnya adanya institusi kredit yang memberikan kredit bergulir bagi petani. Dalam jangka panjang, jika institusi tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan (bergulir) maka tidak akan memberikan manfaat yang merata bagi keseluruhan anggota.
- Keberlanjutan lingkungan. Tentunya, strategi dalam jangka panjang harus memperhatikan factor ini. Misalnya, eksploitasi yang berlebihan pada sumberdaya airmenyebabkan jumlah air pada masa yang akan datang berkurang.

Lebih dari itu, Norton (2004) juga menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan pertanian merupakan suatu yang inklusif dan dapat diamati dalam jangka panjang. Beberapa peran lain yang secara tidak langsung berpengaruh pada kondisi pertanian adalah:

- Menyediakan barang public
- Menjelaskan dan memberikan perlindungan pada barang-barang tertentu
- Menjelaskan tentang perlunya kompetisi,
- Meningkatkan fungsi pasar melalui pengembangan regulasi dan kelembagaan
- Memberikan atau menyediakan asuransi sosial

- Menjaga stabilisasi ekonomi.

C. Kebijakan Pertanian Terkait Insentif Produksi

1. Pentingnya Kebijakan Harga Riel

Kebijakan harga ouput yang penetapannya telah memperhatikan berbagai biaya input dan kebutuhan hidup petani secara wajar. Karenanya harga yang diterima petani dianggap sudah mampu mencerminkan nilai tukar petani. Akan tetapi peningkatan harga tersebut ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan harga beras dunia yang dirasa memberatkan konsumen. Selain itu adanya bencana alam seperti el-nino yang menyebabkan kegagalan panen menyebabkan jumlah stokberas dalam negeri berkurang. Akibatnyaharga cenderung mengalami peningkatan.Karenanya kebijakan impor menjadi salah satu alternative solusi. Adanya impor beras menyebabkan polemik baik bagi birokrat, akademisi dan pengamat pemerhati pangan di Indonesia.

Selain itu kebijakan harga input menemukan banyak masalah terutama adanya rent seekeryang mengalihkan subsidi pupuk untuk komoditas pangan kepada komoditas selain pangan terutama perkebunan komersiil. Selain itu, subsidi tersebut lebih banyak dinikmati untuk masyarakat dengan luas kepemilikan lahan yang di atas rata-rata. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan kelangkaan pupuk di pasarm, dan bahkan cenderung hilang saat dibutuhkan. Sebenarnya di kalangan petani ada pendapat bahwa petani bersedia membeli pupuk dengan harga pasar (tanpa subsidi) asalkan ketersediaan di pasar (kios) memenuhi.

Pertanyaan menarik adalah apakah Negara-negara lain tidak memberlakukan baik kebijakan harga output maupun harga input?

Jawabannya adalah tidak. Negara-negara lainpun melakukan proteksi yang sama. Yang membedakan adalah adanya proteksi tersebut mampu menaikkan produksi total (termasuk produktivitasnya), sehingga mereka mampu melakukan ekspor karena produksi dalam negeri mampu menutupi kebutuhan dalam negeri.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya ratifikasi perdagangan dalam sebuah kawasan. Misalnyaadanya kawasan ekonomi ASEAN (MEA), adanya Asean Free Trade Agreement(AFTA) akan mengarahkan perdagangan dengan meminimalkan tariff atau bahkan menghilangkannya. Persetujuan ini akan mengarahkan kekompetitifanpengusahaan komoditas pertanian suatu negara. Secara global, tariff komoditas pertanian pengalamin penurunan dengan persentase yang lebih rendah dibandingkan komoditas non-pertanian.

Sebagai sebuah kesimpulan dapat disarikan bahwa tiga hal yang mempengaruhi harga pertanian riel adalah perkembangan permintaan dan penawaran dalam negeri, perkembangan harga riil internasional, keberadaan subsidi komoditas pertanian Negara-negara pengekspor. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan langsung yang mempengaruhi harga. Selain hal-hal tersebut, sebenanrnya terdapat kebijakan lain yang dapat meningkatkan kemampuan petani untuk meningkatkan nilai tukar (termasuk harga riil) antara lain kebijakan tentang infrastruktur pertanian termasuk di dalamnya adalah irigasi, kebijakan perkreditan pedesaan untuk penguatan modal petani, kebijakan penguasaan lahan, dan kebijakan fasilitasi pemasaran.

2. Kebijakan yang Dapat Meningkatkan Kemampuan Harga Riel Petani

Kebijakan ekonomi makro dapat mendukung pembanguan pemerintah melalui kombinasi beberapa kebijakan pemerintah, menjaga tingkat pertukaran kompetitif merupakan kebijakan yang powerful

yang tidak berpihak pada alokasi sumberdaya pada sektor produktif. Kebijakan pengontrolan harga semata akan menimbulkan polemic yang berkepanjangan terkait pengaturan posisi permintaan dan penawaran suatu komoditas. Karenanya, kebijakan makroekonomi dalam pembangunan pertanian perlu dikaitkan dengan reformasi kelembagaan dan struktur di pertanian, seperti pada kepemilikan lahan, manajemen air, system keuangan dan teknologi pertanian. Perubahan (reformasi) dalam bidang ini diharapkan dapat meningkatkan tefisiensi sektor-sektor dan dapat menurunkan kemiskinan.

Masalah kepemilikan lahan merupakan permasalahan yang rumit dan cenderung berkepanjangan. Kepemilikan lahan yang sempit, jumlah anggoata keluarga yang banyak, transformasi pertanian ke non pertanian yang kurang sukses, terkonsentrasinya kepemilikan lahan pada beberapa pemilik menyebabkan aturan yang diterbitkan pemerintah sulit diaplikasikan di lapangan. Keinginan pemerintah adalah pemerataan pendapatan petani melalui instrument-intrumen yang dimiliki baik keuangan maupun fisik.

Pemerataan kepemilikan lahan dengan mengakuisi kepemilikan lahan rakyat kepada kepemilikan pemerintah tidak hanya mengurangi kebebasan kepemilikan lahan, akan tetapi juga memunculkan permasalahan baru terkait permasalahan-permasalahan social yang muncul dengan system tersebut. Pemerintah dapat berupaya dalam mengurangi terkonsentrasinya kepemilikan lahandengan penetapan pajak tanah yang bersifat progresif. Selain itu pembatasan kepemilikan lahan hingga luasan tertentu diharapkan mampu memeratakan kepemilikan lahan.

Kebijakan lain yang dapat meningkatkan efisiensi pertanian adalah kebijakan bidang irigasi. Sejarah mencatat bahwa sejak masa pra-kolonial irigasi merupakan hal yang penting sebagai penunjang produksi pertanian. Pada awalnya sungai-sungai besar yang dibuat

tidak diarahkandigunakan untuk irigasi pertanian, akan tetapi lebih pada upaya menanggulangi banjir atau berfungsi sebagai pembuangan air. Pada masa colonial kebijakan irigasi diarahkan pada pembangunan waduk-waduk untuk mengairi perkebunan dan komoditas yang laku di pasaran dunia pada saat itu. Setelah kemerdekaan irigasi lebih banyak diarahkan pada komoditas pangan yang merupakan komoditas paling penting. Pembangunan sarana irigasi dilaksanakan dari waktu ke waktu dan secara berkesinambungan.

Pembangunan sarana infrastruktur irigasi membutuhkan biaya fiscal yang sangat besar.Selain itu, sumber-sumber air yang baru juga sudah mulai berkurang. Karenanya, kebijakan irigasi lebih diarahkan pada manajemen pemiliharaan saluran irigasi dibandingkan pembangunan waduk baru. Beberapa contoh manajemen air irigasi dapat meningkatkan efisiensi produksi dengan meningkatkan indeks pertanaman dalam sebuah hamparan.

Pertanian rakyat (pertanian yang diusahakan oleh rumah tangga tani) dengan kepemilikan lahan sempit biasanya terkendala dengan permodalan. Permodalan petani kecil biasnya inklusif dengan biaya hidupnya. Sehingga tidak jarang paket teknologi yang tidak dibarengi dengan paket pembiayaan akan terkendala dengan implementasinya. Sejarah mencatat bahwa keberhasilan program panca usahatani sangat terkait sekali dengan program bimbingan massal (BIMAS).

Saat itu pemerintah memberikan kredit dalam bentuk natura berupa paket kredit input pertanian termasuk bibit unggul, pupuk kimia (urea, TSP, ZA, dan lainnya). Program BIMAS tersebut terserap dengan baik oleh masyarakat. Namun, permasalahan terkait kredit tersebut adalah rendahnya pengembalian pinjaman. Hal inimengarahkan pemerintah untuk membuat paket program kredit yang dapat berdaya dengan sendirinya. Artinya, program

diarahkan pada keseimbangan antara penyediaan dana pinjaman dan serapan pinjaman tersebut.

Terakhir kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi adalah kebijakan penerapan teknologi. Teknologi merupakan salah satu yang dapat meningkatkan efisiensi termasuk meminimkan biaya produksi. Terdapat dua paket teknologi utama yaitu teknologi berbentuk biologi (termasuk kimia) dan teknologi fisik (termasuk peralatan pertanian).

Permasalahan utama terkait teknologi adalah upaya penciptakan teknologi tepat guna, dan kedua upaya aplikasi teknologi ke masyarakat(Hayami dan Ruttan, 1985). Untuk komoditas tertentu (misalnya padi), upaya penciptaan teknologi dapat dilakukan oleh pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Teknologi tersebut merupakan teknologi yang tepat guna sesuai dengan kondisi geografis di mana komoditas tersebut diusahakan. Untuk komoditas komersial, pencipataan bibit dapat dilakukan oleh swasta.

Empat kebijakan tersebut (kebijakan kepemilikan lahan, kebijakan manajemen irigasi, kebijakan kuangan, dan kebijakan teknologi) berisi peran pelaku usaha (produsen dan konsumen), pemerintah dan sistem kelembagaannya. Keseimbangan antara produsen dan konsumen tanpa peran pemerintah bisa jadi merupakan keseimbangan yang efisien, akan tetapi kondisi ini cenderung memunculkan konsentrasi kekayaan pada sekelompok modal. Karenanya, bagaimanapun, peran pemerintah diperlukan untuk mengatur interaksi produsen dan konsumen.

D. Pertanyaan

1) Jelaskan salah satu ciri dari teori-teori modernisasi dalam pembangunan!
2) Bandingkan antara tahap masyarakat tradisional dan tahap konsumsi massal yang tinggi, menurut Teori Rostow
3) Jelaskan perbedaan pandangan antara Andre Gunder Frank dan Dos Santos dalam melihat masalah keterbelakangan di negara-negara pinggiran (satelit)!
4) Jelaskan perbedaan pandangan antara teori artikulasi dan teori ketergantungan (terutama teori Andre Gunder Frank) dalam melihat persoalan keterbelakangan!Jelaskan terbagai berapa bidang UMKM yang ada di Indonesia dan sebutkan.

E. Daftar Pustaka

Hayami Y., dan V.W.Ruttan, 1985, Agricultural Development: An International Perspective,

Johns Hopkins University Press, Baltimore dan London.

Schultz T. W., 1977, Transforming Traditional Agriculture,

Muljana, 1987, Beberapa Pengertian dan Masalah mengenai Pembangunan Ekonomi dalam Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan, Editor: Hendra Esmara, Gramedia, Jakarta.

Norton, R.D., 2004, Agricultural Development Policy: Concept and Experiences, John Willey & Sons Ltd Publisher, West Susex



BAB - XII

PEMBANGUNAN PERTANIAN

Tujuan Intruksional

1. Memahami teori Pembangunan
2. Memahami kebijakan-kebijakan pembangunan pertanian
3. Memahami kebijakan pertanian terkait insentif produksi

A. Teori Pembangunan

Selama seperdua abad terakhir, teori pembangunan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terkait dengan perhatian para ahli terhadap masalah pembangunan, khususnya terhadap pembangunan di negara-negara berkembang yang sangat besar. Jumlah teori yang membahas pembangunan yang sangat banyak dan beragam dengan perspektif yang berbeda-beda pula maka untuk membantu memudahkan memahaminya maka teori-teori ini bisa dikelompokkan dalam beberapa perspektif atau paradigma.

Suwarsono dan So (1991) dalam mengurai sejumlah teori ini mengelompokkannya berdasarkan tiga perspektif, yaitu perspektif modernisasi, dependensi, dan sistem dunia. Sementara dengan cara yang hampir sama, Budiman (1995) mengklasifikasikan teori pembangunan juga dalam tiga kelompok, yaitu teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori pasca ketergantungan.

Pembahasan dalam bagian ini terutama mengacu pada pengelompokan yang dibuat Budiman. Pemahaman terhadap ketiga kelompok teori ini, meskipun yang dibahas hanya teori-teori penting saja, diharapkan dapat membantu Anda dalam mengetahui persoalan pembangunan dan jawaban untuk memecahkannya. Bahkan mungkin Anda dapat ikut berpikir dan merumuskan jawaban baru yang lebih baik. Tetapi minimal, uraian ini dapat membantu dalam membuat skema atau peta teori pembangunan yang pernah ada.

Kelompok teori modernisasi terutama menekankan pada faktor manusia dan nilai-nilai budaya sebagai pokok persoalan dalam pembangunan. Berbeda dengankelompok teori modernisasi, kelompok teori ketergantungan merupakan reaksi terhadap teori modernisasi yang dianggap tidak mencukupi, bahkan dianggapnya menyesatkan. Ketiga,kelompok yang disebut sebagai teori pasca ketergantungan. Kelompok teori ini merupakan reaksi atau menolak teori ketergantungan yang dianggap terlalu menyederhanakan persoalan, padahal dalam kenyataannya gejala pembangunan khususnya di negara-negara sedang berkembang jauh lebih kompleks.

1. Kelompok Teori Modernisasi

Perangkat teori modernisasi berasal dari konsep teori evolusi yang menganggap perubahan sosial pada dasarnya merupakan gerakan searah, linear, progresif dan perlahan-lahan, yang mengubah masyarakat dari tahapan primitif ke tahapan yang lebih maju, dan membuat berbagai masyarakat memiliki bentuk dan struktur serupa (Suwarsono dan So, 1991).

Berdasarkan premis seperti ini, mengutip Huntington, Suwarsono dan So mengemukakan bahwa teoritis perspektif modernisasi

membangun kerangka teori dan tesisnya dengan ciri-ciri pokok:

1. Modernisasi merupakan proses bertahap. Hal itu misalnya terlihat antara lain dalam teori Rostow.
2. Modernisasi merupakan proses homogenisasi. Jadi, dengan modernisasi akan terbentuk berbagai masyarakat dengan tendensi dan struktur serupa.
3. Modernisasi terkadang mewujud dalam bentuk lahirnya sebagai proses Eropanisasi dan Amerikanisasi, atau dengan kata lain modernisasi sama dengan Barat.
4. Modernisasi dilihat sebagai proses yang tidak bergerak mundur.
5. Modernisasi merupakan perubahan progresif. Dengan demikian, modernisasi tidak saja merupakan sesuatu yang pasti terjadi, tetapi juga diperlukan dan diinginkan.
6. Modernisasi memerlukan waktu panjang (evolusioner).

Selain teori evolusi, perangkat asumsi lain teori modernisasi adalah teori fungsional. Suwarsono dan So menjelaskan bahwa teori fungsional memberikan tekanan pada keterkaitan dan ketergantungan lembaga sosial, pentingnya variabel kebakuan dan pengukur dalam sistem budaya, dan adanya kepastian keseimbangan dinamis-stasioner dari perubahan sosial. Terpengaruh oleh teori ini, ajaran modernisasi secara implisit mengandung sejumlah asumsi berikut.

1. Modernisasi merupakan proses sistematik, yang melibatkan perubahan pada hampir segala aspek tingkah laku sosial, termasuk di dalamnya industrialisasi, urbanisasi, diferensiasi, dan sebagainya.

2. Modernisasi diartikan sebagai proses transformasi, di mana struktur dan nilai-nilai tradisionalsecara total harus diganti dengan seperangkat struktur dan nilai-nilai modern.
3. Melibatkan proses yang terus-menerus (immanent).

Berbagai teori yang termasuk dalam kelompok Teori Modernisasi, seperti Teori Max Weber tentang Etika Protestan, Teori David McClelland tentang Dorongan Berprestasi, dan sebagainya, namun pada uraian berikut ini hanya dijelaskan tiga teori modernisasi, yaitu Teori Neil Smelser tentang Diferensiasi Struktural, Teori Harrod-Domar tentang tabungan serta investasi, dan Teori Rostow tentang tahap-tahap pembangunan.

1) Teori Neil Smelser tentang Diferensiasi Struktural

Modernisasi menurut Wilbert Moore ialah suatu transformasi secara menyeluruh masyarakat tradisional atau masyarakat pramodern yang corak teknologi serta organisasi sosialnya berkaitan seperti apa yang terdapat di negara-negara Dunia Barat yang maju -makmur dari segi ekonomi dan secara relatif stabil dari segi politik (Long, 1987).

Salah satu teori yang dapat menggambarkan proses modernisasi tersebut adalah teori Neil Smelser tentang "diferensiasi struktural". Menurut Smelser perkembangan ekonomi dan masyarakat itu mempunyai (sebagai ciri utama) struktur yang sangat berbeda, manakala perekonomian dan masyarakat terbelakang pun secara relatif tidak berbeda jauh. Perubahan bagi Smelser, berkisar di sekitar proses itu. Dengan diferensiasi, Smelser mengartikan bahwa proses sama halnya sebagaimana unit-unit sosial yang khusus dan berotonomi itu dibentuk. Pembentukan

unit-unit sosial seperti ini tampaknya sama dengan yang berlaku di dalam beberapa bidang yang berbeda; dalam bidang ekonomi, keluarga, sistem politik dan institusi-institusi politik.

Model Smelser ini tidak terlibat dalam usaha untuk mengisolasi faktor penentu ekonomi, tetapi sebaliknya merupakan suatu usaha untuk memberikan transformasi sosial yang mengikuti pembangunan ekonomi, dan ditegaskannya sebagaimana halnya dengan Lewis, sebagai pertumbuhan outputsetiap individu dari kelompok masyarakat. Pembangunan ekonomi berlangsung melalui:

a. modernisasi teknologi, membawa perubahan dari teknik-teknik tradisional kepada aplikasi ilmu pengetahuan;
b. pertanian komersial yang bercirikan pergeseran dari pertanian subsistemmenuju pertanian untuk ekspor, mengadakan spesialisasi terhadap produksi yang akan diperdagangkan, dan menggiatkan buruh upahan;
c. proses industrialisasi yang menggambarkan transisi dari penggunaan kekuatan hewan dan manusia menuju penggunaan tenaga mesin, dan akhirnya;
d. urbanisasi yang meliputi perubahan-perubahan dimensi ekologi dan pergerakan pertanian dan perkampungan ke arah pertumbuhan pusat-pusat kota.

Proses-proses tersebut menurut Smelser, berlaku secara serentak dan kadang-kadang dalam kecepatan yang berbeda. Misalnya, dalam beberapa situasi kolonial, pertanian menjadi komersial tanpa disertai oleh industrialisasi, atau industrialisasi berkembang hanya dengan urbanisasi yang sedikit saja. Smelser mengakui bahwa perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam

keadaan pramodern dan struktur-struktur tradisional mungkin mempengaruhi kekuatan modernisasi atas suatu sistem sosial tertentu (dengan itu variasi ke arah perubahan), ia menegaskan bahwa contoh model akan menggambarkan sifat-sifat umum, ciri-ideal-tipikal dan proses pembangunan sosial itu sendiri.

2) Teori Harrod-Domar tentang Tabungan danInvestasi

Budiman (1995) mengemukakan bahwa salah satu teori ekonomi pembangunan yang sampai sekarang masih terus dipakai, meskipun sudah dikembangkan secara lebih canggih, adalah teori dari Evsey Domar dan Roy Harrod. Kedua ahli ekonomi ini, yang bekerjasecara terpisah, mencapai kesimpulan yang sama, yakni bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga akan rendah.

Asumsi model Harrod-Domar bahwa masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah penambahan investasi modal. Masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Kalau ada modal, modal itu diinvestasikan, hasilnya adalah pembangunan ekonomi. Berdasarkan pada model ini, resep para ahli ekonomi pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga untuk memecahkan persoalan keterbelakangannya adalah dengan mencari tambahan modal, baik dari dalam negeri (dengan mengusahakan peningkatan tabungan dalam negeri), maupun dari luar negeri (melalui penanaman modal dan pinjaman luar negeri).

3) Teori W.W. Rostow tentang Lima Tahap Pembangunan

Dalam bukunya yang terkenal, The Stages of Economic Growth, A Non-Communist Manifestoyang mula-mula terbit pada tahun 1960, Rostow (seorang ahli ekonomi) menguraikan teorinya tentang proses pembangunan dalam sebuah masyarakat. Seperti juga para ahli ekonomiumumnya pada zaman itu, bagi Rostow pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju. Proses ini, dengan berbagai variasinya, pada dasarnya berlangsung sama di mana pun dankapan pun juga. Variasi yang ada bukanlah merupakan perubahan yang mendasar dari proses ini, melainkan hanya berlangsung di permukaan saja.

Rostow membagi proses pembangunan menjadi lima tahap, seperti dijelaskan oleh Budiman (1995) sebagai berikut.

a. Masyarakat tradisional

   Ilmu pengetahuan pada masyarakat ini masih belum banyak dikuasai. Karena itu, masyarakat semacam ini masih dikuasai oleh kepercayaan-kepercayaan tentang kekuatan di luar kekuasaan manusia. Manusia dengan demikian tunduk kepada alam, belum bisa menguasai alam. Akibatnya, produksi masih sangat terbatas. Masyarakat ini cenderung bersifat statis, dalam arti kemajuan berjalan dengan sangat lambat. Produksi dipakai untuk konsumsi. Tidak ada investasi. Pola dan tingkat kehidupan generasi kedua pada umumnya hampir sama dengan kehidupan generasi sebelumnya (mengalami sedikit perubahan).

b. Prakondisi untuk lepas landas

Masyarakat tradisional, meskipun sangat lambat, terus bergerak. Pada suatu titik, dia mencapai posisi prakondisi untuk lepas landas. Biasanya, keadaan ini terjadi karena ada campur tangan dari luar, dari masyarakat yang sudah lebih maju. Perubahan ini tidak datang karena faktor-faktor internal masyarakat tersebut, karena pada dasarnya masyarakat tradisional tidak mampu untuk mengubah dirinya sendiri. Campur tangan dari luar ini mengguncangkanmasyarakat tradisional itu. Di dalamnya mulai berkembang ide pembaruan. Ide-ide yang berkembang ini bukan sekedar pendapat yang menyatakan bahwa kemajuan ekonomi dapat dicapai, tetapi bahwa kemajuan ekonomi merupakan suatu kondisi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan lain yang dianggap baik; kebesaran bangsa, keuntungan pribadi, kemakmuran umum, atau kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka nantinya. Misalnya, seperti yang terjadi di Jepang dengan dibukanya masyarakat ini oleh armada angkatan laut Amerika Serikat.

Pada periode ini, usaha untuk meningkatkan tabungan masyarakat terjadi. Tabungan ini kemudian dipakai untuk melakukan investasi pada sektor-sektor produktif yang menguntungkan, termasuk misalnya pendidikan. Investasi ini dilakukan baik oleh perorangan maupun oleh negara. Sebuah negara nasional yang sentralistis juga terbentuk. Pendeknya, segala usaha untuk meningkatkan produksi mulai bergerak dalam periode ini.

Pada periode ini mulai tumbuh kaum usahawan, adanya perluasan pasar, pembangunan industri sehingga keadaan ini merupakan prakondisi untuk tahap berikutnya. Bahkan

secara umum orang sependapat bahwa elit baru harus muncul dan harus diberi lapangan untuk memulai pembentukan suatu industri modern, karena golongan elit baru inilah yang menjadi inti dari terciptanya prasyarat-prasyarat bagi take-off.

c. Lepas landas

Periode ini ditandai dengan tersingkirnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan merupakan sesuatu yang berjalan wajar, tanpa adanya hambatan yang berarti seperti ketika pada periode prakondisi untuk lepas landas.Pada periode ini, tabungan dan investasi yang efektif meningkat dari 5% menjadi 10% dari pendapatan nasional, atau lebih. Juga, industri-industri baru mulai berkembang dengan sangat pesat. Keuntungannya sebagian besar ditanamkan kembali ke pabrik yang baru. Sektor modern dari perekonomian dengan demikian jadi berkembang.

Dalam pertanian, teknik-teknik baru juga tumbuh. Pertanian menjadi usaha komersial untuk mencari keuntungan, dan bukan sekadar untuk konsumsi. Peningkatan dalam produktivitas pertanian merupakan sesuatu yang dalam proses lepas landas, karena proses modernisasi masyarakat membutuhkan hasil pertanian yang banyak, supaya ongkos perubahan ini tidak terlalu mahal.

Tahap lepas landas(take-off) merupakan tahap yang kritis, karena itu negara harus mampu secara otonom membangun struktur ekonomi nasional yang kuat. Rostow mengemukakan 3 cara yang dapat ditempuh, yaitu: (a) menggali/menambah investasi melalui kebijaksanaan

pajak, (b) dana investasi dapat juga diperoleh melalui lembaga-lembaga keuangan, bank, pasar modal, obligasi pemerintah, dan sebagainya, dan (c) melalui perdagangan internasional.

Menurut Rostow titik terpenting dalam gerak kemajuan dari masyarakat yang satu ke yang lainnya adalah pada priode lepas landas. Oleh karena itu lepas landas harus memenuhi semua dari ketiga kondisi yang saling berkaitan berikut ini

1) Meningkatnya investasi di sektor produktif dari misalnya 5% menjadi 10% atau lebih dari pendapatan nasional.
2) Tumbuhnya satu atau lebih sektor industri manufaktur yang penting, dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi.
3) Adanya atau munculnya secara cepat lembaga-lembaga politik dan sosial yang bisa memanfaatkan berbagai dorongan gerak ekspansi dari sektor ekonomi modern dan akibat yang mungkin terjadi dengan adanya kekuatan-kekuatan ekonomi dari luar sebagai hasil dari lepas landas; di samping itu lembaga-lembaga ini kemudian bisa membuat pertumbuhan menjadi sebuah proses yang berkesinambungan.

d. Bergerak ke kedewasaan

Setelah lepas landas, akan terjadi proses kemajuan yang terus bergerak ke depan, meskipun kadang-kadang terjadi pasang surut. Antara 10% sampai 20% dari pendapatan nasional selalu diinvestasikan kembali, supaya bisa mengatasi persoalan pertambahan penduduk.Industri berkembang dengan pesat. Negara ini memantapkan posisinya dalam

perekonomian global: barang-barang yang tadinya diimpor sekarang diproduksikan di dalam negeri;impor baru menjadi kebutuhan, sementara ekspor barang-barang baru mengimbangi impor.

Sesudah 60 tahun sejak sebuah negara lepas landas (atau 40 tahun setelah periode lepas landas berakhir), tingkat kedewasaan biasanya tercapai. Perkembangan industri terjadi tidak saja meliputi teknik-teknik produksi, tetapi juga dalam aneka barang yang diproduksi. Yang diproduksikan bukan saja terbatas pada barang konsumsi, tetapi juga barang modal.

e. Zaman Konsumsi Massal yang Tinggi

Karena kenaikan pendapatan masyarakat, konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok untuk hidup, tetapi meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi. Produksi industri juga berubah, dari kebutuhan dasar menjadi kebutuhan barang konsumsi yang tahan lama.

Pada periode ini, investasi untuk meningkatkan produksi tidak lagi menjadi tujuan yang paling utama. Sesudah taraf kedewasaan dicapai, surplus ekonomi akibat proses politik yang terjadi dialokasikan untuk kesejahteraan sosial dan penambahan modal. Pada titik ini, pembangunan sudah merupakan sebuah proses yang berkesinambungan, yang bisamenopang kemajuan secara terus-menerus.

2. Kelompok Teori Ketergantungan

Pembangunan menurut teori ketergantungan digambarkan sebagai proses "keterbelakangan"atau proses pembangunan diberi label

sebagai"ketergantungan"dalam pembangunan. Teori ketergantungan lebih memperhatikan sifat dari proses pertumbuhan ekonomi, dan memandang pembangunan sebagai pembebasan dari hubungan-hubungan yang menindas dan eksploitatif, baik antarmanusia maupun antarbangsa.

Inti pemikiran teori ketergantungan seperti yang dikemukakan oleh Budiman (1995) didasarkan pada teori-teori imperialisme dan kolonialisme, baik yang Marxis maupun yang bukan, serta pemikiran Paul Baran dan Raul Prebisch. Teori ketergantungan kemudian menentang pendapat kaum Marxis klasik yang beranggapan bahwa (1) negara-negara pinggiran yang parakapitalis merupakan negara-negara yang tidak dinamis, yang memakai cara produksi Asia yang berlainan dengan cara produksi feodal di Eropa yang menghasilkan kapitalisme, dan (2) negara-negara pinggiran ini, setelah disentuh oleh kapitalis maju, akan bangun dan berkembang mengikuti jejak negara-negara kapitalis maju.

Andre Gunder Frank adalah salah seorang pencetus teori ketergantungan. Dalam konteks proses hubungan ekonomi antara negara maju dengan negara miskin, Frank membuat pembagian yaitu apa yang disebutnya dengan negara-negara metropolis maju (developed metropolitan countries)dan negara-negara satelit yang terbelakang (satellite underdeveloped countries). Hubungan ekonomi antara negara metropolis maju dan negara satelit yang terbelakang ini merupakan aspek utama perkembangan sistem kapitalis dalam skala internasional.

Menurut Frank, hubungan metropolis-satelit menyentuh keseluruhan sektor di negara-negara miskin, dan keterbelakangan sektor tradisional justru diakibatkan oleh adanya kontak dengan sistem kapitalis dunia yang masuk ke negara miskin melalui sektor modern di negara ini. Sektor modern merupakan kaki tangan

sistem kapitalis dunia yang melakukan eksploitasi terhadap daerah atau sektor yang sekarang menjadi terbelakang. Frank tidak setuju pendapat yang mengatakan bahwa perkembangan ekonomi negara miskin akan terjadi sebagai akibat hubungan ekonomi dengan negara maju. Hal ini didasarkan pada penemuan historis di Amerika Latin, yang memberi petunjuk bahwa perkembangan yang sehat dan otonom justru terjadi pada waktu hubungan metropolis-satelit ini tidak ada.

Dos Santos sebagai penganut teori ketergantungan yang lain memberikan definisi ketergantungan bahwa negara-negara pinggiran atau satelit pada dasarnya hanya merupakan bayangan dari negara-negara pusat metropolis. Bila negara pusat yang menjadi induknya berkembang, negara satelit bisa juga ikut berkembang. Bila negara induknya mengalami krisis, satelitnyapun kejangkitan krisis.

Definisi ini sebenarnya berbeda dengan konsep ketergantungan Frank. Bagi Frank, hubungan dengan negara metropolis selalu berakibat negatif bagi negara satelit. Tidak mungkin ada perkembangan di negara satelit, selama negara ini masih berhubungan dan menginduk kepada negara metropolis.

Dos Santos beranggapan lain. Dia menyatakan bahwa negara pinggiran atau satelit bisa juga berkembang, meskipun perkembangan ini merupakan perkembangan yang bergantung, perkembangan ikutan. Dinamika perkembangan ini tidak datang dari negara satelit tersebut, tetapi dari negara induknya. Dengan demikian, meskipun Frank dan Dos Santos merupakan tokoh dari teori ketergantungan, keduanya berbeda dalam beberapa hal.

Sumbangan Dos Santos yang lain adalah uraiannya yang lebih rinci tentang bentuk-bentuk ketergantungan. Dia membedakan tiga bentuk ketergantungan, yakni:

a. ***Ketergantungan Kolonial.*** Di sini terjadi dominasi politik, dalam bentuk penguasaan kolonial atau penjajah, dari negara pusat terhadap negara pinggiran. Kegiatan ekonomi yang utama adalah perdagangan ekspor dari hasil bumi yang dibutuhkan oleh negara penjajah. Para penjajah memonopoli tanah, pertambangan dan tenaga kerja. Hubungan antara penjajah dan penduduk setempat bersifat eksploitatif.

b. **Ketergantungan finansial-industrial**.Di sini tidak ada dominasi politik dalam bentuk penjajahan. Negara pinggiran secara politis merdeka. Tetapi, dalam kenyataannya, negara pinggiran ini masih dikuasai oleh kekuatan-kekuatan finansial dan industrial dari negara pusatsehingga praktis ekonomi negara pinggiran merupakan satelit dari negara pusat. Seperti pada ketergantungan kolonial, negara pinggiran masih mengekspor bahan mentah bagi kebutuhan industri negara pusat. Negara pusat menanamkan modalnya, baik langsung atau melalui kerjasama dengan pengusaha lokal, untuk menghasilkan bahan baku ini. Dengan demikian, pengendalian dilakukan melalui kekuasaan ekonomi, dalam bentuk kekuasaan finansial-industrial.

c. **Ketergantungan teknologis-industrial.** Ini adalah bentuk ketergantungan baru. Kegiatan ekonomi di negara pinggiran tidak lagi berupa ekspor bahan mentah untuk keperluan industri di negara pusat. Perusahaan-perusahaan multinasional dari negara pusat mulai menanam modalnya dalam kegiatan industri yang produknya ditujukanke pasar dalam negeri dari negara-negara pinggiran. Meskipun

industri ini ada di negara pinggiran, bahkan seringkali dimiliki oleh pengusaha lokal, tetapi teknologinya ada di tangan perusahaan-perusahaan multinasional. Seringkali barang-barang modal berupa mesin industri yang ada tidak dijual sebagai komoditi, melainkan disewakan melalui perjanjian paten. Dengan demikian, penguasaan terhadap surplus industri dilakukan melalui monopoli teknologi-industrial

Klasifikasi ketergantungan yang dikemukakan oleh Dos Santos tersebut, semuanya merupakan ketergantungan sebagai suatu perangkat struktur, yaitu karena adanya perbedaan struktur internal antara negaramaju dengan negara terbelakangsehingga negara-negara terbelakang mengalami ketidakadilan dalam hubungan tersebut. Proses ketidakadilan ini sesungguhnya berasal dari dominasi negara-negara maju sebagai pemilik modal dalam menentukan kebijaksanaan investasinyasehingga investasi tersebut meskipun dirasakan positif oleh negara-negara sedang berkembang, tetap menimbulkan ketimpangan dalam perolehan nilai surplus yang masuk ke masing-masing negara. Nilai surplus ini biasanya lebih banyak yang mengalir ke negara investor daripada ke negara yang dibantu

B. Kebijakan-Kebijakan Pembangunan Pertanian

Secara makro, sejarah telah membuktikan bahwa pertanian telah memberikan surplus tenaga kerja, simpanan dan devisa negara yang mampu menyokong pertumbuhan sektor lain. Baik di negara maju maupun negara berkembang. Sektor ini juga mampu memberikan sumbangan yang besar pada perekonomian negara dan

pertumbuhannya.

Hal ini karena pertumbuhan ekonomi sektor pertanian memiliki multiplier effect(efek pengganda) yang lebih besar dibandingkan sektor lain. Beberapa studi menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang secara efektif mampu menurunkan kemiskinan baik di desa maupun di kota, meskipun keuntungan masyarakat yang secara ekonomi terbatas lebih rendah pada negara yang distribusi pendapatannya tidak merata.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan (terutama pembangunan pertanian) adalah rendahnya produktivitas dalam skala mikro, produksi total secara makro, dan kesejahteraan pelaku usaha pertanian itu sendiri.Dalam jangka pendek pembangunan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan, akan tetapi dalam jangka panjang tujuan pembangunan bertujuan memberikan kesetabilan harga pelaku usaha. Secara umum arah kebijakan pertanian adalah memberikan kepastian berlangsungnya usaha baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tentunya, kebijakan tersebut tidak terlepas dari perdagangan luar negeri.

Tujuan kebijakan pertanian mendasar tidak hanya meningkatkan produksi, akan tetapi hal yang lebih utama adalah pembangunan manusia, membantu mereka memenuhi kebutuhan dasarnya. Meningkatkan pendapatan keluarga pedesaan merupakan hal mendasar untuk mencapai tujuan tersebut, dan pada gilirannya menekankan pada peningkatan produktivitas dan memberikan harga pada tingkat petani yang tepat.

Perlu dipahami bersama bahwa kebijakan pertanian bukanlah suatu yang ekslusif, kebijakan yang terlepas dari kebijakan lainnya. Kebijakan pertanian untuk petani, terutama petani kecil, diarahkan bersifat inklusif. Sejarah mencatat bahwa keberhasilan kebijakan pertanian Indonesia sangat tergantung kondisi dasar kebutuhan

petani. Paket pancausahatani yang dibungkus dengan program BIMAS (bimbingan massal) memberikan capaian yang relative menggemberikan. Hal ini lebih dipengaruhi karena paket teknologi yang tanpa adanya pemberian kredit pendanaan (BIMAS) cenderung tidak diaplikasikan.

Selain itu, instrumen kebijakan pertanian merupakan hal yang tidak langsung dan lintas sektoral. Pengaturan harga output saja memberikan dampak yang lebih kecil dibandingkan denganpengaturan harga output dan harga input dalam bentuk rasio. Misalkan penetapan harga gabah saja tanpa mengatur harga pupuk memberikan dampak yang kurang berarti dibandingkan dengan pengaturan keduanya. Hal ini karena pupuk merupakan input penting dalam proses produksi.

Sekarang pemerintah tidak berperan langsung pada kegiatan produksi dan pemasaran akan tetapi lebih fokus untuk memastikan ketepatan fungsi faktor produksidan pasar produk di pedesaan termasuk pengembangan kelembagaan. Karenanya, kebijakan danperan legislasi (pembuatan peraturan) menjadi lebih penting.Dalam jangka panjang, ruang lingkup kebijakan pertanian diarahkan pada pertumbuhan pertanian. Ini merupakan yang perlu dikoreksi dari waktu ke waktu.

Kebijakan perlu diarahkan pada unsur-unsur ekonomi makro seperti kebijakan rasio harga output dan input, kebijakan pada pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusiatermasuk sumberdaya bersama dan sumberdaya publik seperti irigasi, kebijakan untuk mendapatkan akses input, pasar output, dan teknologi pertanian.

Untuk mencapai arah kebijakandalam jangka panjang, Norton (2004) memberikan prinsip-prinsip (strategi) antara lain:

- Keberlanjutan ekonomi (pendapatan). Strategi ini diarahkan untuk memberikan garansi pada pendapatan pelaku usaha (petani), artinya kebijakan tersebut memberikan pendapatan

riel yang lebih besar dari waktu ke waktu.

- Keberlanjutan sosial (mengurangi kemiskinan), artinya strategi juga perlu diarahkan untuk menggapai masyarakat yang kurang beruntung misalnya petani marginal, dll.
- Keberlanjutan fiskal. Prinsip ini menggaris bawahi bahwa kemampuan fiscal pemerintah bersifat terbatas, karenanya perlu adanya penggalian sumberdana atau sumberdaya lain lain untuk mendanai program-program pemerintah.
- Keberlanjutan kelembagaan. Kelembagaan ini dimaksudkan untuk memunculkan kemandirian petani. Misalnya adanya institusi kredit yang memberikan kredit bergulir bagi petani. Dalam jangka panjang, jika institusi tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan (bergulir) maka tidak akan memberikan manfaat yang merata bagi keseluruhan anggota.
- Keberlanjutan lingkungan. Tentunya, strategi dalam jangka panjang harus memperhatikan factor ini. Misalnya, eksploitasi yang berlebihan pada sumberdaya airmenyebabkan jumlah air pada masa yang akan datang berkurang.

Lebih dari itu, Norton (2004) juga menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan pertanian merupakan suatu yang inklusif dan dapat diamati dalam jangka panjang. Beberapa peran lain yang secara tidak langsung berpengaruh pada kondisi pertanian adalah:

- Menyediakan barang public
- Menjelaskan dan memberikan perlindungan pada barang-barang tertentu
- Menjelaskan tentang perlunya kompetisi,
- Meningkatkan fungsi pasar melalui pengembangan regulasi dan kelembagaan

- Memberikan atau menyediakan asuransi sosial
- Menjaga stabilisasi ekonomi.

C. Kebijakan Pertanian Terkait Insentif Produksi

1. Pentingnya Kebijakan Harga Riel

Kebijakan harga ouput yang penetapannya telah memperhatikan berbagai biaya input dan kebutuhan hidup petani secara wajar. Karenanya harga yang diterima petani dianggap sudah mampu mencerminkan nilai tukar petani. Akan tetapi peningkatan harga tersebut ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan harga beras dunia yang dirasa memberatkan konsumen. Selain itu adanya bencana alam seperti el-nino yang menyebabkan kegagalan panen menyebabkan jumlah stokberas dalam negeri berkurang. Akibatnyaharga cenderung mengalami peningkatan.Karenanya kebijakan impor menjadi salah satu alternative solusi. Adanya impor beras menyebabkan polemik baik bagi birokrat, akademisi dan pengamat pemerhati pangan di Indonesia.

Selain itu kebijakan harga input menemukan banyak masalah terutama adanya rent seekeryang mengalihkan subsidi pupuk untuk komoditas pangan kepada komoditas selain pangan terutama perkebunan komersiil. Selain itu, subsidi tersebut lebih banyak dinikmati untuk masyarakat dengan luas kepemilikan lahan yang di atas rata-rata. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan kelangkaan pupuk di pasarm, dan bahkan cenderung hilang saat dibutuhkan. Sebenarnya di kalangan petani ada pendapat bahwa petani bersedia membeli pupuk dengan harga pasar (tanpa subsidi) asalkan ketersediaan di pasar (kios) memenuhi.

Pertanyaan menarik adalah apakah Negara-negara lain tidak

memberlakukan baik kebijakan harga output maupun harga input? Jawabannya adalah tidak. Negara-negara lainpun melakukan proteksi yang sama. Yang membedakan adalah adanya proteksi tersebut mampu menaikkan produksi total (termasuk produktivitasnya), sehingga mereka mampu melakukan ekspor karena produksi dalam negeri mampu menutupi kebutuhan dalam negeri.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya ratifikasi perdagangan dalam sebuah kawasan. Misalnyaadanya kawasan ekonomi ASEAN (MEA), adanya Asean Free Trade Agreement(AFTA) akan mengarahkan perdagangan dengan meminimalkan tariff atau bahkan menghilangkannya. Persetujuan ini akan mengarahkan kekompetitifanpengusahaan komoditas pertanian suatu negara. Secara global, tariff komoditas pertanian pengalamin penurunan dengan persentase yang lebih rendah dibandingkan komoditas non-pertanian.

Sebagai sebuah kesimpulan dapat disarikan bahwa tiga hal yang mempengaruhi harga pertanian riel adalah perkembangan permintaan dan penawaran dalam negeri, perkembangan harga riil internasional, keberadaan subsidi komoditas pertanian Negara-negara pengekspor. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan langsung yang mempengaruhi harga. Selain hal-hal tersebut, sebenanrnya terdapat kebijakan lain yang dapat meningkatkan kemampuan petani untuk meningkatkan nilai tukar (termasuk harga riil) antara lain kebijakan tentang infrastruktur pertanian termasuk di dalamnya adalah irigasi, kebijakan perkreditan pedesaan untuk penguatan modal petani, kebijakan penguasaan lahan, dan kebijakan fasilitasi pemasaran.

1. Kebijakan yang Dapat Meningkatkan Kemampuan Harga Riel Petani

Kebijakan ekonomi makro dapat mendukung pembanguan pemerintah melalui kombinasi beberapa kebijakan pemerintah, menjaga

tingkat pertukaran kompetitif merupakan kebijakan yang powerful yang tidak berpihak pada alokasi sumberdaya pada sektor produktif. Kebijakan pengontrolan harga semata akan menimbulkan polemic yang berkepanjangan terkait pengaturan posisi permintaan dan penawaran suatu komoditas. Karenanya, kebijakan makroekonomi dalam pembangunan pertanian perlu dikaitkan dengan reformasi kelembagaan dan struktur di pertanian, seperti pada kepemilikan lahan, manajemen air, system keuangan dan teknologi pertanian. Perubahan (reformasi) dalam bidang ini diharapkan dapat meningkatkan tefisiensi sektor-sektor dan dapat menurunkan kemiskinan.

Masalah kepemilikan lahan merupakan permasalahan yang rumit dan cenderung berkepanjangan. Kepemilikan lahan yang sempit, jumlah anggoata keluarga yang banyak, transformasi pertanian ke non pertanian yang kurang sukses, terkonsentrasinya kepemilikan lahan pada beberapa pemilik menyebabkan aturan yang diterbitkan pemerintah sulit diaplikasikan di lapangan. Keinginan pemerintah adalah pemerataan pendapatan petani melalui instrument-intrumen yang dimiliki baik keuangan maupun fisik.

Pemerataan kepemilikan lahan dengan mengakuisi kepemilikan lahan rakyat kepada kepemilikan pemerintah tidak hanya mengurangi kebebasan kepemilikan lahan, akan tetapi juga memunculkan permasalahan baru terkait permasalahan-permasalahan social yang muncul dengan system tersebut. Pemerintah dapat berupaya dalam mengurangi terkonsentrasinya kepemilikan lahandengan penetapan pajak tanah yang bersifat progresif. Selain itu pembatasan kepemilikan lahan hingga luasan tertentu diharapkan mampu memeratakan kepemilikan lahan.

Kebijakan lain yang dapat meningkatkan efisiensi pertanian adalah kebijakan bidang irigasi. Sejarah mencatat bahwa sejak masa pra-kolonial irigasi merupakan hal yang penting sebagai penunjang

produksi pertanian. Pada awalnya sungai-sungai besar yang dibuat tidak diarahkandigunakan untuk irigasi pertanian, akan tetapi lebih pada upaya menanggulangi banjir atau berfungsi sebagai pembuangan air. Pada masa colonial kebijakan irigasi diarahkan pada pembangunan waduk-waduk untuk mengairi perkebunan dan komoditas yang laku di pasaran dunia pada saat itu. Setelah kemerdekaan irigasi lebih banyak diarahkan pada komoditas pangan yang merupakan komoditas paling penting. Pembangunan sarana irigasi dilaksanakan dari waktu ke waktu dan secara berkesinambungan.

Pembangunan sarana infrastruktur irigasi membutuhkan biaya fiscal yang sangat besar.Selain itu, sumber-sumber air yang baru juga sudah mulai berkurang. Karenanya, kebijakan irigasi lebih diarahkan pada manajemen pemiliharaan saluran irigasi dibandingkan pembangunan waduk baru. Beberapa contoh manajemen air irigasi dapat meningkatkan efisiensi produksi dengan meningkatkan indeks pertanaman dalam sebuah hamparan.

Pertanian rakyat (pertanian yang diusahakan oleh rumah tangga tani) dengan kepemilikan lahan sempit biasanya terkendala dengan permodalan. Permodalan petani kecil biasnya inklusif dengan biaya hidupnya. Sehingga tidak jarang paket teknologi yang tidak dibarengi dengan paket pembiayaan akan terkendala dengan implementasinya. Sejarah mencatat bahwa keberhasilan program panca usahatani sangat terkait sekali dengan program bimbingan massal (BIMAS).

Saat itu pemerintah memberikan kredit dalam bentuk natura berupa paket kredit input pertanian termasuk bibit unggul, pupuk kimia (urea, TSP, ZA, dan lainnya). Program BIMAS tersebut terserap dengan baik oleh masyarakat. Namun, permasalahan terkait kredit tersebut adalah rendahnya pengembalian pinjaman. Hal inimengarahkan pemerintah untuk membuat paket program kredit yang dapat berdaya dengan sendirinya. Artinya, program

diarahkan pada keseimbangan antara penyediaan dana pinjaman dan serapan pinjaman tersebut.

Terakhir kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi adalah kebijakan penerapan teknologi. Teknologi merupakan salah satu yang dapat meningkatkan efisiensi termasuk meminimkan biaya produksi. Terdapat dua paket teknologi utama yaitu teknologi berbentuk biologi (termasuk kimia) dan teknologi fisik (termasuk peralatan pertanian).

Permasalahan utama terkait teknologi adalah upaya penciptakan teknologi tepat guna, dan kedua upaya aplikasi teknologi ke masyarakat(Hayami dan Ruttan, 1985). Untuk komoditas tertentu (misalnya padi), upaya penciptaan teknologi dapat dilakukan oleh pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Teknologi tersebut merupakan teknologi yang tepat guna sesuai dengan kondisi geografis di mana komoditas tersebut diusahakan. Untuk komoditas komersial, pencipataan bibit dapat dilakukan oleh swasta.

Empat kebijakan tersebut (kebijakan kepemilikan lahan, kebijakan manajemen irigasi, kebijakan kuangan, dan kebijakan teknologi) berisi peran pelaku usaha (produsen dan konsumen), pemerintah dan sistem kelembagaannya. Keseimbangan antara produsen dan konsumen tanpa peran pemerintah bisa jadi merupakan keseimbangan yang efisien, akan tetapi kondisi ini cenderung memunculkan konsentrasi kekayaan pada sekelompok modal. Karenanya, bagaimanapun, peran pemerintah diperlukan untuk mengatur interaksi produsen dan konsumen.

D. Pertanyaan

1) Jelaskan salah satu ciri dari teori-teori modernisasi dalam pembangunan!
2) Bandingkan antara tahap masyarakat tradisional dan tahap konsumsi massal yang tinggi, menurut Teori Rostow
3) Jelaskan perbedaan pandangan antara Andre Gunder Frank dan Dos Santos dalam melihat masalah keterbelakangan di negara-negara pinggiran (satelit)!
4) Jelaskan perbedaan pandangan antara teori artikulasi dan teori ketergantungan (terutama teori Andre Gunder Frank) dalam melihat persoalan keterbelakangan!Jelaskan terbagai berapa bidang UMKM yang ada di Indonesia dan sebutkan.

E. Daftar Pustaka

Hayami Y., dan V.W.Ruttan, 1985, Agricultural Development: An International Perspective,

Johns Hopkins University Press, Baltimore dan London.

Schultz T. W., 1977, Transforming Traditional Agriculture,

Muljana, 1987, Beberapa Pengertian dan Masalah mengenai Pembangunan Ekonomi dalam Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan, Editor: Hendra Esmara, Gramedia, Jakarta.

Norton, R.D., 2004, Agricultural Development Policy: Concept and Experiences, John Willey & Sons Ltd Publisher, West Susex



BAB - XIII

KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN

Tujuan Intruksional

1. Memahami esesnsi kemiskinan
2. Memahami indikator kemiskinan.
3. Memahami ketimpangan pendapatan
4. Memahami ekonomi rakyat

A. Esensi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia didalam melaksanakan pembangunan. Kemiskinan terjadi oleh berbagai sebab seperti disebutkan oleh Todaro (2004) bahwa perpaduan tingkat pendapatan perkapita yang rendah dan distribusi pendapatan yang sangat tidak merata akan menghasilkan kemiskinan absolut yang parah, lebih lanjut dikatakan bahwa salah satu generalisasi yang terbilang paling valid mengenai penduduk miskin adalah bahwasanya mereka pada umumnya bertempat tinggal di daerah-daerah perdesaan, dengan mata pencaharian pokok di bidang pertanian dan kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan sektor ekonomi tradisional. Gregorius mengatakan bahwa kemiskinan tidak bisa didefinisikan

dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Karenanya, kemiskinan hanya dapat ditanggulangi apabila dimensi-dimensi lain diperhitungkan.

Menurut Suharto(2004) masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Menurut Nehen (2010) yang dimaksud kemiskinan adalah penduduk miskin, yakni penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lebih lanjut dikatakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan antara lain mulai dari tingkat pertumbuhan output (atauproduktivitas tenaga kerja), tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja (termasuk jenis pekerjaan yang tersedia), tingkat inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta kualitas sumber daya alam, ketersediaan fasilitas umum (seperti pendidikan dasar, kesehatan, informasi, transportasi, listrik, air, dan lokasi pemukiman), penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam di satu wilayah, etos kerja dan motivasi kerja, kultur/budaya hingga politik, bencana alam, dan peperangan.

Kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau kelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar masyarakatdesa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupansosial politik,

baik laki-laki maupun perempuan. Mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, Bapenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach), serta pendekatan objektif dan subjektif.

Reksohadiprojo dkk (1994 dalam Krisno Dwipoyono, 2009) mengemukakan bahwa seseorang berada dalam kemiskinan bila penghasilannya termasuk kekayaannya yang dinilai sekarang, lebih kecil daripada jumlah yang dipandang cukup oleh masyarakat.

Kemiskinan sesungguhnya bukan semata-mata kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau standar hidup layak, namun lebih dari itu esensikemiskinan adalah menyangkut kemungkinan atau probabilitasorang atau keluarga miskin itu untuk melangsungkan dan mengembangkan usaha serta taraf hidupnya(Suyanto, 2010).Menurut Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Denpasar (2007) penyebab dasar kemiskinan antara lain: karena kegagalan pemilikan (terutama tanah dan modal); terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana; adanya perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat dan system yang kurang mendukung; adanya perbedaan SDM dan perbedaan antar sektor ekonomi; rendahnya produktifitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungannya.

Kemiskinan berkaitan dengan masalahdeprisiasi sosial, akses ke sumberdaya seperti air, tempat tinggal, layanan kesehatan dan sanitasi, pendidikan serta transportasi, yang mana akar permasalahan kemiskinan adalah ketergantungan, isolasi, ketidakberdayaan (vulnerability) dan rendahnya harapan hidup(Chambers dalam

Pattinama, 2009).Kemiskinan secara singkat dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan satandar kehidupanumum berlaku dalam masyarakat bersangkutan(Parsudi Suparlan dalam Mustofa, 2005). Standar kehidupan yang rendah tersebut nampak langsung pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Kemiskinan secara multidimensional, maka kemiskinan dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu : (1) dimensi makro; (2) dimensi mezzo; dan (3) dimensi mikro(Adi, 2005). Dimensi makro : Kesenjangan pembangunan antara desa (daerah minus) dan kota (daerah surplus) merupakan salah satu faktor penyebab utama terciptanya migrasi desa ke kota yang tak terkendali. Keadaan seperti ini menyebabkan human capitalyang potensial dari daerah perdesaan, yang seharusnya difokuskan untuk membangun daerah perdesaan justru mengalir ke kota-kota besar dan mereka sebagian besar belum dapat berkompetisi dengan angkatan kerja yang mendapat pendidikan di kota tersebut.

Hal ini menyebabkan mereka seringkali belum dapat memasuki alur utama dunia pekerjaan, sehingga tenaga kerja dari daerah perdesaan yang belum mempunyai keterampilan yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja, lebih sering masuk ke sektor informal, ataupun terlempar ke jalan. Dimensi Mezzo : melemahnya sosial trustdalam komunitas dan organisasi. Sosial trustsebagai unsur pengikat suatu interaksi sosial yang sehat, dan menjadi bagian utama modal sosial, memegang peranan penting dalam suatu upaya pembangunan.

Pembangunan sulit mencapai hasil yang optimal bila tidak ada trustantarpelaku pembangunan itu sendiri. Sosial trustbukan saja berada pada dimensi vertikal (misalnya antara pemerintah dengan warga masyarakat) tetapi juga harus ada pada dimensi horizontal

(misalnya antarsuku yang ada di suatu komunitas). Dimensi Mikro : mentalitas materialistik dan ingin serba cepat (instant). Perkembangan mentalitas ini pada titik tertentu, menjadi sisi negatif yang akhirnya akan memunculkan mentalitas korup.

Bencana banjir akibat penebangan hutan yang tidak terkendali, pengelolaan sampah dan limbah yang kurang professional, penerimaan pegawai yang tidak berdasarkan kualitas, pemberian proyek pada rekanan yang kurang berkualitas merupakan beberapa contoh sederhana buah dari mental korup ini.Dari berbagai definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kemiskinan adalah keadaan dimana tidak terpenuhinya kebutuhan dasar (basic need) manusia secara layak yang diakibatkan oleh rendahnya pendapatan dan ketidakberdayaan.

Poverty as capability deprivation.Kemiskinan sebagai kehilangan/ ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, perumahan, pendidikan dan pangan (Sen, 2000). Kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang disebabkan oleh terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan(Mubyarto, 1998). Rendahnyapendapatan penduduk miskin menyebabkan rendahnya pendidikan dan kesehatan, hingga mempengaruhi produktifitas mereka yang sudah rendah dan meningkatkan ketergantungan bagi masyarakat.

B. Indikator Kemiskinan

Pengukuran mengenai kemiskinan yang selama ini banyak dipergunakandidasarkan pada ukuran atas rata-rata pendapatan dan

rata-rata pengeluaranmasyarakat dalam suatu daerah.Perluasan pengukuran dengan menyertakanpandangan mengenai dimensi permasalahan dalam kemiskinan mengukurbanyaknya individu dalam sekelompokmasyarakat yang mendapatkan pelayananatau fasilitas untuk kesehatan dan pendidikan. Beberapa perluasan pengukuranlainnya adalah menyertakan dimensi sosial politik sebagai referensi untukmenerangkan terbentuknya kemiskinan. Keseluruhan hasil pengukuran iniselanjutnya dikatakan sebagaiindikator-indikator kemiskinan yang digolongkansebagai indikator-indikator sosial dalam pembangunan.

Adapun mengenai beberapa indikator-indikator kemiskinan sebegai berikut :

1. Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Ekonomi

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, kemiskinan adalah bentuk ketidakmampuan dari pendapatan seseorang maupun sekelompok orang untukmencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar.Dimensi ekonomi dari kemiskinan diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan seseorang baik secarafinansial maupun jenis kekayaan lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suryawati, 2004:123).

Dari pengertianini, dimensi ekonomi untuk kemiskinan memiliki dua aspek, yaitu aspekpendapatan dan aspek konsumsi atau pengeluaran.Aspek pendapatan yang dapat dijadikan sebagai indikator kemiskinan adalah pendapatan per kapita, sedangkan untuk aspek konsumsi yang dapat digunakan sebagai indikator kemiskinan adalah garis kemiskinan.

1) Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita menyatakan besarnya rata-rata pendapatanmasyarakat di suatu daerah selama kurun waktu 1 tahun. Besarnyapendapatan perkapita (income per capita) dihitung dari besarnya outputdibagi oleh jumlah penduduk di suatu daerah untuk kurun waktu 1 tahun(Todaro, 1997:437).Indikator pendapatan per kapita menerangkanterbentuknya pemerataan pendapatan yang merupakan salah satu indikasiterbentuknya kondisi yang disebut miskin.

2) Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan yang menyatakan rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan per kapitapada kelompok referensi (reference population) yang telah ditetapkan(BPS, 2004). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelasmarjinal, yaitu mereka yang hidupnya dikategorikan berada sedikit di atas garis kemiskinan. Berdasarkan definisi dari BPS, garis kemiskinan dapatdiartikan sebagai batas konsumsi minimum dari kelompok masyarakat marjinal yang berada pada referensi pendapatan sedikit lebih besar daripada pendapatan terendah. Pada prinsipnya, indikator garis kemiskinan mengukur kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok/dasar atau mengukur daya beli minimum masyarakat disuatu daerah.Konsumsi yang dimaksudkan dalam garis kemiskinan inimeliputi konsumsi untuk sandang, pangan, perumahan, kesehatan, danpendidikan (Suryawati, 2004: 123).

2. Indikator Kemiskinan Berdasarkan DimensiPeran Pemerintah

Pemerintah sebagai regulator sekaligus dinamisator dalam suatuperekonomian merupakan salah satu pihak yang memiliki peran sentral dalamupaya untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan. Di Indonesia, pelaksanaan penanggulangan permasalahan kemiskinan dikoordinasikan oleh KementrianKoordinator Bidang Kesejahteraan yang bekerja sama dengan DepartemenKesehatan dan Departemen Sosial. Program penanggulangan masalah kemiskinanini dibiayai melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional (APBN) melalui pos pengeluaran untuk Program Pembangunan.Prinsip yang digunakan untuk program ini bahwa penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui upayauntuk meningkatkan pembangunan di bidang sumber daya manusia danpemenuhan sarana maupun pra sarana fisik. Kedua bentuk pelaksanaan dalamAPBN ini disebut juga investasi pemerintah untuk sumber daya manusia daninvestasi pemerintah di bidang fisik.

1) Investasi Pemerintah di Bidang Sumber Daya Manusia

Investasi pemerintah di bidang sumber daya manusia ditujukan untukmeningkatkan kualitas sumber daya manusia yang direalisasikan di bidangpendidikan, agama, kebudayaan, kesejahteraan, pembinaan wanita dananak-anak, pengembangan kualitas tenaga kerja, pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi, dan pendidikan agama. Keseluruh aspek dibidang sumber daya manusia di atas merupakan salah satu syarat dasardalam program penanggulangan masalah kemiskinan.

2) Investasi Pemerintah di BidangFisik

Investasi pemerintah di bidang fisik atau disebut juga

investasi fisik pemerintah adalah pengeluaran pemerintah yang secara umum ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat yang direalisasikan kedalam pembangunan fisik. Pada APBN, pos pengeluaran untuk investasi fisikpemerintah ini adalah keseluruhan pos pengeluaran pembangunan kecuali untuk bidang investasi sumber daya manusia.

3. Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Kesehatan

Dari berbagai data kemiskinan yang dihimpun menyebutkan adanya keterkaitanantara kemiskinan dan kualitas kesehatan masyarakat. Rendahnya kemampuan pendapatan dalam mencukupi/ memenuhi kebutuhan pokok menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk menjangkau atau memperoleh standar kesehatan yang ideal/layak baik dalam bentuk gizi maupun pelayanan kesehatan yang memadai. Dampak dari kondisi seperti ini adalah tingginya resikoterhadap kondisi kekurangan gizi dan kerentanan atau resikoterserang penyakitmenular.Kelompok masyarakat yang disebut miskin juga memiliki keterbatasan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan yang memadai sehinggaakan menyebabkan resiko kematian yang tinggi.

Indikator pelayanan air bersih atau air minum merupakan salah satupersyaratan terpenuhinya standar hidup yang ideal di suatu daerah. Ketersediaan air bersih akan mendukung masyarakat untuk mewujudkan standar hidup sehat yang layak.Dalam hal ini, ketersediaan air bersihakan mengurangi resikoterserang penyakit yang diakibatkan kondisi sanitasi air yang buruk.Berdasarkanpenjelasan tersebut, maka terdapat keterkaitan/hubungan antara ketersediaanpelayanan air bersih dan jumlah penduduk miskin di suatu daerah.Pada sisipermasalahan lain, ketersediaan air bersih sangat ditentukan oleh kemampuanpembangunan pra sarana air bersih dalam

menjangkau lingkungan ataupemukiman masyarakat.Masyarakat yang kurang terjangkau oleh pelayanan airbersih/minum relatif lebih rendah kualitas kesehatannya dibandingkanmasyarakatyang telah mendapatkan pelayanan air bersih.

C. Ketimpangan Pendapatan

Menurut Robert E Baldwin (1986), kesenjangan pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuraan ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Hal ini tercermin dari perbedaan pendapatan.

Masalah kesenjangan pendapatan juga sering diikhtisarkan, bahwa pendapatan riil dari yang kaya terus betambah sedangkan yang miskin terus berkurang. Ini berarti bahwa pendapatan riil dari yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin (Bruce Herrick/Charles P Kindeleberger,1988 : 171).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antara golongan dalam masyarakat tersebut. Akibat dari kesenjangan tersebut maka akan terlihat kesenjangan yaitu yang kaya semakin kaya dan sebaliknya yang miskin akan semakin terpuruk.

Menurut Mubyarto (1995), kesenjangan dapat dibedakan menjadi ;

a. Kesenjangan antar sektor, yaitu sektor industri dan sektor pertanian. Kesenjangan jenis ini merupakan masalah lama dan sudah menjadi bahan kajian para pakar di banyak negara
b. Kesenjangan antar daerah. Dalam sejarah, kesenjangan antar daerah terjadi antar wilayah Jawad an Luar Jawa, dan sejak kemajuan Provinsi Bali yang luar biasa, menjadi kesenjangan “Jawa dengan Luar Jawa Bali”

c. Kesenjangan antar golongan ekonomi. Kesenjangan jenis ini adalah yang paling berat dan dalam sistem perekonomian yang cenderung liberal atau kapitalis, perekonomian yang tumbuh terlalu cepat justru mengakibatkan kesenjangna menjadi semakin parah.

Todaro dan Smith (2006), menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan menyebabkan beberapa hal, antara lain:

a. Ketimpangan yang ekstrim akan menyebabkan inefisiensi ekonomi
b. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas
c. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim umumnya dianggap kurang adil.

D. Ekonomi Rakyat

Sarbini Sumawinata dalam buku politik Ekonomi Kerakyatan mendefinisikan ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara, sifat dan tujujan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat yang pada umumnya bermuim di pedesaan.

Ekonomi Kerakyatan merupakan system perekonomian yang dimana pelaksanaan kegiatan, pengawasannya, dan hasil dari kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Atau definisi ekonomi kerakyatan juga bisa diartikan sebagai suatu system perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan yaitu kegiatan dari ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh masyarakat dalam berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan

berkembang secara baik.

Sistem Ekonomi kerakyatan sebenarnya merupakan sistem ekonomi yang mengacu pada amanat konstitusi nasional, Pancasila dan UUD 1945 merupakan asal muasal tercetusnya ekonomi pancasila atau Ekonomi Kerakyatan yakni tersirat dalam sila kelima pada Pancasila "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia",33 sedangkan UUD 1945 terdapat pada pasal sebagai berikut:

a) Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: "Tiap-tiap warga negara berhak ataspekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"
b) Pasal 28 UUD 1945 : "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."
c) Pasal 31 UUD 1945 : "Negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan"
d) Pasal 33 UUD 1945 :
    - Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
    - Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
    - Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
e) Pasal 34 UUD 1945 : "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara"

E. Pertanyaan

1. Jelaskan esensi kerakyatan, dan apakah esensi kerakyatan sudah diterapkan di Negara Indonesia
2. Apakah indikator kemiskinan bisa mendeteksi kondisi miskin suatu negara
3. Apakah ketimpangan pendapatan di Indonesia bisa diatasi dan bagaimana solusi mengatasi ketimpangan pendapatan tersebut
4. Jelasakan ekonomi rakyat sudah diaplikasikan di Indonesia dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi rakyat